



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga telah melakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Pasal 43 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 merupakan dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang didasarkan pada penetapan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pemutakhiran terhadap:
 - a. Kerangka Ekonomi Makro dan arah kebijakan fiskal;
 - b. Sasaran dan Target Pengembangan Wilayah;
 - c. Integrasi Pendanaan;
 - d. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan;
 - e. Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Pembangunan Nasional; dan
 - f. Sasaran, Indikator, Target, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh:
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; dan
 - b. menteri/kepala lembaga untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan pelaksanaan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 kepada Presiden.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1757

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN
2020

MATRIKS SUBSTANSI PEMUTAKHIRAN RKP 2020

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
BAB 2. SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
2.1 Evaluasi RKP Tahun 2018			
1.	Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah (Perubahan narasi pada Paragraf 4 Halaman II.3)	PN Pembangunan Wilayah memfokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Pencapaian PN Pembangunan Wilayah menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2018. Sasaran ...	PN Pembangunan Wilayah memfokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Pencapaian PN Pembangunan Wilayah menunjukkan kinerja yang cukup baik pada tahun 2018. Sasaran ...
2.2 Kerangka Ekonomi Makro			
2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2020			
2.	Pertumbuhan Ekonomi (Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.15)	Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,5 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.	Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.
3.	GNI per Kapita (Atlas Method) (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.16)	GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.330 – 4.360 per kapita pada tahun 2020.	GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.320 per kapita pada tahun 2020.
4.	Tingkat Inflasi (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.16)	Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,0±1 persen.	Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,1 persen.
5.	Nilai Tukar (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.16)	Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil sesuai fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.000-14.500 per USD pada tahun 2020.	Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil sesuai fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.400 per USD pada tahun 2020.

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.16)	Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,8 – 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2020.	Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,8 – 5,0 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2020.

2.2 Kerangka Ekonomi Makro

2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2020

2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020

7.	Sasaran Ekonomi Makro 2020 (Perubahan data tahun 2020 pada Tabel 2.5 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020, Halaman II.17 dan II.18)	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020		Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020	
		Uraian	2020*)	Uraian	2020**)
		Perkiraan Besaran-besaran Pokok		Perkiraan Besaran-besaran Pokok	
		Pertumbuhan PDB (%)	5,2 – 5,5	Pertumbuhan PDB (%)	5,3
		Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	2,0 – 4,0	Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,1
		Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata	14.000 – 14.500	Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata	14.400
		Neraca Pembayaran		Neraca Pembayaran	
		Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	6,9 – 9,2	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	4,3
		Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	7,6 – 9,4	Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	5,2
		Cadangan Devisa (USD miliar)	121,3 – 122,6	Cadangan Devisa (USD miliar)	123,7
		- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah)	5,9 – 6,0	- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah)	6,9
		Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	2,7 – 2,9	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	2,8
		Keuangan Negara		Keuangan Negara	
		Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,57 – 11,18	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,69
		Belanja Modal (% PDB)	1,43 – 1,58	Belanja Modal (% PDB)	1,20
		Subsidi Energi (% PDB)	0,82 – 0,83	Subsidi Energi (% PDB)	0,72
		Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00 – 0,23	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,07)
		Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,75) – (1,52)	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,76)
		Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,10 – 29,40	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,45
		Investasi		Investasi	
		Peringkat Indonesia pada EODB	Menuju 40	Peringkat Indonesia pada EODB	Menuju 40
		Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,9 – 7,3	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,0
		Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	875,1 – 890,3	Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	886,0
		Target Pembangunan		Target Pembangunan	
		Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,0

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020		PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	
		Rasio Gini (nilai)	0,375 – 0,380	Rasio Gini (nilai)	0,375 – 0,380
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,51	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,51
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019	
8.	Pertumbuhan Ekonomi (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.18)	Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,5 persen pada tahun 2020		Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun 2020	
9.	Pertumbuhan Industri Pengolahan (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.19)	Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong utamanya oleh industri pengolahan yang diharapkan mampu tumbuh 4,9 – 5,4 persen pada tahun 2020.		Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong utamanya oleh industri pengolahan yang diharapkan mampu tumbuh 5,0 persen pada tahun 2020.	
10.	Pertumbuhan Sektor Pertanian Pengolahan (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.19)	Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,7 – 3,9 persen, melalui modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.		Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,7 persen, melalui modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.	
11.	Pertumbuhan Sektor Pertambangan (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.19)	Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,8 – 2,0 persen didukung oleh peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir.		Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,9 persen didukung oleh peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir.	
12.	Pertumbuhan Sektor-sektor Jasa (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.19)	Sementara itu, transformasi sektor jasa yang didorong oleh pengembangan inovasi dan teknologi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor, seperti perdagangan sebesar 5,3 – 5,7 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,1 – 7,5 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar 7,0 – 7,1 persen.		Sementara itu, transformasi sektor jasa yang didorong oleh pengembangan inovasi dan teknologi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor, seperti perdagangan sebesar 5,5 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,3 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar 7,0 persen.	
13.	Pertumbuhan Sektor Konstruksi (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.19)	Sektor konstruksi akan tumbuh 5,6 – 5,9 persen seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur.		Sektor konstruksi akan tumbuh 5,7 persen seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur.	
14.	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2020	Uraian		Uraian	
		2020		2020	
		Pertumbuhan PDB (%)	5,2 – 5,5	Pertumbuhan PDB (%)	5,3
		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,7 – 3,9	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,7
		Pertambangan dan Penggalian	1,8 – 2,0	Pertambangan dan Penggalian	1,9

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020		PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																													
	(Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.6 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Tahun 2020 (Persen), Halaman II.19)	Industri Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Sumber: APBN 2020 dan perhitungan Bappenas, 2019	4,9 – 5,4 4,1 – 4,4 3,9 – 4,2 5,6 – 5,9 5,3 – 5,7 7,0 – 7,1 5,8 – 6,3 7,1 – 7,5 6,1 – 6,6 4,8 – 5,1 8,3 – 8,6 4,4 – 4,7 5,1 – 5,4 7,5 – 7,7 9,0 – 9,1	Industri Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Sumber: APBN 2020 dan perhitungan Bappenas, 2019	5,0 4,2 4,0 5,7 5,5 7,0 6,0 7,3 6,3 4,9 8,3 4,5 5,1 7,5 8,9																												
15.	Pertumbuhan Investasi (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.20)	Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencapai 6,9 – 7,3 persen.		Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencapai 6,0 persen.																													
16.	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2020 (Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.7 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2020 (Persen), Halaman II.19)	<table border="1" data-bbox="556 1045 1194 1224"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB (%)</td> <td>5,2 – 5,5</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR</td> <td>4,9 – 5,1</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td> <td>4,1 – 4,3</td> </tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td> <td>6,9 – 7,3</td> </tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td> <td>4,7 – 6,7</td> </tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td> <td>5,5 – 7,1</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: APBN 2020 dan perhitungan Bappenas, 2019	Uraian	2020	Pertumbuhan PDB (%)	5,2 – 5,5	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	4,9 – 5,1	Konsumsi Pemerintah	4,1 – 4,3	Investasi (PMTB)	6,9 – 7,3	Ekspor Barang dan Jasa	4,7 – 6,7	Impor Barang dan Jasa	5,5 – 7,1		<table border="1" data-bbox="1514 1045 2152 1224"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB (%)</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR</td> <td>4,9</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td> <td>3,2</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: APBN 2020 dan perhitungan Bappenas, 2019	Uraian	2020	Pertumbuhan PDB (%)	5,3	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	4,9	Konsumsi Pemerintah	4,3	Investasi (PMTB)	6,0	Ekspor Barang dan Jasa	3,7	Impor Barang dan Jasa	3,2	
Uraian	2020																																
Pertumbuhan PDB (%)	5,2 – 5,5																																
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	4,9 – 5,1																																
Konsumsi Pemerintah	4,1 – 4,3																																
Investasi (PMTB)	6,9 – 7,3																																
Ekspor Barang dan Jasa	4,7 – 6,7																																
Impor Barang dan Jasa	5,5 – 7,1																																
Uraian	2020																																
Pertumbuhan PDB (%)	5,3																																
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	4,9																																
Konsumsi Pemerintah	4,3																																
Investasi (PMTB)	6,0																																
Ekspor Barang dan Jasa	3,7																																
Impor Barang dan Jasa	3,2																																
17.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.20)	Dengan kebijakan tersebut, ekspor barang dan jasa diharapkan tumbuh 4,7 – 6,7 persen pada tahun 2020.		Dengan kebijakan tersebut, ekspor barang dan jasa diharapkan tumbuh 3,7 persen pada tahun 2020.																													
18.	Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa	Sementara, impor barang dan jasa tumbuh rata 5,5 – 7,1 persen didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.		Sementara, impor barang dan jasa tumbuh rata 3,2 persen didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.																													

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
	(Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.20)		
19.	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah (Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.20)	Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 4,1 – 4,3 persen pada tahun 2020.	Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 4,3 persen pada tahun 2020.
20.	Menjaga Stabilitas Makroekonomi dari Sisi Eksternal (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 4, Halaman II.20)	Ketidakpastian ekonomi global yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter AS dan Uni-Eropa serta perang dagang antara AS dan China akan mendorong defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 berada di rentang 2,7 – 2,9 persen dari PDB. Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan meningkat pada rentang USD121,3 miliar – USD122,6 miliar pada tahun 2020. Peningkatan cadangan devisa didorong oleh surplusnya neraca pembayaran, seiring dengan peningkatan surplus neraca modal dan finansial yang meningkat pada rentang USD34,9 miliar – USD35,1 miliar. Peningkatan surplus tersebut didorong oleh peningkatan arus investasi langsung pada rentang USD21,9 miliar – USD23,7 miliar.	Ketidakpastian ekonomi global yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter AS dan Uni-Eropa serta perang dagang antara AS dan China akan mendorong defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 berada di level 2,8 persen dari PDB. Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan meningkat di level USD123,7 miliar pada tahun 2020. Peningkatan cadangan devisa didorong oleh surplusnya neraca pembayaran, seiring dengan peningkatan surplus neraca modal dan finansial yang mencapai USD34,9 miliar. Peningkatan surplus tersebut didorong oleh peningkatan arus investasi langsung mencapai USD22,0 miliar.
21.	Menjaga Stabilitas Makroekonomi dari Domestik (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.21)	Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang terkendali. Pada tahun 2020, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,0±1 persen (yoy).	Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang terkendali. Pada tahun 2020, tingkat inflasi diperkirakan mencapai 3,1 persen (yoy).
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.22)	Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 – 3,0 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,8 – 5,1 persen.	Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 – 3,0 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,8 – 5,0 persen.
2.2 Kerangka Ekonomi Makro			
2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan			
2.2.3.1 Kebutuhan Investasi			
23.	Kebutuhan Investasi	Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp6.006,1 – Rp6.024,0 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekitar 6,9 – 8,1 persen.	Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.962,3 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekitar 6,2 persen. Selain dari

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																								
	(Perubahan data pada Paragraf 4, Halaman II.22)	Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sekitar 8,7 – 9,3 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sekitar 82,6 – 84,4 persen.	pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sekitar 8,5 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sekitar 85,4 persen.																								
24.	Kebutuhan Investasi (Perubahan data pada Tabel 2.8 Kebutuhan Investasi Tahun 2020, Halaman II.23)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Share (Persen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Kebutuhan Investasi</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>a. Investasi Pemerintah</td> <td>6,9 – 8,1</td> </tr> <tr> <td>b. Investasi BUMN</td> <td>8,7 – 9,3</td> </tr> <tr> <td>c. Investasi Swasta</td> <td>82,6 – 84,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	Uraian	Share (Persen)	Total Kebutuhan Investasi	100,00	a. Investasi Pemerintah	6,9 – 8,1	b. Investasi BUMN	8,7 – 9,3	c. Investasi Swasta	82,6 – 84,4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Share (Persen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Kebutuhan Investasi</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>a. Investasi Pemerintah</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td>b. Investasi BUMN</td> <td>8,5</td> </tr> <tr> <td>c. Investasi Swasta</td> <td>85,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	Uraian	Share (Persen)	Total Kebutuhan Investasi	100,0	a. Investasi Pemerintah	6,2	b. Investasi BUMN	8,5	c. Investasi Swasta	85,4				
Uraian	Share (Persen)																										
Total Kebutuhan Investasi	100,00																										
a. Investasi Pemerintah	6,9 – 8,1																										
b. Investasi BUMN	8,7 – 9,3																										
c. Investasi Swasta	82,6 – 84,4																										
Uraian	Share (Persen)																										
Total Kebutuhan Investasi	100,0																										
a. Investasi Pemerintah	6,2																										
b. Investasi BUMN	8,5																										
c. Investasi Swasta	85,4																										
2.2 Kerangka Ekonomi Makro																											
2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan																											
2.2.3.2 Sumber Pembiayaan																											
25.	Sumber Pembiayaan Investasi (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.23)	Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 75,5 – 76,8 persen dari total pembiayaan investasi.	Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 76,3 persen dari total pembiayaan investasi.																								
26.	Kebutuhan Investasi (Perubahan data pada Tabel 2.9 Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2020, Halaman II.23)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Share (Persen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredit Perbankan</td> <td>7,5 – 8,2</td> </tr> <tr> <td>Penerbitan Saham</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Penerbitan Obligasi</td> <td>8,8 – 9,1</td> </tr> <tr> <td>Dana Internal BUMN</td> <td>5,8 – 6,1</td> </tr> <tr> <td>Dana Internal Masyarakat</td> <td>75,5 – 76,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	Uraian	Share (Persen)	Kredit Perbankan	7,5 – 8,2	Penerbitan Saham	1,1	Penerbitan Obligasi	8,8 – 9,1	Dana Internal BUMN	5,8 – 6,1	Dana Internal Masyarakat	75,5 – 76,8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Share (Persen)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredit Perbankan</td> <td>7,8</td> </tr> <tr> <td>Penerbitan Saham</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Penerbitan Obligasi</td> <td>9,2</td> </tr> <tr> <td>Dana Internal BUMN</td> <td>5,6</td> </tr> <tr> <td>Dana Internal Masyarakat</td> <td>76,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	Uraian	Share (Persen)	Kredit Perbankan	7,8	Penerbitan Saham	1,1	Penerbitan Obligasi	9,2	Dana Internal BUMN	5,6	Dana Internal Masyarakat	76,3
Uraian	Share (Persen)																										
Kredit Perbankan	7,5 – 8,2																										
Penerbitan Saham	1,1																										
Penerbitan Obligasi	8,8 – 9,1																										
Dana Internal BUMN	5,8 – 6,1																										
Dana Internal Masyarakat	75,5 – 76,8																										
Uraian	Share (Persen)																										
Kredit Perbankan	7,8																										
Penerbitan Saham	1,1																										
Penerbitan Obligasi	9,2																										
Dana Internal BUMN	5,6																										
Dana Internal Masyarakat	76,3																										

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					
2.3 Arah Pengembangan Wilayah											
2.3.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah											
27.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Dalam Persen) (perubahan data pada Tabel 2.1, Halaman II.24). Seharusnya Tabel 2.10	Wilayah	2017	2018	2019	2020	Wilayah	2017	2018	2019	2020
		Sumatera	4,3	4,5	4,6	4,9	Sumatera	4,3	4,5	4,6	4,8
		Jawa-Bali	5,6	5,7	5,7	5,8	Jawa-Bali	5,6	5,7	5,6	5,4
		Nusa Tenggara	2,1	-0,7	3,4	3,7	Nusa Tenggara	2,1	-0,7	4,4	5,9
		Kalimantan	4,3	3,9	5,3	4,1	Kalimantan	4,3	3,9	5,6	6,4
		Sulawesi	7,0	6,7	6,5	7,0	Sulawesi	7,0	6,7	6,6	6,8
		Maluku	6,7	6,8	6,9	6,7	Maluku	6,7	6,8	6,1	6,1
		Papua	4,5	7,0	-14,7	6,0	Papua	4,5	7,0	-13,1	6,0
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: Angka tahun 2017 dan 2018 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2019 adalah realisasi Triwulan I 2019, y-o-y (BPS, diolah)						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: Angka tahun 2017 dan 2018 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2019 adalah realisasi Triwulan III 2019, c-to-c (BPS, diolah)					
2.3 Arah Pengembangan Wilayah											
2.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera											
28.	Target Pengembangan Wilayah Sumatera (perubahan data pada Tabel 2.2, Halaman II.26). Seharusnya Tabel 2.11	Wilayah	2017	2018	2019	2020	Wilayah	2017	2018	2019	2020
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,3	4,5	4,6**	4,9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,3	4,5	4,6**	4,8
		Persentase Penduduk Miskin (%)	10,5	10,2	9,7	9,2	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,5	10,2	9,7	9,2
		Pengangguran Terbuka (%)	5,2	5,1	4,9	4,9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,2	5,1	4,9	4,9
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW I (y-o-y, BPS)						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					
2.3 Arah Pengembangan Wilayah											
2.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Jawa-Bali											
29.	Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali (perubahan data pada Tabel 2.3, Halaman II.28) Seharusnya Tabel 2.12	Wilayah				Wilayah					
		LPE (%)	2017*	2018*	2019	2020	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2017*	2018*	2019	2020
		Kemiskinan (%)	5,6	5,7	5,7**	5,8	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,6	5,7	5,6**	5,4
		TPT (%)	9,2	8,7	8,4	7,7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,2	8,7	8,4	7,7
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW I (y-o-y, BPS)					Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)						
2.3 Arah Pengembangan Wilayah											
2.3.4 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara											
30.	Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara (perubahan data pada Tabel 2.4, Halaman II.29) Seharusnya Tabel 2.13	Wilayah				Wilayah					
		LPE (%)	2017*	2018*	2019	2020	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2017*	2018*	2019	2020
		Kemiskinan (%)	2,1	-0,7	3,4**	3,7	Persentase Penduduk Miskin (%)	2,1	-0,7	4,4**	5,9
		TPT (%)	18,3	17,9	17,7	15,8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	18,3	17,9	17,7	15,8
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW I (y-o-y, BPS)					Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)						
2.3 Arah Pengembangan Wilayah											
2.3.5 Arah Pengembangan Wilayah Kalimantan											
31.	Target Pengembangan Wilayah Kalimantan (perubahan data pada Tabel 2.5, Halaman II.31) Seharusnya Tabel 2.14	Wilayah				Wilayah					
		LPE (%)	2017*	2018*	2019	2020	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2017*	2018*	2019	2020
		Kemiskinan (%)	4,3	3,9	5,3**	4,1	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,3	3,9	5,6**	6,4
		TPT (%)	6,2	4,1	5,7	5,4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,2	4,1	5,7	5,4
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW I (y-o-y, BPS)					Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					
2.3 Arah Pengembangan Wilayah											
2.3.6 Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi											
32.	Target Pengembangan Wilayah Sulawesi (perubahan data pada Tabel 2.6, Halaman II.33) Seharusnya Tabel 2.15	Wilayah	2017*	2018*	2019	2020	Wilayah	2017*	2018*	2019	2020
		LPE (%)	7,0	6,7	6,5**	7,0	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,0	6,7	6,5**	6,8
		Kemiskinan (%)	10,9	10,4	10,0	9,8	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,9	10,4	10,0	9,8
		TPT (%)	4,9	4,7	4,6	4,6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,9	4,7	4,6	4,6
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW I (y-o-y, BPS)						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)					
2.3 Arah Pengembangan Wilayah											
2.3.7 Arah Pengembangan Wilayah Maluku											
33.	Target Pengembangan Wilayah Maluku (perubahan data pada Tabel 2.7, Halaman II.34) Seharusnya Tabel 2.16	Wilayah	2017*	2018*	2019	2020	Wilayah	2017*	2018*	2019	2020
		LPE (%)	6,7	6,8	6,9**	6,7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	6,8	6,1**	6,1
		Kemiskinan (%)	13,4	13,3	13,0	12,5	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,4	13,3	13,0	12,5
		TPT (%)	7,6	6,2	5,9	5,7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,6	6,2	5,9	5,7
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW I (y-o-y, BPS)						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)					
2.3 Arah Pengembangan Wilayah											
2.3.8 Arah Pengembangan Wilayah Papua											
34.	Target Pengembangan Wilayah Papua (perubahan data pada Tabel 2.8, Halaman II.36) Seharusnya Tabel 2.17	Wilayah	2017*	2018*	2019	2020	Wilayah	2017*	2018*	2019	2020
		LPE (%)	4,5	7,0	-14,7**	6,0	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5	7,0	-13,1**	6,0
		Kemiskinan (%)	26,7	26,4	24,5	23,3	Persentase Penduduk Miskin (%)	26,7	26,4	24,5	23,3
		TPT (%)	4,2	3,8	3,7	3,2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2	3,8	3,7	3,2
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW I (y-o-y, BPS)						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																					
2.4 Pendanaan Pembangunan																								
2.4.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga																								
35.	Pagu Belanja Kementerian/Lembaga (Perubahan data dan narasi pada paragraf 2, Halaman II.37)	<p>Penyusunan Pagu Anggaran K/L untuk tahun 2020 mengacu pada pemenuhan prioritas sebagaimana dijabarkan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP Tahun 2020. Pada tahun 2020, telah dialokasikan melalui Belanja KL sebesar Rp. 337,3 Triliun untuk mendanai Prioritas Nasional RKP 2020.</p> <p style="text-align: center;">Tabel 2.10 Integrasi Pendanaan Alokasi Pada Prioritas Nasional Belanja KL Tahun 2020</p> <table border="1" data-bbox="561 830 1501 1125"> <thead> <tr> <th data-bbox="561 830 645 901">PN</th> <th data-bbox="645 830 1232 901">PRIORITAS NASIONAL</th> <th data-bbox="1232 830 1501 901">Belanja KL (Pagu Anggaran) Rp. Triliun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="561 901 645 935">01</td> <td data-bbox="645 901 1232 935">Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan</td> <td data-bbox="1232 901 1501 935">157,1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 935 645 968">02</td> <td data-bbox="645 935 1232 968">Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah</td> <td data-bbox="1232 935 1501 968">75,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 968 645 1017">03</td> <td data-bbox="645 968 1232 1017">Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja</td> <td data-bbox="1232 968 1501 1017">24,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1017 645 1050">04</td> <td data-bbox="645 1017 1232 1050">Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup</td> <td data-bbox="1232 1017 1501 1050">43,7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1050 645 1083">05</td> <td data-bbox="645 1050 1232 1083">Stabilitas Pertahanan dan Keamanan</td> <td data-bbox="1232 1050 1501 1083">36,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="561 1083 1232 1125">JUMLAH</td> <td data-bbox="1232 1083 1501 1125">337,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L Tahun 2020, diolah</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Pada Prioritas Nasional dirinci sampai dengan proyek di Kementerian/Lembaga. 2. Alokasi Pada Prioritas Nasional bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran akan dilakukan sampai dengan penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya. 3. Rincian Integrasi Pendanaan Alokasi Pada Prioritas Nasional Belanja KL TA 2020 menjadi bagian dari Suplemen RKP 2020. 	PN	PRIORITAS NASIONAL	Belanja KL (Pagu Anggaran) Rp. Triliun	01	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	157,1	02	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	75,5	03	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	24,4	04	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	43,7	05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	36,6	JUMLAH		337,3	<p>Pada APBN 2020, Pagu Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp.909,6 Triliun dengan Belanja Operasional Rp. 301,4 Triliun dan Belanja Non Operasional Rp. 608,2 Triliun. Pemanfaatan Belanja K/L utamanya diarahkan pada pemenuhan prioritas sebagaimana dijabarkan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP Tahun 2020.</p>
PN	PRIORITAS NASIONAL	Belanja KL (Pagu Anggaran) Rp. Triliun																						
01	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	157,1																						
02	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	75,5																						
03	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	24,4																						
04	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	43,7																						
05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	36,6																						
JUMLAH		337,3																						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
2.4 Pendanaan Pembangunan			
2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
36.	Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Halaman II.39)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan peran TKDD dalam mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat penyediaan infrastruktur publik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat kualitas SDM, mendorong daya saing di daerah melalui inovasi dan insentif yang mendukung iklim investasi, serta meningkatkan produktivitas dunia usaha yang berorientasi ekspor; 2. Memperkuat pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan; dan (b) penyempurnaan formula DAU dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di daerah; 3. Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi, antara lain melalui: (a) penguatan fokus pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan <i>stunting</i>), air minum, sanitasi, perlindungan sosial serta infrastruktur daerah dan pelayanan publik lainnya; (b) <i>refocusing</i> bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; serta (c) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Non Fisik berdasarkan kinerja pelaksanaan; 4. Meningkatkan dan memperkuat pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan dalam rangka Otsus (DTO), serta Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta, antara lain melalui: (a) penyederhanaan dan <i>refocusing</i> penentuan kategori/indikator penilaian DID yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah, untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari tujuan dan prioritas nasional; serta (b) peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Otsus, DTO, dan Dana Keistimewaan DIY; serta 5. Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melalui: (a) penyempurnaan formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata dan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan; dan (b) mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan; dan (b) penyempurnaan formula DAU dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan publik di daerah; dan (c) mendorong pengalokasian DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) sekurang – kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur. 2. Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan menjaga ketercapaian <i>output</i>, antara lain melalui: (a) penguatan fokus pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan <i>stunting</i>), air minum, sanitasi, perlindungan sosial serta infrastruktur daerah dan pelayanan publik lainnya; (b) <i>refocusing</i> bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; serta (c) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Non Fisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian <i>output</i>; (iv) peningkatan akurasi data sasaran dan biaya satuan DAK Nonfisik untuk meningkatkan kualitas pengalokasian; dan (v) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah dengan kriteria tertentu. 3. Meningkatkan dan memperkuat pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan dalam rangka Otsus (DTO), serta Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta, antara lain melalui: (a) DID diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari tujuan dan prioritas nasional, kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah, inovasi pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan <i>mandatory spending</i>; serta (b) peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Otsus, DTO, dan Dana Keistimewaan DIY; serta 4. Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melalui: (a) penyempurnaan formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata dan

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.	mendorong percepatan pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan; dan (b) mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.
2.4 Pendanaan Pembangunan			
2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
2.4.2.1 Dana Perimbangan			
37.	Arah Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) (Halaman II.40)	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan; b. memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kas daerah; c. menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar komitmen sesuai dengan rencana penerimaan pajak dan SDA yang dibagihasilkan dan potensi daerah penghasil; d. meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH; e. menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagihasilkan ke daerah; f. membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; g. menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; h. penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai untuk mendanai: (a) Peningkatan kualitas bahan baku; (b) Pembinaan industri; (c) Pembinaan lingkungan sosial; (d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas Bidang Kesehatan untuk mendukung Program JKN dalam Pembinaan Lingkungan Sosial sebesar minimal 50 persen; i. mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah provinsi tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai dengan kondisi keuangan negara; b. menggunakan pagu triwulan IV (berdasarkan prognosis penerimaan negara) untuk penyelesaian kurang bayar (KB) DBH tahun sebelumnya; c. menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; d. memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; e. memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik, melalui perbaikan mekanisme kepatuhan daerah; serta f. mempercepat penyelesaian KB DBH yang memperhitungkan lebih bayar DBH dalam roadmap tiga tahun (tahun pertama 2020) dengan memperhatikan kondisi keuangan negara

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<ul style="list-style-type: none"> j. meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA Dana Reboisasi yang masih ada di kas daerah sampai dengan tahun 2016 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan menyempurnakan peraturan pelaksanaannya; k. menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana <i>block grant</i> dengan menghilangkan <i>earmarked</i> 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan; l. mempertegas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9 persen yang merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (<i>block grant</i>); serta m. memperkuat sistem pengendalian, <i>monitoring</i>, dan evaluasi atas penggunaan DBH yang penggunaannya sudah ditentukan. 	
38.	Arah Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) (Halaman II. 41)	<ul style="list-style-type: none"> a. pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD mengingat sampai saat ini sebagian besar sumber pendapatan daerah masih bergantung dari alokasi DAU; b. penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik; c. pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana, konektivitas antardaerah, dan percepatan pembangunan antardaerah guna meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik di daerah; d. pengalokasian DAU untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah, perbaikan dan peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan kualitas SDM dan daya saing di daerah meliputi bantuan pendanaan untuk; i) penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa, ii) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan iii) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); serta e. penambahan peran DAU melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif berupa pendanaan kelurahan serta pendanaan kecamatan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD; b. penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik; c. memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU; d. pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antardaerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurangnya 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur, disertai pengetatan kepatuhan berupa pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DTU untuk infrastruktur tersebut; e. mendukung kebijakan bantuan pendanaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahan peran DAU berupa: (a) DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan; (b)

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap anggaran Dana Desa dan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan.	DAU Tambahan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan (c) DAU Tambahan bantuan pendanaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
39.	Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Halaman II.42)	Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK fisik mendorong percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan tematik sesuai dengan Prioritas Nasional. Untuk tahun 2020, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi.	<p>Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian output, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan publik antardaerah. Untuk tahun 2020, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi.</p> <p>Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2020 antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik; menerapkan konvergensi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa untuk kegiatan penanganan stunting, serta program Indonesia bersih dan sehat (air minum, sanitasi, dan kesehatan); memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik; meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); memperkuat kebijakan afirmasi utamanya infrastruktur konektivitas daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; serta <p>melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional.</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020		PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020			
		No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan	No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan
40.	Tabel 2.19 Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2020 DAK Afirmasi bidang Perumahan dan Permukiman (Halaman II.45)	5	Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh yang memiliki SK Kawasan Kumuh serta mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan Rakyat	(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak. (2) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah. (3) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak. (4) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak. (5) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak,	5	Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh yang termasuk dalam SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh dan/atau memiliki SK Kawasan Kumuh serta mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan Rakyat.	(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni bagi rumah tangga yang membangun rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal. (2) Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni bagi rumah tangga yang memperbaiki rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah. (3) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni bagi rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penanganan permukiman kumuh dan/ atau ilegal yang memperbaiki rumah secara swadaya di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal. (4) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni bagi rumah tangga terdampak bencana yang membangun rumah secara swadaya di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal. (5) Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni bagi rumah tangga terdampak bencana yang memperbaiki rumah secara swadaya untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020		PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020											
			<p>diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.</p> <p>(6) Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk permukiman kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara in situ maupun relokasi.</p>		<p>minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.</p> <p>(6) Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk permukiman kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi.</p>										
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019											
41.	<p>Tabel 2.19 Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2020</p> <p>DAK Afirmasi bidang Perumahan dan Permukiman (Halaman II.47)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="546 728 632 778">No.</th> <th data-bbox="632 728 909 778">Bidang DAK dan Arah Kebijakan</th> <th data-bbox="909 728 1514 778">Menu Kegiatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="546 778 632 1367">3</td> <td data-bbox="632 778 909 1367"> <p>Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman (berserta PSU) layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat.</p> </td> <td data-bbox="909 778 1514 1367"> <p>Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya</p> <p>(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak.</p> <p>(2) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak.</p> <p>(3) diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.</p> <p>(4) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).</p> <p>Subbidang Pembangunan Rumah Khusus Pembangunan rumah khusus, untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat</p> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan	3	<p>Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman (berserta PSU) layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat.</p>	<p>Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya</p> <p>(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak.</p> <p>(2) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak.</p> <p>(3) diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.</p> <p>(4) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).</p> <p>Subbidang Pembangunan Rumah Khusus Pembangunan rumah khusus, untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1514 728 1600 778">No.</th> <th data-bbox="1600 728 1877 778">Bidang DAK dan Arah Kebijakan</th> <th data-bbox="1877 728 2464 778">Menu Kegiatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1514 778 1600 1367">3</td> <td data-bbox="1600 778 1877 1367"> <p>Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta PSU layak dalam rangka pencegahan kumuh di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat.</p> </td> <td data-bbox="1877 778 2464 1367"> <p>Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya</p> <p>(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal.</p> <p>(2) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.</p> <p>(3) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).</p> <p>Subbidang Pembangunan Rumah Khusus Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau – pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan tipe 36.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan	3	<p>Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta PSU layak dalam rangka pencegahan kumuh di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat.</p>	<p>Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya</p> <p>(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal.</p> <p>(2) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.</p> <p>(3) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).</p> <p>Subbidang Pembangunan Rumah Khusus Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau – pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan tipe 36.</p>
No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan													
3	<p>Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman (berserta PSU) layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat.</p>	<p>Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya</p> <p>(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak.</p> <p>(2) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi layak.</p> <p>(3) diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.</p> <p>(4) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).</p> <p>Subbidang Pembangunan Rumah Khusus Pembangunan rumah khusus, untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat</p>													
No.	Bidang DAK dan Arah Kebijakan	Menu Kegiatan													
3	<p>Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman beserta PSU layak dalam rangka pencegahan kumuh di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat.</p>	<p>Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya</p> <p>(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal.</p> <p>(2) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.</p> <p>(3) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019).</p> <p>Subbidang Pembangunan Rumah Khusus Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau – pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan tipe 36.</p>													
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019											

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
42.	<p>Arah Kebijakan DAK Non Fisik (Halaman II.55)</p>	<p>Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan kepada daerah untuk mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah dan dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan, antara lain: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (8) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (11) Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); (12) Dana Pelayanan Kepariwisata; serta (13) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas, maka tahun 2020 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Nonfisik, antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan; penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan unit cost; pengalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja; penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja untuk seluruh jenis DAK Nonfisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SiLPA DAK Nonfisik di daerah; mendorong pemanfaatan DAK non fisik untuk peningkatan kualitas SDM, daya saing daerah dan penguatan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik; serta 	<p>Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas, antara lain: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (8) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (11) Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); (12) Dana Pelayanan Kepariwisata; serta (13) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.</p> <p>Arah kebijakan umum DAK Nonfisik tahun 2020 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya; mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui pengalokasian berbasis output; melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian output; menyempurnakan unit cost dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah; memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik; menambah menu kegiatan pengawasan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan; serta

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		f. mendorong pemanfaatan media teknologi informasi untuk peningkatan <i>output</i> layanan dan efisiensi biaya layanan.	g. memperkuat peran K/L teknis dalam melaksanakan monitoring evaluasi dan memantau capaian output pelaksanaan di daerah serta melihat dampaknya terhadap capaian outcome di daerah.
2.4 Pendanaan Pembangunan 2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2.4.2.2 Dana Insentif Daerah			
43.	Arah Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) (Halaman II.56)	<p>Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan perbaikan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan dan prioritas nasional, kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan pembiayaan kreatif, kualitas belanja daerah, inovasi dan keunggulan daerah, kualitas pelayanan masyarakat, kesejahteraan, kemudahan investasi dan kegiatan ekspor, kualitas pengelolaan lingkungan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan <i>mandatory spending</i> dan pelaporan; dan 2. Penyederhanaan dan penajaman formula pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. 	<p>Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperkuat peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD; 2. mendukung kebijakan dan prioritas nasional; 3. penyederhanaan dan refocusing kategori/indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah; 4. mendorong inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat; 5. mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor; 6. mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (<i>creative financing</i>); 7. mendorong peningkatan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah; 8. mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama untuk mendukung pengurangan sampah plastik.

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
2.4 Pendanaan Pembangunan			
2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
2.4.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta			
44.	Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan D.I.Yogyakarta (Halaman II.56)	<p>Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Otonomi Khusus (DTO) yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi.</p> <p>Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.</p> <p>Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh serta DTO Papua dan Papua Barat dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di daerah; 2. mendorong pemanfaatan Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan fokus dan prioritas untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; 3. meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; 4. meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan kementerian/lembaga terkait; 5. mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan; 6. memperkuat <i>monitoring</i> dan evaluasi yang dilakukan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga terkait secara berkelanjutan; 7. memperkuat peran APIP dalam penyusunan laporan penyaluran; serta 	<p>Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.</p> <p>Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.</p> <p>Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran; 2. mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan; 3. meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; 4. memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait; 5. meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait; 6. memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan 7. memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran. <p>Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>8. mempersiapkan <i>exit strategy</i> terhadap implementasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada tahun 2021.</p> <p>Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.</p> <p>Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan DIY adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY; 2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; serta <p>mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.</p>	<p>Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.</p> <p>Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan DIY adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY; 2. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi, serta <p>mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.</p>
<p>2.4 Pendanaan Pembangunan 2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2.4.2.4 Dana Desa</p>			
45.	Arah Kebijakan Dana Desa (Halaman II.57)	<p>Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (<i>on top</i>) secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan negara.</p> <p>Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah sebagai berikut.</p>	<p>Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (<i>on top</i>) secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan negara.</p> <p>Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah sebagai berikut.</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<ul style="list-style-type: none"> i. Dana Desa berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional pembangunan Desa, mempercepat pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa; ii. Mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui penyempurnaan kebijakan pengalokasian dana desa terutama penyesuaian bobot alokasi dasar dan alokasi formula, serta pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal; iii. Penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa juga akan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, serta fokus pada upaya: <ul style="list-style-type: none"> (1) pencapaian sasaran nasional pembangunan desa; (2) percepatan penanggulangan kemiskinan; (3) pengembangan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; (4) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik di desa, termasuk pada pusat pertumbuhan terpadu antar desa yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa; serta (5) afirmasi pada desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik desa. iv. Menyederhanakan regulasi administratif terkait Desa; v. Menyempurnakan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa sesuai daftar Kewenangan Desa untuk mendanai: <ul style="list-style-type: none"> (1) Bidang pembangunan desa yang lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita melalui skema swakelola dan padat karya tunai, juga termasuk penanganan bencana dan <i>moral hazard</i> di Desa serta pemenuhan sarana prasarana permukiman (air minum dan sanitasi) dan pelayanan dasar baik kesehatan dan Pendidikan; (2) Bidang pemberdayaan masyarakat desa yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa termasuk komunitas adat terpencil melalui perhutanan sosial, pengembangan potensi ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> 1. menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan; memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dan memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa; 2. meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa; 3. memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan; 4. meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping; 5. mengoptimalkan peran pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam pengelolaan Dana Desa; dan (vi) 6. meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>desa dan kawasan perdesaan yang dapat berupa kegiatan ekonomi kreatif desa, pemberdayaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama;</p> <p>(3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa; serta</p> <p>(4) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>vi. Dana desa dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan terutama pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa. Program/kegiatan yang dapat dibiayai adalah program/kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan;</p> <p>vii. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian <i>output</i>;</p> <p>viii. Meningkatkan upaya pemerintah dalam Perencanaan Partisipatif desa dan Swakelola desa melalui pendampingan, pelatihan dan pembinaan pada aparat dan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah;</p> <p>ix. Memperkuat supervisi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan serta pengawasan Dana Desa agar Desa menggunakan Dana Desanya sesuai prioritas penggunaan Dana Desa;</p> <p>x. Meningkatkan kesiapan kelembagaan pengelola Dana Desa, kapasitas perangkat desa, serta tenaga pendamping; serta</p> <p>xi. Meningkatkan upaya koordinasi dan sinergi lintas pusat dan daerah baik dari sisi regulasi maupun fasilitasi salah satunya dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi desa:</p> <p>a. Penggunaan Dana Desa perlu mempertahankan kearifan lokal, menumbuhkan gotong royong dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Desa serta mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan;</p> <p>b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola, padat karya tunai dengan mengikutsertakan masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki ibu hamil dan atau balita sebagai upaya mendukung pencegahan <i>stunting</i>;</p>	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>c. Penggunaan Dana Desa tetap mengacu pada Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah, Potensi Desa (SDM, SDA, Aset Desa), Kebutuhan dan Permasalahan Desa, Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik dan sesuai dengan Kewenangan Desa; serta</p> <p>Sinergi pembinaan dan pengawasan baik pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan fungsi pembinaan dengan dikoordinasikan oleh Bappeda.</p>	
<p>2.4 Pendanaan Pembangunan 2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA)</p>			
46.	Judul subbab (Halaman II.59)	2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA)	2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan Pembiayaan Kreatif)
47.	Paragraf 1 dan 2 (Halaman II.59)	<p>Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana investasi aspek pendanaan, untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD diperkirakan hanya dapat memenuhi kebutuhan pendanaan sekitar 86,1 persen dari kebutuhan total investasi. Sementara pendanaan sekitar 13,9 persen diperoleh dari tarif pengguna (<i>user fees</i>).</p> <p>Sementara itu, dari aspek pembiayaan target investasi infrastruktur tersebut dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD sebesar 52,5 persen. Sementara melalui pembiayaan oleh swasta baik dari swasta murni maupun mengkombinasikan anggaran pemerintah dan swasta melalui skema KPBU maupun dari sumber nonanggaran pemerintah melalui skema Pembiayaan Kreatif sebesar 42,6 persen dan melalui dana BUMN sebesar 4,9 persen.</p>	<p>Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana investasi untuk memenuhi kebutuhan investasi dan mencapai target stok infrastruktur hingga 50 persen. Dana yang dibutuhkan berkisar lebih dari 6400 Triliun Rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, dapat dipenuhi melalui anggaran APBN dan APBD serta pemerolehan dari tarif pengguna (<i>user fees</i>).</p> <p>Sementara itu, dari aspek pembiayaan target investasi infrastruktur tersebut dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah melalui APBN/D, BUMN/D dan Swasta. Sementara melalui pembiayaan oleh swasta baik dari swasta murni maupun mengkombinasikan anggaran pemerintah dan swasta melalui skema KPBU maupun dari sumber nonanggaran pemerintah melalui skema Pembiayaan Kreatif.</p>
<p>2.4 Pendanaan Pembangunan 2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA) 2.4.3.2 Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)</p>			

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
48.	Kerangka Kebijakan Pendanaan Infrastruktur (Halaman II.63)	<p>1. Kebijakan Tarif</p> <p>Dalam meningkatkan kapasitas pendanaan, pemerintah dapat meningkatkan tingkat tarif untuk menambah kapasitas penerimaan dalam menutup kesenjangan pendanaan untuk infrastruktur. Reformasi tarif dapat meningkatkan kemampuan dan minat sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan tingkat tarif akan memberi tambahan pendanaan yang tersedia untuk investasi infrastruktur melalui <i>user fees</i>.</p> <p>2. Kebijakan Anggaran Pemerintah</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas Fiskal</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal dilakukan melalui reformasi pajak oleh pemerintah pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kapasitas fiskal diharapkan dapat menutup kesenjangan pendanaan pemerintah.</p> <p>a. Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah</p> <p>Realokasi anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat menambah sumber pendanaan dan menutup kesenjangan dalam pendanaan investasi infrastruktur. Kebijakan realokasi anggaran belanja pemerintah di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Realokasi belanja subsidi pemerintah; ii. Realokasi belanja antar waktu KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam skema <i>availability payment</i>); serta iii. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 	<p>1. Kebijakan Tarif</p> <p>Dalam meningkatkan kapasitas pendanaan, pemerintah dapat meningkatkan tingkat tarif untuk menambah kapasitas penerimaan dalam menutup kesenjangan pendanaan untuk infrastruktur. Reformasi tarif dapat meningkatkan kemampuan dan minat sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan tingkat tarif akan memberi tambahan pendanaan yang tersedia untuk investasi infrastruktur melalui <i>user fees</i>.</p> <p>2. Kebijakan Anggaran Pemerintah</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas Fiskal</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal dilakukan melalui reformasi pajak oleh pemerintah pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kapasitas fiskal diharapkan dapat menutup kesenjangan pendanaan pemerintah.</p> <p>a. Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah</p> <p>Realokasi anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat menambah sumber pendanaan dan menutup kesenjangan dalam pendanaan investasi infrastruktur. Kebijakan realokasi anggaran belanja pemerintah di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Realokasi belanja subsidi pemerintah; ii. Realokasi belanja antar waktu KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam skema <i>availability payment</i>); serta iii. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). <p>3. Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah</p> <p>Optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah dapat dilakukan untuk menambah sumber pendanaan pemerintah. Aset-aset Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pendanaan dengan memanfaatkan skema yang tercantum pada dengan PP No. 27 tahun 2014.</p>
49.	Kata PINA di halaman II.59, II.61, II.62, II.63	PINA	Pembiayaan Kreatif

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																								
BAB 3. TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN																											
3.3 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2020																											
50.	Pendekatan baru dalam penyusunan RKP Tahun 2020 dan RKP-RKP selanjutnya (Perubahan pada Poin 1, pada halaman III.3)	1. Dalam lima tahun terakhir, PN dan Program Prioritas (PP) di dalam RKP selalu berubah baik jumlah maupun nomenklaturannya. Padahal, merujuk pada Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, maka PN dan PP RKP ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN, meski Kegiatan Prioritas (KP) dapat berubah seiring kebutuhan.	1. Dalam lima tahun terakhir, PN dan Program Prioritas (PP) di dalam RKP selalu berubah baik jumlah maupun nomenklaturannya. Padahal, merujuk pada Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, maka PN dan PP RKP ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN, meski Kegiatan Prioritas (KP) dapat berubah seiring kebutuhan. Ketetapan ini tidak berlaku pada RKP 2020 karena merupakan RKP transisi yang telah lebih dulu dibahas bersama dan disetujui oleh DPR-RI pada saat rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 tengah disusun.																								
3.4 Sasaran Pembangunan																											
51.	Tabel 3.1 Indikator Pembangunan Tahun 2020 (Perubahan pada Tingkat Pengangguran Terbuka, pada halaman III.4)	<table border="1" data-bbox="635 1108 1438 1362"> <thead> <tr> <th>Indikator Pembangunan</th> <th>Skenario 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan ekonomi (%)</td> <td>5,2 - 5,5</td> </tr> <tr> <td>Tingkat pengangguran terbuka (%)</td> <td>4,8 - 5,1</td> </tr> <tr> <td>Angka kemiskinan (%)</td> <td>8,5 - 9,0</td> </tr> <tr> <td>Rasio gini (indeks)</td> <td>0,375 - 0,380</td> </tr> <tr> <td>Indeks pembangunan manusia (IPM)</td> <td>72,51</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="635 1362 1438 1387">Sumber: Kementerian PPNBappenas (diolah), 2019</p>	Indikator Pembangunan	Skenario 2020	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 - 5,5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,1	Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,0	Rasio gini (indeks)	0,375 - 0,380	Indeks pembangunan manusia (IPM)	72,51	<table border="1" data-bbox="1575 1108 2404 1362"> <thead> <tr> <th>Indikator Pembangunan</th> <th>Skenario 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan ekonomi (%)</td> <td>5,2 - 5,5</td> </tr> <tr> <td>Tingkat pengangguran terbuka (%)</td> <td>4,8 - 5,0</td> </tr> <tr> <td>Angka kemiskinan (%)</td> <td>8,5 - 9,0</td> </tr> <tr> <td>Rasio gini (indeks)</td> <td>0,375 - 0,380</td> </tr> <tr> <td>Indeks pembangunan manusia (IPM)</td> <td>72,51</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1575 1362 2404 1387">Sumber: Kementerian PPNBappenas (diolah), 2019</p>	Indikator Pembangunan	Skenario 2020	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 - 5,5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,0	Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,0	Rasio gini (indeks)	0,375 - 0,380	Indeks pembangunan manusia (IPM)	72,51
Indikator Pembangunan	Skenario 2020																										
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 - 5,5																										
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,1																										
Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,0																										
Rasio gini (indeks)	0,375 - 0,380																										
Indeks pembangunan manusia (IPM)	72,51																										
Indikator Pembangunan	Skenario 2020																										
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 - 5,5																										
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,0																										
Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,0																										
Rasio gini (indeks)	0,375 - 0,380																										
Indeks pembangunan manusia (IPM)	72,51																										

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
BAB 4. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			
4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan			
4.1.1 Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan			
52.	Sasaran dan Indikator KP Kesejahteraan Sosial dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (Perubahan data pada Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator KP Kesejahteraan Sosial dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Poin 3.g, Halaman IV.6)	3.g. Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan sebanyak 2.500 kepala keluarga	3.g. Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan sebanyak 2.667 kepala keluarga
53.	Sasaran dan Indikator KP Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (Perubahan data pada Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator KP Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Poin 4.b, 4.d, 4.g, 4.h Halaman IV.6-1V.7)	4.b. Jumlah daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu sebanyak 180 kabupaten/kota 4.d. Jumlah pendamping yang memperoleh Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebanyak 15.000 pendamping 4.g. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan profesinya sebanyak 30.000 pendamping 4.h. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebanyak 3.000 lembaga	4.b. Jumlah daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu sebanyak 220 kabupaten/kota 4.d. Jumlah pendamping yang memperoleh Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebanyak 12.000 pendamping 4.g. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah dibina/dikembangkan profesinya sebanyak 27.695 orang 4.h. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebanyak 5.000 lembaga

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
54.	Kerangka Regulasi, PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, KP Kesejahteraan Sosial, Halaman IV.33	2. KP Kesejahteraan Sosial: penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan serta peraturan perundangan lainnya baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang merupakan aturan turunan/pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	2. KP Kesejahteraan Sosial: penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas serta peraturan perundangan lainnya baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang merupakan aturan turunan/pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
55.	Perubahan target mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi dan K/L Pelaksana pada Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator KP dari PP (Halaman IV.5)	2.g. Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyak 536.763 orang. K/L Pelaksana: Kemenristekdikti; Kemenag	2.g. Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyak 365.380 orang. K/L Pelaksana: Kemendikbud; Kemenag

4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

4.1.2 Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

56.	Tabel 4.4 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan a. Capaian indikator tahun 2017-2018 dan Target 2020 b. Sumber data (Halaman IV.9 – IV.10)	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{b)}	2020 ^{b)}	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{b)}	2020 ^{b)}
		1.	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat								1.	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat			
			Prevalensi <i>stunting</i> / pendek dan sangat pendek pada balita	Persen	N/A ^{d)}	30,8 ^{u)}	24,8 ^{d)}	27,10		Prevalensi <i>stunting</i> / pendek dan sangat pendek pada balita	Persen	N/A ^{d)}	30,8 ^{u)}	N/A ^{d)}	27,10
			Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR)	Per wanita usia subur (15-49 tahun)	2,28	2,13	2,11	2,10		Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR)	Per wanita usia subur (15-49 tahun)	2,40 ^{g)}	2,38 ^{g)}	2,28	2,26
			Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> /mCPR)	Persen	57,20 ^{g)}	N/A ^{d)}	61,36	61,78		Prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> /mCPR)	Persen	57,20 ^{g)}	57 ^{g)}	61,36	61,78

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
			Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	10,60 ⁹⁾	N/A ⁴⁾	9,00	8,60		Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	10,60 ⁹⁾	12,40 ⁷⁾	9,00	8,60
		2.	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular						2.	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular					
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen	N/A ⁴⁾	9,1 ¹⁾	N/A ⁴⁾	9,1		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen	N/A ⁴⁾	9,1 ¹⁾	N/A ⁴⁾	9,10
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kabupaten/ Kota	272	285	300	315		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kabupaten/ Kota	272 ²⁾	285 ²⁾	300 ²⁾	325
		3.	Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas						3.	Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas					
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Persen	26 ⁴⁾	44 ²⁾	53 ⁴⁾	60		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Persen	26 ⁴⁾	40 ²⁾	53 ⁴⁾	65
			Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	53 ⁴⁾	60 ²⁾	70 ⁴⁾	75		Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	53 ⁴⁾	63 ²⁾	70 ⁴⁾	80
			Persentase obat yang memenuhi syarat	Persen	N/A ⁴⁾	80,9 ⁵⁾	94 ⁴⁾	82,8		Persentase obat yang memenuhi syarat	Persen	N/A ⁴⁾	80,9 ⁵⁾	94 ⁴⁾	80,8
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	Persen	N/A ⁴⁾	71 ⁵⁾	90,1 ⁴⁾	74		Persentase makanan yang memenuhi syarat	Persen	N/A ⁴⁾	71 ⁵⁾	90,1 ⁴⁾	76
		Sumber: 1) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 2) Laporan Kementerian Kesehatan, 2018; 3) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis - Kemenkes, 2017; 4) Riset Tenaga Kesehatan, 2017; 5) Laporan Badan POM, 2018; 6) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017. Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Sumber: 1) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 2) Laporan Kementerian Kesehatan, 2018; 3) Global TB Report, 2017; 4) Riset Tenaga Kesehatan, 2017; 5) Laporan Badan POM (dengan metode lama), 2018; 6) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017; 7) Survei Kinerja Akuntabilitas Program BKKBN (2018-2019). Keterangan: *) Realisasi; **) Target							
57.	Gambar 4.6 Kerangka PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (Halaman IV.11)	KP 4: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)						KP 4: Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																																											
58.	Keterangan Kerangka (Halaman IV.11)	PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.6, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.	PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.6, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.																																																																																											
59.	Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan a. Indikator, target, satuan, dan lokasi b. Sumber datae (Halaman IV.11 – IV.13)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi</td> <td>Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase kunjungan neonatal</td> <td>86</td> <td>Persen</td> <td>34 Provinsi</td> <td>Kemenkes</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Peningkatan Pengendalian Penyakit</td> <td>Meningkatnya pengendalian penyakit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC <i>treatment coverage</i>)</td> <td>80</td> <td>Persen</td> <td>34 Provinsi</td> <td>Kemenkes</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko PTM minimal 80%</td> <td>52</td> <td>Kabupaten/ Kota</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pekerja yang mendapat-kan pening-katan</td> <td>3.000</td> <td>Pekerja</td> <td>Pusat</td> <td>Kemenaker</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	1.	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi							Persentase kunjungan neonatal	86	Persen	34 Provinsi	Kemenkes	3.	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya pengendalian penyakit							Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC <i>treatment coverage</i>)	80	Persen	34 Provinsi	Kemenkes			Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko PTM minimal 80%	52	Kabupaten/ Kota	N/A				Pekerja yang mendapat-kan pening-katan	3.000	Pekerja	Pusat	Kemenaker	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi</td> <td>Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Cakupan kunjungan neonatal</td> <td>86</td> <td>Persen</td> <td>34 Provinsi</td> <td>Kemenkes</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Peningkatan Pengendalian Penyakit</td> <td>Meningkatnya pengendalian penyakit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC <i>Success Rate</i>)</td> <td>90</td> <td>Persen</td> <td>34 Provinsi</td> <td>Kemenkes</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)</td> <td>52</td> <td>Kabupaten/ Kota</td> <td>52 Kabupaten/ Kota</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	1.	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi							Cakupan kunjungan neonatal	86	Persen	34 Provinsi	Kemenkes	3.	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya pengendalian penyakit							Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC <i>Success Rate</i>)	90	Persen	34 Provinsi	Kemenkes			Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	52	Kabupaten/ Kota	52 Kabupaten/ Kota	
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																																																								
1.	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi																																																																																												
		Persentase kunjungan neonatal	86	Persen	34 Provinsi	Kemenkes																																																																																								
3.	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya pengendalian penyakit																																																																																												
		Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC <i>treatment coverage</i>)	80	Persen	34 Provinsi	Kemenkes																																																																																								
		Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko PTM minimal 80%	52	Kabupaten/ Kota	N/A																																																																																									
		Pekerja yang mendapat-kan pening-katan	3.000	Pekerja	Pusat	Kemenaker																																																																																								
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																																																								
1.	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi																																																																																												
		Cakupan kunjungan neonatal	86	Persen	34 Provinsi	Kemenkes																																																																																								
3.	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya pengendalian penyakit																																																																																												
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC <i>Success Rate</i>)	90	Persen	34 Provinsi	Kemenkes																																																																																								
		Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	52	Kabupaten/ Kota	52 Kabupaten/ Kota																																																																																									

PERIHAL		RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				
NO	PERIHAL	pelayanan kualitas kesehatan di tempat kerja	23	Persen	Kemenkes	Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	40	Persen	Pusat	Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)
4.	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Menguatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka mencegah penyakit tidak menular				Menguatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				
		Persentase kabupaten/kota a sehat	20	Persen	34 Provinsi	Jumlah kabupaten/kota a sehat	110	Kabupaten/ Kota	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> •Kemenkes •Kemendikbud •Kemendagri •K/L terkait lainnya
5.	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan				Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan				
		Jumlah tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu	4.386	Orang	27 Provinsi	Persentase RS kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	70	Persen	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> •Kemenkes
						Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85	Persen	34 Provinsi	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86,6	Persen	34 Provinsi			Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	25	Kabupaten/Kota	25 Kabupaten/Kota	
		Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	85	Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	Persen	34 Provinsi	BPOM
		Persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dan memenuhi syarat	75	Persen	34 Provinsi	BPOM		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar	82	Persen	34 Provinsi	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar dan memenuhi syarat	78	Persen	34 Provinsi							
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019					Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan															
4.1.3 Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Investasi															
60.	Perubahan indikator dan target pada Sasaran PP "1. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan" Tabel 4.6 Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi (Halaman IV.15)	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017¹⁾	2018¹⁾	2019¹⁾	2020¹⁾	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017¹⁾	2018¹⁾	2019¹⁾	2020¹⁾
		1.	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan						1.	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan					
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,45	8,57	8,70	8,82		Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	8,45	8,52	8,63	8,74
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	13,03	13,20	13,04		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,92	13,08	13,24
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ***)	Persen	34,36	40,70	42,77	44,84		Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD)	Persen	74,8	74,50	75,05	75,60
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Persen	108,50	107,37	107,34	107,12		Tingkat Penyelesaian SD/MI/ sederajat	Persen	92,42	91,80	91,80	93,66
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Persen	90,23	91,37	92,05	92,73		Tingkat Penyelesaian SMP/MTs/ sederajat	Persen	81,41	81,70	81,70	85,65
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Persen	79,12	79,99	80,78	81,52		Tingkat Penyelesaian SMA/SMK/MA/ sederajat	Persen	57,42	61,52	61,52	67,82
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	Persen	29,93	31,61	33,39	35,26		Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	Persen	29,93	30,19	31,75	33,39
			Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas	persen	95,50	95,95	96,40	96,85							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																																																										
61.	Perubahan indikator dan target pada Sasaran “2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan” Tabel 4.6 Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi (Halaman IV.15)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="550 526 642 570">2.</td> <td colspan="5" data-bbox="642 526 1502 570">Meningkatnya Kualitas Pendidikan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 570 642 630"></td> <td data-bbox="642 570 1049 630">Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal B</td> <td data-bbox="1049 570 1148 630">Persen</td> <td data-bbox="1148 570 1236 630">10,1</td> <td data-bbox="1236 570 1323 630">13,6</td> <td data-bbox="1323 570 1410 630">17,2</td> <td data-bbox="1410 570 1502 630">21,6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 630 642 690"></td> <td data-bbox="642 630 1049 690">Persentase SD/MI/Sederajat yang berakreditasi minimal B</td> <td data-bbox="1049 630 1148 690">Persen</td> <td data-bbox="1148 630 1236 690">76,8</td> <td data-bbox="1236 630 1323 690">78,7</td> <td data-bbox="1323 630 1410 690">80,6</td> <td data-bbox="1410 630 1502 690">84,4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 690 642 750"></td> <td data-bbox="642 690 1049 750">Persentase SMP/MTs/Sederajat yang berakreditasi minimal B</td> <td data-bbox="1049 690 1148 750">Persen</td> <td data-bbox="1148 690 1236 750">70,1</td> <td data-bbox="1236 690 1323 750">72,9</td> <td data-bbox="1323 690 1410 750">75,7</td> <td data-bbox="1410 690 1502 750">81,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 750 642 810"></td> <td data-bbox="642 750 1049 810">Persentase SMA/SMK/MA/ Sederajat yang berakreditasi minimal B</td> <td data-bbox="1049 750 1148 810">Persen</td> <td data-bbox="1148 750 1236 810">71,0</td> <td data-bbox="1236 750 1323 810">73,4</td> <td data-bbox="1323 750 1410 810">75,9</td> <td data-bbox="1410 750 1502 810">80,86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 810 642 870"></td> <td data-bbox="642 810 1049 870">Persentase prodi PT yang berakreditasi minimal B ***)</td> <td data-bbox="1049 810 1148 870">Persen</td> <td data-bbox="1148 810 1236 870">51,1</td> <td data-bbox="1236 810 1323 870">53,9</td> <td data-bbox="1323 810 1410 870">58,9</td> <td data-bbox="1410 810 1502 870">63,9</td> </tr> </table> <p data-bbox="550 878 1502 938">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>						2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan						Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal B	Persen	10,1	13,6	17,2	21,6		Persentase SD/MI/Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	76,8	78,7	80,6	84,4		Persentase SMP/MTs/Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	70,1	72,9	75,7	81,3		Persentase SMA/SMK/MA/ Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	71,0	73,4	75,9	80,86		Persentase prodi PT yang berakreditasi minimal B ***)	Persen	51,1	53,9	58,9	63,9	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1502 526 1594 570">2.</td> <td colspan="5" data-bbox="1594 526 2437 570">Meningkatnya Kualitas Pendidikan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 570 1594 613"></td> <td colspan="5" data-bbox="1594 570 2437 613">Nilai rata-rata hasil PISA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 613 1594 657"></td> <td data-bbox="1594 613 1864 657">a. Matematika</td> <td data-bbox="1864 613 1951 657">nilai</td> <td data-bbox="1951 613 2038 657">n/a</td> <td data-bbox="2038 613 2125 657">n/a</td> <td data-bbox="2125 613 2212 657">388,7</td> <td data-bbox="2212 613 2437 657">n/a</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 657 1594 701"></td> <td data-bbox="1594 657 1864 701">b. Membaca</td> <td data-bbox="1864 657 1951 701">nilai</td> <td data-bbox="1951 657 2038 701">n/a</td> <td data-bbox="2038 657 2125 701">n/a</td> <td data-bbox="2125 657 2212 701">398,5</td> <td data-bbox="2212 657 2437 701">n/a</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 701 1594 745"></td> <td data-bbox="1594 701 1864 745">c. Sains</td> <td data-bbox="1864 701 1951 745">nilai</td> <td data-bbox="1951 701 2038 745">n/a</td> <td data-bbox="2038 701 2125 745">n/a</td> <td data-bbox="2125 701 2212 745">403,3</td> <td data-bbox="2212 701 2437 745">n/a</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 745 1594 789"></td> <td colspan="5" data-bbox="1594 745 2437 789">Proporsi anak di atas standar kompetensi minimum dalam test PISA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 789 1594 833"></td> <td data-bbox="1594 789 1864 833">a. Matematika</td> <td data-bbox="1864 789 1951 833">persen</td> <td data-bbox="1951 789 2038 833">n/a</td> <td data-bbox="2038 789 2125 833">n/a</td> <td data-bbox="2125 789 2212 833">35,33</td> <td data-bbox="2212 789 2437 833">n/a</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 833 1594 876"></td> <td data-bbox="1594 833 1864 876">b. Membaca</td> <td data-bbox="1864 833 1951 876">persen</td> <td data-bbox="1951 833 2038 876">n/a</td> <td data-bbox="2038 833 2125 876">n/a</td> <td data-bbox="2125 833 2212 876">47,4</td> <td data-bbox="2212 833 2437 876">n/a</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 876 1594 920"></td> <td data-bbox="1594 876 1864 920">c. Sains</td> <td data-bbox="1864 876 1951 920">persen</td> <td data-bbox="1951 876 2038 920">n/a</td> <td data-bbox="2038 876 2125 920">n/a</td> <td data-bbox="2125 876 2212 920">47,00</td> <td data-bbox="2212 876 2437 920">n/a</td> </tr> </table> <p data-bbox="1502 930 2437 974">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>						2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan						Nilai rata-rata hasil PISA						a. Matematika	nilai	n/a	n/a	388,7	n/a		b. Membaca	nilai	n/a	n/a	398,5	n/a		c. Sains	nilai	n/a	n/a	403,3	n/a		Proporsi anak di atas standar kompetensi minimum dalam test PISA						a. Matematika	persen	n/a	n/a	35,33	n/a		b. Membaca	persen	n/a	n/a	47,4	n/a		c. Sains	persen	n/a	n/a	47,00	n/a
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan																																																																																																																	
	Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal B	Persen	10,1	13,6	17,2	21,6																																																																																																												
	Persentase SD/MI/Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	76,8	78,7	80,6	84,4																																																																																																												
	Persentase SMP/MTs/Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	70,1	72,9	75,7	81,3																																																																																																												
	Persentase SMA/SMK/MA/ Sederajat yang berakreditasi minimal B	Persen	71,0	73,4	75,9	80,86																																																																																																												
	Persentase prodi PT yang berakreditasi minimal B ***)	Persen	51,1	53,9	58,9	63,9																																																																																																												
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan																																																																																																																	
	Nilai rata-rata hasil PISA																																																																																																																	
	a. Matematika	nilai	n/a	n/a	388,7	n/a																																																																																																												
	b. Membaca	nilai	n/a	n/a	398,5	n/a																																																																																																												
	c. Sains	nilai	n/a	n/a	403,3	n/a																																																																																																												
	Proporsi anak di atas standar kompetensi minimum dalam test PISA																																																																																																																	
	a. Matematika	persen	n/a	n/a	35,33	n/a																																																																																																												
	b. Membaca	persen	n/a	n/a	47,4	n/a																																																																																																												
	c. Sains	persen	n/a	n/a	47,00	n/a																																																																																																												
62.	Perubahan target sertifikasi dosen Tabel 4.7 Sasaran dan Indikator KP (Halaman IV.18)	3.e. Jumlah dosen yang lulus sertifikasi sebanyak 10.000 Orang						3.e. Jumlah dosen yang lulus sertifikasi sebanyak 8.000 Orang																																																																																																										
63.	Perubahan target PRN Tabel 4.7 Sasaran dan Indikator KP (Halaman IV.19)	7.a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional sebanyak 7 Produk Inovasi						7.a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional sebanyak 1 Produk Inovasi																																																																																																										
64.	Perubahan K/L pelaksana akibat perubahan nomenklatur K/L pada Tabel 4.7, KP2, KP3, KP4, dan KP5. (Halaman IV.17 – IV.19)	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="550 1175 642 1219">No.</th> <th data-bbox="642 1175 1141 1219">KP / Indikator</th> <th data-bbox="1141 1175 1502 1219">K/L Pelaksana</th> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1219 642 1263">2</td> <td data-bbox="642 1219 1141 1263">Afiriasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun</td> <td data-bbox="1141 1219 1502 1263"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemen PUPR • PLN </td> </tr> </table>						No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana	2	Afiriasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemen PUPR • PLN 	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1502 1175 1594 1219">No.</th> <th data-bbox="1594 1175 2063 1219">KP / Indikator</th> <th data-bbox="2063 1175 2437 1219">K/L Pelaksana</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1502 1219 1594 1263">2</td> <td data-bbox="1594 1219 2063 1263">Afiriasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun</td> <td data-bbox="2063 1219 2437 1263"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemen PUPR • PLN </td> </tr> </table>						No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana	2	Afiriasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemen PUPR • PLN 																																																																																									
No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana																																																																																																																
2	Afiriasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemen PUPR • PLN 																																																																																																																
No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana																																																																																																																
2	Afiriasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemen PUPR • PLN 																																																																																																																

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020		PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	
			<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri • Pemda • Kemenristekdikti 		<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri • Pemda
3	Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemenristekdikti • Kemen PANRB • Kemendagri • Pemda 	3	Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Penjaminan Mutu Pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemen PANRB • Kemendagri • Kemenristekdikti • Pemda 	4	Penjaminan Mutu Pendidikan
5	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas		<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemen PANRB • Kemendagri • Kemenristekdikti • Pemda 	5	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas
	Indikator: a. Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja b. Persentase lulusan perguruan tinggi bersertifikasi kompetensi dan profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • Kemenag • Kemenkominfo • Kementan • Kemenperin • BATAN • Kemendag • Kemenkes • Kemenhub 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemenkominfo • Kementan • Kemenperin • BATAN • Kemendag • Kemenkes • Kemenhub 		Indikator: a. Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja b. Persentase lulusan perguruan tinggi bersertifikasi kompetensi dan profesi
	a. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • Kemenag 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 		a. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020		PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																											
		b. Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	• Kemenristekdikti	b. Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	• Kemendikbud																																										
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target																																											
65.	Perubahan K/L pelaksana akibat perubahan nomenklatur K/L pada Tabel 4.7, KP7 (Halaman IV.17 – IV.19)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="550 646 618 683">No.</th> <th data-bbox="618 646 1141 683">KP / Indikator</th> <th data-bbox="1141 646 1497 683">K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="550 683 618 721">7</td> <td data-bbox="618 683 1141 721">Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi</td> <td data-bbox="1141 683 1497 721"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 721 618 911">a.</td> <td data-bbox="618 721 1141 911">Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional</td> <td data-bbox="1141 721 1497 911"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN </td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 911 618 1127">b.</td> <td data-bbox="618 911 1141 1127">Jumlah aplikasi pendaftaran paten (resident)</td> <td data-bbox="1141 911 1497 1127"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN • Kemenkumham </td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1127 618 1224">c.</td> <td data-bbox="618 1127 1141 1224">Persentase SDM Iptek berkualifikasi S3</td> <td data-bbox="1141 1127 1497 1224"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT </td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1224 618 1321">d.</td> <td data-bbox="618 1224 1141 1321">Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi</td> <td data-bbox="1141 1224 1497 1321"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT </td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1321 618 1365">e.</td> <td data-bbox="618 1321 1141 1365">Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina</td> <td data-bbox="1141 1321 1497 1365"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti </td> </tr> </tbody> </table>		No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana	7	Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi		a.	Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN 	b.	Jumlah aplikasi pendaftaran paten (resident)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN • Kemenkumham 	c.	Persentase SDM Iptek berkualifikasi S3	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT 	d.	Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT 	e.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1505 646 1572 683">No.</th> <th data-bbox="1572 646 2045 683">KP / Indikator</th> <th data-bbox="2045 646 2429 683">K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1505 683 1572 721">7</td> <td data-bbox="1572 683 2045 721">Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi</td> <td data-bbox="2045 683 2429 721"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1505 721 1572 911">a.</td> <td data-bbox="1572 721 2045 911">Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional</td> <td data-bbox="2045 721 2429 911"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1505 911 1572 1127">b.</td> <td data-bbox="1572 911 2045 1127">Jumlah aplikasi pendaftaran paten (resident)</td> <td data-bbox="2045 911 2429 1127"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN • Kemenkumham </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1505 1127 1572 1224">c.</td> <td data-bbox="1572 1127 2045 1224">Persentase SDM Iptek berkualifikasi S3</td> <td data-bbox="2045 1127 2429 1224"> <ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1505 1224 1572 1321">d.</td> <td data-bbox="1572 1224 2045 1321">Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi</td> <td data-bbox="2045 1224 2429 1321"> <ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1505 1321 1572 1365">e.</td> <td data-bbox="1572 1321 2045 1365">Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina</td> <td data-bbox="2045 1321 2429 1365"> <ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN </td> </tr> </tbody> </table>		No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana	7	Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi		a.	Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN 	b.	Jumlah aplikasi pendaftaran paten (resident)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN • Kemenkumham 	c.	Persentase SDM Iptek berkualifikasi S3	<ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT 	d.	Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT 	e.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN
No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana																																													
7	Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi																																														
a.	Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN 																																													
b.	Jumlah aplikasi pendaftaran paten (resident)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN • Kemenkumham 																																													
c.	Persentase SDM Iptek berkualifikasi S3	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT 																																													
d.	Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT 																																													
e.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti 																																													
No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana																																													
7	Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi																																														
a.	Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN 																																													
b.	Jumlah aplikasi pendaftaran paten (resident)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN • Kemenkumham 																																													
c.	Persentase SDM Iptek berkualifikasi S3	<ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT 																																													
d.	Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN • LIPI • BPPT 																																													
e.	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> •Kemenristek/BRIN 																																													
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target																																											

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 4.1.4 Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan			
66.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan (Perubahan data pada Tabel 4.9 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan, Poin 1.b Halaman IV.22)	1.b Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha sebanyak 101.800 kepala keluarga	1.b Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha sebanyak 135.000 kepala keluarga
67.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan (Perubahan data pada Tabel 4.9 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan, Poin 1.b Halaman IV.22)	3.a Jumlah pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 2,1 juta orang 4.b Jumlah bidang tanah yang didistribusi sebanyak 600.000 bidang 4.f Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan sebanyak 1.000 kelompok 4.g Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan/ Kelompok Masyarakat sebanyak 200 orang 4.h Luas kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan seluas 5.000.000 hektare 4.i. Luasan Tanah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL seluas 15.000 hektare di 10 provinsi 4.j. Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi sebanyak 26.000 bidang di 30 kabupaten	3.a Jumlah pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 1,6 juta orang 4.b Jumlah bidang tanah yang didistribusi sebanyak 602.135 bidang 4.f Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan sebanyak 2.577 kelompok 4.g Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan/ Kelompok Masyarakat sebanyak 500 orang 4.h Luas kawasan hutan yang direncanakan dan ditetapkan seluas 4.000.000 hektare 4.i. Luasan Tanah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL seluas 15.000 hektare di 5 provinsi 4.j. Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi sebanyak 26.000 bidang di 26 provinsi

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																		
4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 4.1.5 Program Prioritas Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa																					
68.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa (Perubahan data pada Tabel 4.11 Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa 4.11 Poin 6.b)	6.b Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebanyak 10.070.635 Keluarga	6.b Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebanyak 5.832.363 Keluarga																		
69.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa (Perubahan data pada Tabel 4.10 Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa 4.10 Poin 2.a Tahun 2018,2019,2020)	2.a Indeks Komposit Kesejahteraan Anak sebanyak (2018 ; 67.9) , (2019 ; Meningkatkan), (2020 ; Meningkatkan)	2.a Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (2018 ; 70.36) , (2019 ; 72.53), (2020 ; 74.31)																		
70.	Penghapusan Kemenristekdikti sebagai K/L pelaksana akibat perubahan nomenklatur K/L pada Tabel 4.11, KP4, KP5 dan KP7. (Halaman IV.29-IV.32)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="550 1175 642 1214">No.</th> <th data-bbox="642 1175 1223 1214">KP / Indikator</th> <th data-bbox="1223 1175 1505 1214">K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="550 1214 642 1382">4</td> <td data-bbox="642 1214 1223 1382"> Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar </td> <td data-bbox="1223 1214 1505 1382"> <ul style="list-style-type: none"> • Perpusnas • Kemendikbud • Kemenag • Kemristekdikti </td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1382 642 1438">5</td> <td data-bbox="642 1382 1223 1438"> Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan dan Pemuda </td> <td data-bbox="1223 1382 1505 1438"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana	4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • Perpusnas • Kemendikbud • Kemenag • Kemristekdikti 	5	Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan dan Pemuda		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1505 1175 1589 1214">No.</th> <th data-bbox="1589 1175 2150 1214">KP / Indikator</th> <th data-bbox="2150 1175 2434 1214">K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1505 1214 1589 1360">4</td> <td data-bbox="1589 1214 2150 1360"> Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar </td> <td data-bbox="2150 1214 2434 1360"> <ul style="list-style-type: none"> • Perpusnas • Kemendikbud • Kemenag </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1505 1360 1589 1438">5</td> <td data-bbox="1589 1360 2150 1438"> Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan dan Pemuda </td> <td data-bbox="2150 1360 2434 1438"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana	4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • Perpusnas • Kemendikbud • Kemenag 	5	Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan dan Pemuda	
No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana																			
4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • Perpusnas • Kemendikbud • Kemenag • Kemristekdikti 																			
5	Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan dan Pemuda																				
No.	KP / Indikator	K/L Pelaksana																			
4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> • Perpusnas • Kemendikbud • Kemenag 																			
5	Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan dan Pemuda																				

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020		PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpora • Kemendikbud • Kemenristekdikti 	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpora • Kemendikbud
		7	Peningkatan Prestasi Olahraga	7	Peningkatan Prestasi Olahraga
		Jumlah event olahraga nasional [Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020]	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko PMK • Kemendagri • Kemenkeu • Kemenpora • Kemen PPN/ Bappenas • Kementerian PUPR • Kemen ATR/BPN • Kemenhub • Kemendikbud • Kemenkes • Kemenristekdikti • Kemenperin • Kemendag • Kemenpar • Kemenkominfo • Kemen BUMN • TNI • Polri • BPKP • Basarnas • LKPP 	Jumlah event olahraga nasional [Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020]	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko PMK • Kemendagri • Kemenkeu • Kemenpora • Kemen PPN/ Bappenas • Kementerian PUPR • Kemen ATR/BPN • Kemenhub • Kemendikbud • Kemenkes • Kemenperin • Kemendag • Kemenpar • Kemenkominfo • Kemen BUMN • TNI • Polri • BPKP • Basarnas • LKPP
		Jumlah olahragawan andalan yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpora • Kemendikbud • Kemenristekdikti • Kemensos 	Jumlah olahragawan andalan yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpora • Kemendikbud • Kemensos
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																			
71.	Perubahan nomenklatur, target, dan/atau satuan indikator Kegiatan Prioritas pada Tabel 4.11	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 634 640 667">No.</th> <th data-bbox="640 634 967 667">Sasaran / Indikator</th> <th data-bbox="967 634 1179 667">Target</th> <th data-bbox="1179 634 1506 667">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 667 640 732">1</td> <td data-bbox="640 667 967 732">Jumlah pembentukan kader bela negara</td> <td data-bbox="967 667 1179 732">4.000.000</td> <td data-bbox="1179 667 1506 732">orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="564 732 640 797"></td> <td data-bbox="640 732 967 797">Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi</td> <td data-bbox="967 732 1179 797">347</td> <td data-bbox="1179 732 1506 797">Nilai budaya/ tradisi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="564 797 640 862">2</td> <td data-bbox="640 797 967 862">Jumlah revitalisasi program museum dan taman budaya</td> <td data-bbox="967 797 1179 862">144</td> <td data-bbox="1179 797 1506 862">Museum/ Taman Budaya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="564 862 640 927"></td> <td data-bbox="640 862 967 927">Jumlah Lingkungan Budaya Desa Adat yang direvitalisasi</td> <td data-bbox="967 862 1179 927">33</td> <td data-bbox="1179 862 1506 927">Desa Adat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="564 927 640 992">4</td> <td data-bbox="640 927 967 992">Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar</td> <td data-bbox="967 927 1179 992">20</td> <td data-bbox="1179 927 1506 992">Persen</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="554 992 1040 1016">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>				No.	Sasaran / Indikator	Target	Satuan	1	Jumlah pembentukan kader bela negara	4.000.000	orang		Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	347	Nilai budaya/ tradisi	2	Jumlah revitalisasi program museum dan taman budaya	144	Museum/ Taman Budaya		Jumlah Lingkungan Budaya Desa Adat yang direvitalisasi	33	Desa Adat	4	Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	20	Persen	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1527 634 1602 667">No.</th> <th data-bbox="1602 634 1930 667">Sasaran / Indikator</th> <th data-bbox="1930 634 2142 667">Target</th> <th data-bbox="2142 634 2446 667">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1527 667 1602 732">1</td> <td data-bbox="1602 667 1930 732">Jumlah pembentukan kader bela negara</td> <td data-bbox="1930 667 2142 732">400.000</td> <td data-bbox="2142 667 2446 732">orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1527 732 1602 797"></td> <td data-bbox="1602 732 1930 797">Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi</td> <td data-bbox="1930 732 2142 797">1.971</td> <td data-bbox="2142 732 2446 797">Nilai budaya/ tradisi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1527 797 1602 862">2</td> <td data-bbox="1602 797 1930 862">Jumlah museum yang direvitalisasi</td> <td data-bbox="1930 797 2142 862">5</td> <td data-bbox="2142 797 2446 862">Museum</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1527 862 1602 927"></td> <td data-bbox="1602 862 1930 927">Jumlah Komunitas Adat yang difasilitasi</td> <td data-bbox="1930 862 2142 927">33</td> <td data-bbox="2142 862 2446 927">Komunitas Adat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1527 927 1602 992">4</td> <td data-bbox="1602 927 1930 992">Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar</td> <td data-bbox="1930 927 2142 992">19,48</td> <td data-bbox="2142 927 2446 992">Persen</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1517 992 2028 1016">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>				No.	Sasaran / Indikator	Target	Satuan	1	Jumlah pembentukan kader bela negara	400.000	orang		Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	1.971	Nilai budaya/ tradisi	2	Jumlah museum yang direvitalisasi	5	Museum		Jumlah Komunitas Adat yang difasilitasi	33	Komunitas Adat	4	Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	19,48	Persen
No.	Sasaran / Indikator	Target	Satuan																																																						
1	Jumlah pembentukan kader bela negara	4.000.000	orang																																																						
	Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	347	Nilai budaya/ tradisi																																																						
2	Jumlah revitalisasi program museum dan taman budaya	144	Museum/ Taman Budaya																																																						
	Jumlah Lingkungan Budaya Desa Adat yang direvitalisasi	33	Desa Adat																																																						
4	Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	20	Persen																																																						
No.	Sasaran / Indikator	Target	Satuan																																																						
1	Jumlah pembentukan kader bela negara	400.000	orang																																																						
	Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	1.971	Nilai budaya/ tradisi																																																						
2	Jumlah museum yang direvitalisasi	5	Museum																																																						
	Jumlah Komunitas Adat yang difasilitasi	33	Komunitas Adat																																																						
4	Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar	19,48	Persen																																																						
72.	<p data-bbox="186 1024 554 1138">Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa</p> <p data-bbox="186 1138 554 1385">(Perubahan data pada Tabel 4.11 Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa, Poin 3 Penguatan Moderasi Umat Beragama: Menguatnya Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama poin b,</p>	<p data-bbox="554 1024 1517 1122">Menguatnya harmoni dan kerukunan umat beragama</p> <p data-bbox="554 1122 1517 1252">b. Jumlah dialog lintas agama di kecamatan sebanyak 220 Dialog di 34 Provinsi.</p> <p data-bbox="554 1252 1517 1349">Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama</p> <p data-bbox="554 1349 1517 1385">a. Jumlah penyuluh agama yang dibina sebanyak 10.064 Orang. b. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat sebanyak 4.860 Unit di 34 Provinsi</p> <p data-bbox="554 1385 1517 1482">Menguatnya penyelenggaraan jaminan produk halal</p> <p data-bbox="554 1482 1517 1385">a. Jumlah produk halal yang teregistrasi sebanyak 228 Register b. Jumlah produk halal yang tersertifikasi sebanyak 246 Sertifikat c. Jumlah Stakeholder JPH yang Terbina sebanyak 1.834 Lembaga</p>				<p data-bbox="1517 1024 2457 1122"><i>Poin b tersebut Dihapuskan</i></p> <p data-bbox="1517 1122 2457 1252">Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama</p> <p data-bbox="1517 1252 2457 1385">a. Jumlah penyuluh agama yang dibina sebanyak 33.460 Orang. b. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat sebanyak 939 Unit di 34 Provinsi</p> <p data-bbox="1517 1385 2457 1482">Menguatnya penyelenggaraan jaminan produk halal</p> <p data-bbox="1517 1482 2457 1385">a. Jumlah produk halal yang teregistrasi sebanyak 88.000 Register b. Jumlah produk halal yang tersertifikasi sebanyak 220.000 Sertifikat c. Jumlah Stakeholder JPH yang Terbina sebanyak 20 Lembaga</p>																																																			

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama poin a dan b, Menguatnya Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal poin a, b, dan c, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah poin a, b, c, d, dan e, Berkembangnya Ekonomi Umat dan Sumberdaya Keagamaan poin a, b, dan c, (Halaman IV.28 dan IV.29)	<p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan umrah</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah petugas haji yang profesional sebanyak 2.288 Orang Jumlah penyelenggara umrah dan haji khusus yang dipantau dan diawasi sebanyak 150 Lembaga Jumlah jemaah haji peserta bimbingan haji sebanyak 204.000 Orang Asrama haji direvitalisasi dan dikembangkan di 11 Lokasi Pusat Layanan Haji dan Umrah yang Dibangun di 41 Lokasi <p>Berkembangnya ekonomi umat dan sumberdaya keagamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah tanah wakaf yang di legalisasi di 2.500 Lokasi Jumlah lembaga zakat terawasi sebanyak 211 Lembaga Jumlah lembaga zakat yang terbina sebanyak 832 Lembaga 	<p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan umrah</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah petugas haji yang profesional sebanyak 14.056 Orang Jumlah penyelenggara umrah dan haji khusus yang dipantau dan diawasi sebanyak 935 Lembaga Jumlah jemaah haji peserta bimbingan haji sebanyak 397.756 Orang Asrama haji direvitalisasi dan dikembangkan di 10 Lokasi Pusat Layanan Haji dan Umrah yang Dibangun di 40 Lokasi <p>Berkembangnya ekonomi umat dan sumberdaya keagamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah tanah wakaf yang di legalisasi di 267 Lokasi Jumlah lembaga zakat terakreditasi sebanyak 337 Lembaga Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Ekonomi Umat sebanyak 1.269 Lembaga
73.	Kerangka Regulasi (kerangka regulasi untuk PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi, halaman VI.33, dihapus)	<p>Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> KP Pengendalian Penyakit: (a) peraturan perundangan tentang wabah; dan (b) peraturan perundangan tentang kesehatan jiwa <p>Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> KP Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi: peraturan menteri/kepala lembaga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, Peraturan Presiden tentang penyederhanaan proses perizinan dan komersialisasi produk inovasi, Peraturan Presiden tentang pembentukan badan layanan umum/holding untuk pengelolaan dan pemasaran produk inovasi <i>Science-Techno Park</i>/Lembaga Litbang, Peraturan Presiden tentang pemanfaatan prototipe hasil riset di lingkungan pemerintah dan BUMN, Peraturan Presiden tentang <i>master plan</i> SDM Iptek nasional, Peraturan Presiden tentang mekanisme mobilisasi SDM Iptek antar institusi litbang, BUMN, dan swasta, Peraturan Presiden tentang insentif kepada R&D swasta, pendapatan atas KI, dan investasi R&D, dan Peraturan Presiden tentang dana abadi riset atau dana inovasi nasional. 	<i>Dihapus</i>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 4.1.6 Kerangka Regulasi			
74.	Kerangka Regulasi	1. KP Pengendalian Penyakit: (a) peraturan perundangan tentang wabah; dan (b) peraturan perundangan tentang kesehatan jiwa.	<i>Dihapus</i>
75.	Kerangka Regulasi	1. KP Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi: peraturan menteri/kepala lembaga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, Peraturan Presiden tentang penyederhanaan proses perizinan dan komersialisasi produk inovasi, Peraturan Presiden tentang pembentukan badan layanan umum/ <i>holding</i> untuk pengelolaan dan pemasaran produk inovasi <i>Science-Techno Park</i> /Lembaga Litbang, Peraturan Presiden tentang pemanfaatan prototipe hasil riset di lingkungan pemerintah dan BUMN, Peraturan Presiden tentang master plan SDM Iptek nasional, Peraturan Presiden tentang mekanisme mobilisasi SDM Iptek antar institusi litbang, BUMN, dan swasta, Peraturan Presiden tentang insentif kepada R&D swasta, pendapatan atas KI, dan investasi R&D, dan Peraturan Presiden tentang dana abadi riset atau dana inovasi nasional	<i>Dihapus</i>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah															
4.2.1 Program Prioritas Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar															
76.	Perubahan Tabel 4.13 Sasaran dan Indikator PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, Halaman IV.37	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{*)}	2020^{*)}	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{*)}	2020^{*)}
		1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau							1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau				
			Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persen	59,07	61,29	63,44	65,66 (termasuk 23,23% akses perpipaan)		Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persen	87,54	87,75	88,70	91,83 (termasuk 23,23% akses perpipaan)
			Proporsi rumah tangga yang menempati hunian akses air minum aman* (perhitungan akses air minum aman melalui susenas dan PKAM dalam proses persiapan)	Persen	N/A	N/A	11	12		Proporsi rumah tangga yang menempati hunian akses air minum aman* (perhitungan akses air minum aman melalui susenas dan PKAM dalam proses persiapan)	Persen	N/A	6,8	6,78	7,32
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target					Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
77.	Perubahan Tabel 4.14 Sasaran dan Indikator KP dari PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, Halaman IV.38	1	Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta permukiman yang layak, aman, dan terjangkau					1	Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta permukiman yang layak, aman, dan terjangkau				
				Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah	46.300	Unit	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Kemendagri ▪ Pemda 			Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah	26.171	Unit	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Kemendagri ▪ Pemda
				Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	220.000	Unit	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Kemensos ▪ Kemendagri ▪ Pemda 			Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	225.800	Unit	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Kemensos ▪ Kemendagri ▪ Pemda
				Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan	118.460	Rumah Tangga	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkeu ▪ Pemda 			Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan	118.700	Rumah Tangga	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkeu ▪ Pemda
				Jumlah persil rumah tangga yang mendapat-kan fasilitasi pra sertifikasi	1.000	Persil	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Pemda 			Jumlah Satuan Permukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	29	Satuan Permukiman	16 Provinsi	Kemendes-PDPT

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020										
			Jumlah Satuan Permukiman yang di-bangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	23	Satuan Permukiman	22 Kabupaten/ Kota	Kemendes-PDPT	2.	Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan aman							
		2.	Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan aman									Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R	47.200	Kepala Keluarga	78 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemn PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R/TPST	260.595	Kepala Keluarga	33 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemn PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda 			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	49.000	Kepala Keluarga	5 Kab/Kota				
			Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak perpipaan	16.948.228	Sumbungan Rumah	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemn PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda 			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum perpipaan	17.000.000	Sumbungan Rumah	34 Provinsi				
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak non perpipaan (BJP, BPS)	29.510.794	Rumah Tangga	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemn PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda 			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (BJP, BPS)	50.000.000	Rumah Tangga	34 Provinsi				
								3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi							
										Penyediaan serta pemasangan	1	Unit/ Lokasi	Disnav Tarakan Prov.	Kemenuh			

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	N/A <i>ajb</i>	Rumah Tangga	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda 		fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran/ perairan			Kalimantan utara		
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi								Panjang jaringan kereta api yang dirawat dan dioperasikan	6.382	Km	Tersebar	Kemenhub
		Penyediaan serta pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran/ perairan	10	Unit/ Lokasi	Tersebar	Kemenhub			Pengembangan SDM pencarian dan penyelamatan	10.000	orang	Tersebar	Basarnas	
		Panjang jaringan kereta api yang dirawat dan dioperasikan	5.430	Km	Tersebar	Kemenhub			Penyediaan sarana dan Prasarana pencarian dan penyelamatan	212 (2 MYC)	Paket	Tersebar	Basarnas	
4.	Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	Meningkatnya ketersediaan air baku/air minum dari sumber air terlindungi								Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan pasokan air baku				
		Jumlah embung air baku yang dibangun	22	Embung	5 Provinsi	Kemen PUPR			Jumlah embung air baku yang dibangun	68	Embung	11 Provinsi	Kemen PUPR	
		Jumlah unit air baku yang dibangun	4,63	m ³ /det	29 Provinsi	Kemen PUPR			Jumlah kapasitas unit air baku yang dibangun	4,1	m ³ /det	30 Provinsi	Kemen PUPR	
		Jumlah	23	Kabupaten/	5	Kemen PUPR			Jumlah kabupaten/ kota rawan air dan pulau	172	Kabupaten/ Kota	33 Provinsi	Kemen PUPR	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
			kabupaten/kota rawan air dan pulau kecil terluar yang memperoleh penyediaan air baku		Kota	Provinsi					kecil terluar yang memperoleh penyediaan air baku				
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem teknologi pemantauan kualitas dan efisiensi suplai air baku	7	Kabupaten/Kota	Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat					Jumlah kapasitas air baku yang di-rehabilitasi	0,62	m ³ /det	10 Provinsi	Kemen PUPR
			Jumlah unit air baku yang di-rehabilitasi	32,5	Km	9 Provinsi									
			Jumlah peraturan perundangan sumber daya air yang diselesaikan	1	UU	Pusat									
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019															

4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

4.2.2 Program Prioritas Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾
78.	Perubahan Tabel 4.15 Sasaran dan Indikator PP Penguatan Infrastruktur												
	1. Meningkatnya konektivitas di daerah tertinggal							1. Meningkatnya konektivitas di daerah tertinggal					
	Jumlah rute perintis transportasi Udara	Rute perintis	201	239	239	201							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
	Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana, Halaman IV.42	Jumlah rute perintis transportasi Laut	Rute perintis	117	134	113	157	Jumlah rute perintis transportasi Udara	Rute perintis	180	209	192	188	
2.		Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air						Jumlah rute perintis transportasi Laut	Rute perintis	110	137	140	140	
		Panjang pengendali banjir yang dibangun	Km	162	190	30	220	2.	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air					
		Panjang pengaman pantai yang dibangun	Km	20	22	13	32	Panjang pengendali banjir yang dibangun	Km	177	222	137	136	
		Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun	Unit	31	31	13	28	Panjang pengaman pantai yang dibangun	Km	20,4	22,5	18,5	21,5	
		Jumlah <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS) yang dibangun/ditingkatkan	Unit	N/A	N/A	N/A	7	Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun	Unit	31	28	32	26	
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
79.	Perubahan Tabel 4.16 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana, Halaman IV.45	1.	Aksesibilitas Daerah Tertinggal	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan aksesibilitas daerah tertinggal				1.	Aksesibilitas Daerah Tertinggal	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan aksesibilitas daerah tertinggal					
				Jumlah bandara di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya	7	Lokasi	Tersebar	Kemenuhub			Jumlah bandara di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya	10	Lokasi	Tersebar	Kemenuhub
				Jumlah pelabuhan di daerah tertinggal pendukung tol laut yang dikembangkan	10	Lokasi	Tersebar	Kemenuhub			Jumlah pelabuhan di daerah tertinggal pendukung tol laut yang dikembangkan	7	Lokasi	Tersebar	Kemenuhub
				Jumlah terminal barang yang dibangun/ dikembangkan di kawasan perbatasan	6	Lokasi	Tersebar	Kemenuhub			Jumlah terminal barang yang dibangun/ dikembangkan di kawasan perbatasan	7	Lokasi	Tersebar	Kemenuhub
				Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan di daerah tertinggal	20	Km	Tersebar	Kemendes-PDIT			Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan di daerah tertinggal	24	Km	Tersebar	Kemendes-PDIT

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Panjang tanggul penahan lumpur yang direhabilitasi/ ditingkatkan	8,27	Km	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR					Jawa Timur	PUPR
		3.	Pemba-ngunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa	Terlindunginya kawasan perkotaan di pesisir utara Pulau Jawa dari bencana lingkungan									
			Panjang tanggul sungai yang dibangun/ ditingkatkan	12	Km	4 Provinsi	Kemen PUPR						
			Panjang <i>seawall</i> dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ ditingkatkan	4,3	Km	Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah	Kemen PUPR					Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat	Kemen PUPR
			Jumlah kabupaten/ kota yang membangun sumur resapan	13	Kabupaten/ Kota	5 Provinsi	Kemen PUPR					1 Provinsi	Kemen PUPR
			Kapasitas air baku dari sumber air permukaan yang dibangun	0,2	m ³ /detik	5 Provinsi	Kemen PUPR					1 Provinsi	Kemen PUPR
		4.	Percepatan Pemba-ngunan Papua dan Papua Barat	Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat									
			Pembangunan air baku	4	Unit	Kab. Kasonaweja, Kab. Yapen, Kota Sorong,	Kemen PUPR						
		3.	Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa	Terlindunginya kawasan perkotaan di pesisir utara Pulau Jawa dari bencana lingkungan									
			Panjang tanggul sungai yang dibangun/ ditingkatkan	60	Km	5 Provinsi	Kemen PUPR						
			Panjang <i>seawall</i> , <i>breakwater</i> , dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun/ ditingkatkan	0,4	Km	Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat	Kemen PUPR						
			Jumlah kabupaten/kota yang mem-bangun sistem pemantauan air tanah dan penurunan tanah	1	Kabupaten/ Kota	1 Provinsi	Kemen PUPR						
			Kapasitas air baku dari sumber air permukaan yang dibangun	0,1	m ³ /detik	1 Provinsi	Kemen PUPR						
		4.	Percepatan Pemba-ngunan Papua dan Papua Barat	Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat									

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
					Kab. Kambala			Jumlah kapasitas unit air baku yang dibangun	0,077	m ³ /det	Kab. Kaimana, Kab. Sorong, Kab. Fakfak, Kab. Waropen, Kab. Tolikara, Kab. Yapen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayawijaya, Kab. Asmat, Kab. Jayapura, Kab. Manokwari, Kab. Merauke, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong Selatan, Kota Jayapura	Kemen PUPR	
		Pembangunan bangunan pengendali banjir	1,2	Km	Kota Jayapura dan Sorong	Kemen PUPR							
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan	4	Daerah Irigasi	DI Manggar Nabire	Kemen PUPR							
		Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi standar pelayanan operasional	5	Lokasi	Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Kaimana, Kab. Kep. Yapen	Kemenhub							
		Panjang jalan nasional, trans papua, dan perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	200	Km	Tersebar	Kemen PUPR							
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Bangunan pengendali banjir yang dibangun	7,59	Km	Kota Jayapura, Kota Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Kab. Yahukimo, Kab. Merauke	Kemen PUPR

NO	PERIHAL	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				
	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020		3	Bendung	DI	Kemen PUPR
		Bendung dan jaringan irigasi permukaan yang dibangun			Wanggar Nabire, Di Lerh Jayapura, Di Bomberay Fakfak	Kemen PUPR
		Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi standar pelayanan operasional	5	Lokasi	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Kaimana, Kab. Kep. Yapen	Kemenhub
		Panjang jalan nasional, transpapua, dan perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya	153	Km	Tersebar	Kemen PUPR

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																												
4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 4.2.3 Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi																																																																			
80.	Tabel 4.17 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(*)</th> <th>2019^(**)</th> <th>2020^(**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="6">Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah produksi penumpang dan angkutan barang kereta api</td> <td>Juta Orang, Juta Ton</td> <td>360 Juta Orang, 40 Juta Ton</td> <td>430 Juta Orang, 45 Juta Ton</td> <td>513 Juta Orang, 50 Juta Ton</td> <td>590 Juta Orang, 60 Juta Ton</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>					No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	1.	Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda							Jumlah produksi penumpang dan angkutan barang kereta api	Juta Orang, Juta Ton	360 Juta Orang, 40 Juta Ton	430 Juta Orang, 45 Juta Ton	513 Juta Orang, 50 Juta Ton	590 Juta Orang, 60 Juta Ton	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(*)</th> <th>2019^(**)</th> <th>2020^(**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="6">Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah produksi penumpang dan angkutan barang kereta api</td> <td>Juta Orang, Juta Ton</td> <td>392 Juta Orang, 40 Juta Ton</td> <td>422 Juta Orang, 45 Juta Ton</td> <td>425Juta Orang, 53 Juta Ton</td> <td>442 Juta Orang, 60 Juta Ton</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>					No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	1.	Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda							Jumlah produksi penumpang dan angkutan barang kereta api	Juta Orang, Juta Ton	392 Juta Orang, 40 Juta Ton	422 Juta Orang, 45 Juta Ton	425Juta Orang, 53 Juta Ton	442 Juta Orang, 60 Juta Ton														
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)																																																													
1.	Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda																																																																		
	Jumlah produksi penumpang dan angkutan barang kereta api	Juta Orang, Juta Ton	360 Juta Orang, 40 Juta Ton	430 Juta Orang, 45 Juta Ton	513 Juta Orang, 50 Juta Ton	590 Juta Orang, 60 Juta Ton																																																													
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)																																																													
1.	Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda																																																																		
	Jumlah produksi penumpang dan angkutan barang kereta api	Juta Orang, Juta Ton	392 Juta Orang, 40 Juta Ton	422 Juta Orang, 45 Juta Ton	425Juta Orang, 53 Juta Ton	442 Juta Orang, 60 Juta Ton																																																													
81.	Tabel 4.18 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konektivitas Transportasi Jalan</td> <td colspan="5">Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Panjang jalan tol baru yang terbangun</td> <td>600</td> <td>Km</td> <td>Tersebar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)</td> <td>Kemen PUPR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah simpul transportasi yang didukung akses jalan</td> <td>7</td> <td>Lokasi</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen PUPR</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	1.	Konektivitas Transportasi Jalan	Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional							Panjang jalan tol baru yang terbangun	600	Km	Tersebar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)	Kemen PUPR			Jumlah simpul transportasi yang didukung akses jalan	7	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konektivitas Transportasi Jalan</td> <td colspan="5">Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Panjang jalan tol baru yang terbangun</td> <td>368,26</td> <td>Km</td> <td>Tersebar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)</td> <td>Kemen PUPR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah simpul transportasi yang didukung akses jalan</td> <td>18</td> <td>Lokasi</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen PUPR</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	1.	Konektivitas Transportasi Jalan	Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional							Panjang jalan tol baru yang terbangun	368,26	Km	Tersebar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)	Kemen PUPR			Jumlah simpul transportasi yang didukung akses jalan	18	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR
No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																													
1.	Konektivitas Transportasi Jalan	Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional																																																																	
		Panjang jalan tol baru yang terbangun	600	Km	Tersebar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)	Kemen PUPR																																																													
		Jumlah simpul transportasi yang didukung akses jalan	7	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR																																																													
No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																													
1.	Konektivitas Transportasi Jalan	Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional																																																																	
		Panjang jalan tol baru yang terbangun	368,26	Km	Tersebar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)	Kemen PUPR																																																													
		Jumlah simpul transportasi yang didukung akses jalan	18	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR																																																													

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																	
		2.	Konektivitas Transportasi Kereta Api	Terselenggaranya pengembangan kereta api mendukung kawasan prioritas nasional		Panjang jalur kereta api lintas utama yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	275	Km	Tersebar	Kemenhub		2.	Konektivitas Transportasi Kereta Api	Terselenggaranya pengembangan kereta api mendukung kawasan prioritas nasional		Panjang jalur kereta api lintas utama yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	218	Km	Tersebar	Kemenhub					
			Panjang jalur kereta api lintas utama yang ditingkatkan			225	Km	Tersebar	Kemenhub				Panjang jalur kereta api lintas utama yang ditingkatkan	229,48	Km	Tersebar	Kemenhub								
		4.	Konektivitas Transportasi Udara	Terselenggaranya pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas nasional		Jumlah bandara yang ditingkatkan kapasitasnya	46	Lokasi	Tersebar	Kemenhub		4.	Konektivitas Transportasi Udara	Terselenggaranya pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas nasional		Jumlah bandara yang ditingkatkan kapasitasnya	40	Lokasi	Tersebar	Kemenhub					
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																															
4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 4.2.4 Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur Perkotaan																																																																																							
82.	Tabel 4.20 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan, Halaman IV.52	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.</td> <td>Infrastruktur Jalan Perkotaan</td> <td>Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah <i>fly over</i> dan underpass yang dibangun</td> <td>7</td> <td>Lokasi</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen PUPR</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan</td> <td>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah NSPK terusun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit)</td> <td>1</td> <td>Unit</td> <td>Pusat</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda </td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan</td> <td>Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	3.	Infrastruktur Jalan Perkotaan	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan							Jumlah <i>fly over</i> dan underpass yang dibangun	7	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR	4.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan							Jumlah NSPK terusun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit)	1	Unit	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda 	5.	Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.</td> <td>Infrastruktur Jalan Perkotaan</td> <td>Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah <i>fly over</i> dan underpass yang dibangun</td> <td>6</td> <td>Lokasi</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen PUPR</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan</td> <td>Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah NSPK terusun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (dokumen)</td> <td>4</td> <td>Dokumen</td> <td>Pusat</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda </td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan</td> <td>Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	3.	Infrastruktur Jalan Perkotaan	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan							Jumlah <i>fly over</i> dan underpass yang dibangun	6	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR	4.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan							Jumlah NSPK terusun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (dokumen)	4	Dokumen	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda 	5.	Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan				
No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																																																	
3.	Infrastruktur Jalan Perkotaan	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan																																																																																					
		Jumlah <i>fly over</i> dan underpass yang dibangun	7	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR																																																																																	
4.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan																																																																																					
		Jumlah NSPK terusun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit)	1	Unit	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda 																																																																																	
5.	Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan																																																																																					
No.	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																																																	
3.	Infrastruktur Jalan Perkotaan	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan																																																																																					
		Jumlah <i>fly over</i> dan underpass yang dibangun	6	Lokasi	Tersebar	Kemen PUPR																																																																																	
4.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan																																																																																					
		Jumlah NSPK terusun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (dokumen)	4	Dokumen	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda 																																																																																	
5.	Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan																																																																																					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		Jumlah penyediaan hunian layak di perkotaan melalui fasilitasi pemerintah	10.000	Unit	Wilayah Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil	Kemen PUPR			Jumlah penyediaan hunian layak di perkotaan melalui fasilitasi pemerintah	5.219	Unit	Wilayah Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil	Kemen PUPR
		6. Energi Berkelanjutan terutama untuk Perkotaan					6. Energi Berkelanjutan terutama untuk Perkotaan						
		Jumlah penyediaan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	12	Lokasi	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Kemen ESDM • Pemerintah Daerah • Badan Usaha 			Jumlah pemanfaatan photovoltaik (PV) rooftop	800	Unit	Tersebar	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen ESDM • Badan Usaha
		Jumlah pemanfaatan photovoltaik (PV) rooftop	10	Mega Watt peak (MWp)	Tersebar	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen ESDM • Badan Usaha 			Jumlah penambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU)	168	Unit	Jabodetabek Tersebar di Kota Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha
		Jumlah penambahan stasiun pengisian listrik umum (SPLU)	200	Unit	Jabodetabek	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha 			Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019				
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019											

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																																																																									
4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 4.2.5 Program Prioritas Transformasi Digital																																																																																																																																	
83.	Perubahan Tabel 4.22 Sasaran dan Indikator KP dari PP Transformasi Digital, Halaman IV.56	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penuntasan Infrastruktur TIK</td> <td colspan="5">Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah BTS untuk desa <i>blank spot</i></td> <td>2.100</td> <td>Lokasi</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen-kominfo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah daerah operasional layanan jaringan serat optik Palapa Ring</td> <td>57</td> <td>Kabupaten/ Kota</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen-kominfo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi</td> <td>31</td> <td>Gbps</td> <td>Pusat</td> <td>Kemen-kominfo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan</td> <td>20</td> <td>Stasiun</td> <td>Tersebar</td> <td>LPP RRI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan</td> <td>50</td> <td>Unit</td> <td>Tersebar</td> <td>LPP TVRI</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemanfaatan Infrastruktur TIK</td> <td colspan="5">Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, dll.</td> <td>5.950</td> <td>Lokasi</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen-kominfo</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	1.	Penuntasan Infrastruktur TIK	Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia							Jumlah BTS untuk desa <i>blank spot</i>	2.100	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo			Jumlah daerah operasional layanan jaringan serat optik Palapa Ring	57	Kabupaten/ Kota	Tersebar	Kemen-kominfo			Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi	31	Gbps	Pusat	Kemen-kominfo			Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan	20	Stasiun	Tersebar	LPP RRI			Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan	50	Unit	Tersebar	LPP TVRI	2.	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil							Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, dll.	5.950	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penuntasan Infrastruktur TIK</td> <td colspan="5">Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah BTS untuk desa <i>blank spot</i></td> <td>5.000</td> <td>Lokasi</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen-kominfo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Beroperasinya layanan jaringan serat optik Palapa Ring</td> <td>95</td> <td>Persen SLA</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen-kominfo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi</td> <td>21</td> <td>Gbps</td> <td>Pusat</td> <td>Kemen-kominfo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan</td> <td>15</td> <td>Stasiun</td> <td>Tersebar</td> <td>LPP RRI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan</td> <td>20</td> <td>Unit</td> <td>Tersebar</td> <td>LPP TVRI</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemanfaatan Infrastruktur TIK</td> <td colspan="5">Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah,</td> <td>12.000</td> <td>Lokasi</td> <td>Tersebar</td> <td>Kemen-kominfo</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	1.	Penuntasan Infrastruktur TIK	Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia							Jumlah BTS untuk desa <i>blank spot</i>	5.000	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo			Beroperasinya layanan jaringan serat optik Palapa Ring	95	Persen SLA	Tersebar	Kemen-kominfo			Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi	21	Gbps	Pusat	Kemen-kominfo			Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan	15	Stasiun	Tersebar	LPP RRI			Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan	20	Unit	Tersebar	LPP TVRI	2.	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil							Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah,	12.000	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																																																																																									
		1.	Penuntasan Infrastruktur TIK	Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia																																																																																																																													
				Jumlah BTS untuk desa <i>blank spot</i>	2.100	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo																																																																																																																									
				Jumlah daerah operasional layanan jaringan serat optik Palapa Ring	57	Kabupaten/ Kota	Tersebar	Kemen-kominfo																																																																																																																									
				Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi	31	Gbps	Pusat	Kemen-kominfo																																																																																																																									
				Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan	20	Stasiun	Tersebar	LPP RRI																																																																																																																									
				Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan	50	Unit	Tersebar	LPP TVRI																																																																																																																									
		2.	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil																																																																																																																													
				Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, dll.	5.950	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo																																																																																																																									
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																																																																																											
1.	Penuntasan Infrastruktur TIK	Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia																																																																																																																															
		Jumlah BTS untuk desa <i>blank spot</i>	5.000	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo																																																																																																																											
		Beroperasinya layanan jaringan serat optik Palapa Ring	95	Persen SLA	Tersebar	Kemen-kominfo																																																																																																																											
		Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi	21	Gbps	Pusat	Kemen-kominfo																																																																																																																											
		Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan	15	Stasiun	Tersebar	LPP RRI																																																																																																																											
		Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan	20	Unit	Tersebar	LPP TVRI																																																																																																																											
2.	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil																																																																																																																															
		Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah,	12.000	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo																																																																																																																											

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020									
			Jumlah <i>start up</i> digital	50	<i>Start up</i> aktif	Pusat	Kemen-kominfo	dll.									
			Jumlah nelayan, petani dan UMKM online yang menjadi pengguna aktif	105.000	Orang	Tersebar	Kemen-kominfo	Jumlah <i>start up</i> digital	25	<i>Start up</i> aktif	Pusat	Kemen-kominfo	Jumlah UMKM online yang menjadi pengguna aktif	1.000	Orang	Tersebar	Kemen-kominfo
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019						Jumlah lokasi Petani dan Nelayan <i>Go-online</i>	6	Lokasi	Tersebar	Kemen-kominfo	Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019				
84.	Perubahan keterangan Gambar 4.25 Aspek Kewilayahan PP Transformasi Digital, Halaman IV.58		: Penyediaan BTS di 2.100 Lokasi			: Satelit Telekomunikasi		: Penyediaan BTS di 5.000 Lokasi		: Satelit Telekomunikasi		: Penyediaan Layanan Akses Internet	: 5.950 Lokasi	: 12.000 Lokasi			
4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 4.2.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan																	
85.	Halaman IV.58 Perubahan Kerangka Regulasi	Percepatan regulasi pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga perlu dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan terkait Program Prioritas Perluasan Infrastruktur Dasar. Rancangan undang-undang pengganti undang-undang tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan saat ini proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan. Regulasi ini sangat diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bagi setiap warga negara dan pengaturan tata kelolanya;						<i>Dihapus, karena Undang-undang tentang Sumber Daya Air sudah terbit (UU No.17 Tahun 2019)</i>									

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
86.	Halaman IV.59 Penambahan Kerangka Regulasi		5. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau adalah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Regulasi ini mengatur sistem kerja Tabungan Perumahan Rakyat termasuk keanggotaan Tapera, pengerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera, dan pemanfaatan Dana Tapera.
87.	Halaman IV.59 Perubahan Kerangka Regulasi Nomor 2	Penyusunan Naskah Akademis Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi sebagai kajian dasar terkait bidang air minum dan sanitasi yang akan dijadikan acuan dan pertimbangan dalam merumuskan pokok-pokok substansi pada rancangan undang-undang. Masih jauhnya kondisi capaian air minum dan sanitasi saat ini dibandingkan dengan target serta belum adanya sistem yang kuat dalam tata kelola pelaksanaan air minum dan sanitasi menjadi alasan diperlukannya suatu payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian dan kejelasan dalam pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi melalui kewajiban kepada masyarakat untuk menjalankan sistem penyediaan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman;	Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan turunan lainnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yaitu peraturan terkait konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan pendanaan pengelolaan sumber daya air;
88.	Halaman IV.59 Perubahan Kerangka Kelembagaan Nomor 8 dan 9	8. Peningkatan kapasitas pengelola Bendungan; 9. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi dan sinergi sistem pengelolaan kelembagaan petani.	<i>dihapus</i>
89.	Halaman IV.58 Perubahan Kerangka Regulasi	Percepatan regulasi pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga perlu dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan terkait Program Prioritas Perluasan Infrastruktur Dasar. Rancangan undang-undang pengganti undang-undang tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan saat ini proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan. Regulasi ini sangat diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bagi setiap warga negara dan pengaturan tata kelolanya;	Dihapus, karena Undang-undang tentang Sumber Daya Air sudah terbit (UU No.17 Tahun 2019)

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja															
90.	Indikator PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja (perubahan data pada Tabel 4.23, Halaman IV.60)	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{*)}	2020^{*)}	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{*)}	2020^{*)}
		1.	Pertumbuhan PDB Pertanian	Persen	3,8	3,9	3,8	3,8	1.	Pertumbuhan PDB Pertanian	Persen	3,8	3,9	3,8	3,7
		3.	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	Persen	4,3	4,3	5,1	4,90 - 5,40	3.	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	Persen	4,3	4,3	5,1	5,0
		4.	Nilai Devisa Pariwisata	Miliar USD	15,2	17,0	20,0	19,0 - 21,0	4.	Nilai Devisa Pariwisata	Miliar USD	15,2	17,0	20,0	21,0
		5.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Triliun Rupiah	1.009	1.105	1.211	1.305 - 1.307	5.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Triliun Rupiah	989	1.105	1.211	1.189-1.214
		6.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	Persen	8,9	6,5	6,3	4,69 - 6,65	6.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	Persen	8,9	6,5	6,3	3,7
		7.	Pertumbuhan Investasi (PMTE)	Persen	6,2	6,7	7,0	6,9-7,3	7.	Pertumbuhan Investasi (PMTE)	Persen	6,2	6,7	7,0	6,0
		12.	Kontribusi Ekonomi Digital	Persen	N/A	N/A	N/A	3,17 ^{b)}	12.	Kontribusi Ekonomi Digital	Persen	N/A	N/A	N/A	3,2
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja															
4.3.2 Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi															
91.	Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (perubahan data pada Tabel 4.26, Halaman IV.65)	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017¹⁾	2018¹⁾	2019¹⁾	2020¹⁾	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017¹⁾	2018¹⁾	2019¹⁾	2020¹⁾
		1.	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas	Persen	4,85	4,77	5,33	5,48 - 6,01	1.	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas	Persen	4,85	4,77	5,33	5,69
		5.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Persen	20,16	19,86	19,83	19,78 - 19,80	5.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	Persen	20,16	19,86	19,83	19,63
		11.	Target realisasi investasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	692,8	721,3	833,0 - 870,0	875,1 - 890,3	11.	Target realisasi investasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	692,8	721,3	833,0-870,0	886,0
		12.	Kontribusi realisasi PMA dan PMDN sektor manufaktur	Persen	39,6	30,8	33,2 ^{**)}	36,2	12.	Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor manufaktur	Triliun Rupiah	274,7	222,2	198,0 ¹⁾	246,3
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ^{**)} Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: ¹⁾ Angka proyeksi; ^{**)} Target								
92.	Indikator KP Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir (perubahan data pada Tabel 4.27, Halaman IV.67)	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana
		1.	Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya produksi komoditas tanaman industri						1.	Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya produksi komoditas tanaman industri			
			Peningkatan produksi cengkeh	3,0	Persen	114 Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen BUMN • Kemenperin • BKPM • Kemendes PDPT • Pemda • BUMN Perkebunan • Pertamina 				Peningkatan produksi cengkeh	2,3	Persen	114 Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen BUMN • Kemenperin • BKPM • Pemda • BUMN Perkebunan • Pertamina

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																					
		<table border="1"> <tr> <td colspan="6" data-bbox="556 534 1506 570">Meningkatnya produksi komoditas hortikultura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="556 570 977 751">Peningkatan produksi buah-buahan</td> <td data-bbox="977 570 1093 751">2,7</td> <td data-bbox="1093 570 1207 751">Persen</td> <td data-bbox="1207 570 1323 751">33 Provinsi</td> <td colspan="2" data-bbox="1323 570 1506 751"> <ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen BUMN • Kemendes PDTT • Pemda • BUMN </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="556 751 1506 787">Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="556 787 977 1068">Peningkatan produksi fitofarmaka</td> <td data-bbox="977 787 1093 1068">3,5</td> <td data-bbox="1093 787 1207 1068">Persen</td> <td data-bbox="1207 787 1323 1068">3 Provinsi</td> <td colspan="2" data-bbox="1323 787 1506 1068"> <ul style="list-style-type: none"> • Kementan • BPOM • Kemenko Perekonomian • Kemenperin • Kemendes PDTT • Pemda • Kemenkes • LIPI </td> </tr> </table>						Meningkatnya produksi komoditas hortikultura						Peningkatan produksi buah-buahan	2,7	Persen	33 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen BUMN • Kemendes PDTT • Pemda • BUMN 		Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu						Peningkatan produksi fitofarmaka	3,5	Persen	3 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • BPOM • Kemenko Perekonomian • Kemenperin • Kemendes PDTT • Pemda • Kemenkes • LIPI 		<table border="1"> <tr> <td colspan="6" data-bbox="1522 534 2446 570">Meningkatnya produksi komoditas hortikultura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1522 570 1942 719">Peningkatan produksi buah-buahan</td> <td data-bbox="1942 570 2058 719">2,7</td> <td data-bbox="2058 570 2172 719">Persen</td> <td data-bbox="2172 570 2288 719">33 Provinsi</td> <td colspan="2" data-bbox="2288 570 2446 719"> <ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen BUMN • Pemda • BUMN </td> </tr> <tr> <td colspan="6" data-bbox="1522 719 2446 755">Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1522 755 1942 1036">Peningkatan produksi tanaman obat</td> <td data-bbox="1942 755 2058 1036">3,5</td> <td data-bbox="2058 755 2172 1036">Persen</td> <td data-bbox="2172 755 2288 1036">3 Provinsi</td> <td colspan="2" data-bbox="2288 755 2446 1036"> <ul style="list-style-type: none"> • Kementan • BPOM • Kemenko Perekonomian • Kemenperin • Pemda • Kemenkes • LIPI </td> </tr> </table>						Meningkatnya produksi komoditas hortikultura						Peningkatan produksi buah-buahan	2,7	Persen	33 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen BUMN • Pemda • BUMN 		Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu						Peningkatan produksi tanaman obat	3,5	Persen	3 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • BPOM • Kemenko Perekonomian • Kemenperin • Pemda • Kemenkes • LIPI 	
Meningkatnya produksi komoditas hortikultura																																																													
Peningkatan produksi buah-buahan	2,7	Persen	33 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen BUMN • Kemendes PDTT • Pemda • BUMN 																																																									
Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu																																																													
Peningkatan produksi fitofarmaka	3,5	Persen	3 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • BPOM • Kemenko Perekonomian • Kemenperin • Kemendes PDTT • Pemda • Kemenkes • LIPI 																																																									
Meningkatnya produksi komoditas hortikultura																																																													
Peningkatan produksi buah-buahan	2,7	Persen	33 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen BUMN • Pemda • BUMN 																																																									
Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu																																																													
Peningkatan produksi tanaman obat	3,5	Persen	3 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • BPOM • Kemenko Perekonomian • Kemenperin • Pemda • Kemenkes • LIPI 																																																									
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																																																													
93.	Indikator KP Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir (perubahan data pada Tabel 4.27, Halaman IV.67)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="556 1114 645 1182">No.</th> <th data-bbox="645 1114 859 1182">Kegiatan Prioritas</th> <th data-bbox="859 1114 1028 1182">Sasaran/ Indikator</th> <th data-bbox="1028 1114 1118 1182">Target</th> <th data-bbox="1118 1114 1209 1182">Unit</th> <th data-bbox="1209 1114 1325 1182">Lokasi</th> <th data-bbox="1325 1114 1506 1182">K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="556 1182 645 1308">2.</td> <td data-bbox="645 1182 859 1308">Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir</td> <td colspan="5" data-bbox="859 1182 1506 1308">Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="859 1308 1028 1446">Jumlah pembangunan /revitalisasi prasarana logistik perikanan,</td> <td data-bbox="1028 1308 1118 1446">10</td> <td data-bbox="1118 1308 1209 1446">Unit</td> <td data-bbox="1209 1308 1325 1446">8 lokasi</td> <td data-bbox="1325 1308 1506 1446"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kemen BUMN • Kemenhub • KKP </td> </tr> </tbody> </table>						No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	2.	Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir							Jumlah pembangunan /revitalisasi prasarana logistik perikanan,	10	Unit	8 lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kemen BUMN • Kemenhub • KKP 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1522 1114 1610 1182">No.</th> <th data-bbox="1610 1114 1824 1182">Kegiatan Prioritas</th> <th data-bbox="1824 1114 1993 1182">Sasaran/ Indikator</th> <th data-bbox="1993 1114 2084 1182">Target</th> <th data-bbox="2084 1114 2174 1182">Unit</th> <th data-bbox="2174 1114 2290 1182">Lokasi</th> <th data-bbox="2290 1114 2454 1182">K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1522 1182 1610 1308">2.</td> <td data-bbox="1610 1182 1824 1308">Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir</td> <td colspan="5" data-bbox="1824 1182 2454 1308">Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1824 1308 1993 1446">Jumlah prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan,</td> <td data-bbox="1993 1308 2084 1446">31</td> <td data-bbox="2084 1308 2174 1446">Unit</td> <td data-bbox="2174 1308 2290 1446">17 Provinsi</td> <td data-bbox="2290 1308 2454 1446"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kemen BUMN </td> </tr> </tbody> </table>						No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	2.	Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir							Jumlah prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan,	31	Unit	17 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kemen BUMN 						
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana																																																							
2.	Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir																																																											
		Jumlah pembangunan /revitalisasi prasarana logistik perikanan,	10	Unit	8 lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kemen BUMN • Kemenhub • KKP 																																																							
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana																																																							
2.	Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir																																																											
		Jumlah prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan,	31	Unit	17 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kemen BUMN 																																																							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																					
			termasuk <i>cold storage</i>				<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpar • Kemen ESDM • BKPM • Kemendes PDPT • Pemda • BUMN 		termasuk <i>cold storage</i>					<ul style="list-style-type: none"> • Kemenhub • KKP • Kemenparekraf • Kemen ESDM • BKPM • Pemda • BUMN 																															
		Jumlah sarana rantai dingin dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	300	Unit	15	Provinsi			Jumlah sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan hasil kelautan dan perikanan	400	Unit	21	Provinsi																																
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dioptimalkan	13	Lokasi	9	provinsi																																
94.	Indikator KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok (perubahan data pada Tabel 4.27, Halaman IV.69)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Unit</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok</td> <td>Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan</td> <td>5</td> <td>Destinasi</td> <td>1. Jatim 2. NTT 3. Sultra 4. Sulsel 5. Papua Barat</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenpar • KLHK • KKP • Kemen KUKM • Kemendes PDPT </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	4	Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata							Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan	5	Destinasi	1. Jatim 2. NTT 3. Sultra 4. Sulsel 5. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpar • KLHK • KKP • Kemen KUKM • Kemendes PDPT 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Unit</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok</td> <td>Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan</td> <td>4</td> <td>Destinasi</td> <td>1. Jatim 2. NTT 3. Sultra 4. Sulut</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenparekraf • Kemen PUPR • BKPM • KLHK • KKP </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	4	Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata							Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan	4	Destinasi	1. Jatim 2. NTT 3. Sultra 4. Sulut	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenparekraf • Kemen PUPR • BKPM • KLHK • KKP
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana																																							
4	Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata																																											
		Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan	5	Destinasi	1. Jatim 2. NTT 3. Sultra 4. Sulsel 5. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpar • KLHK • KKP • Kemen KUKM • Kemendes PDPT 																																							
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana																																							
4	Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata																																											
		Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi penyusunan dokumen pengembangan	4	Destinasi	1. Jatim 2. NTT 3. Sultra 4. Sulut	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenparekraf • Kemen PUPR • BKPM • KLHK • KKP 																																							
								Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																																					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana
95.	Indikator KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital (perubahan data pada Tabel 4.27, Halaman IV.70)	5.	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital	Meningkatnya nilai tambah produk kreatif dan digital					5.	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital	Meningkatnya nilai tambah produk kreatif dan digital				
				Jumlah kluster kreatif yang dikembangkan	9	Lokasi	1. Sumut (Medan) 2. Jabar (Bandung dan Karawang) 3. Banten (Maja-Rangkasbitung, Lebak) 4. DKI Jakarta 5. DIY 6. Jateng (Semarang) 7. Jatim (Surabaya) 8. Sulsel (Makassar) 9. Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Bekraf • Kemen-kominfo • Kemen-Hukham • Kemen-perin • Kemen-dikbud • Kemenlu • Pemda 			Jumlah kluster kreatif yang dikembangkan	8	Lokasi	1. Sumut (Medan) 2. Jabar (Bandung dan Karawang) 3. Banten (Maja-Rangkasbitung, Lebak) 4. DIY 5. Jateng (Semarang) 6. Jatim (Surabaya) 7. Sulsel (Makassa) 8. Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen-parekraf • Kemen-Kominfo • Kemen-Hukham • Kemen-perin • Kemen-dikbud • Kemenlu Pemda
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							
96.	Indikator KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi (perubahan data pada Tabel 4.27, Halaman IV.71)	6.	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi	Meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan realisasi investasi PMA dan PMDN				6.	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi	Meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan realisasi investasi PMA dan PMDN					
				Meningkatnya peringkat daya saing pilar pasar kerja dalam <i>global competitiveness index</i>							<i>Dihapus</i>				

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020			
		Peringkat daya saing pasar kerja Indonesia	75	Peringkat	Pusat	Dhazus			
		Jumlah perusahaan di kawasan industri yang menerapkan norma ketenagakerjaan bidang waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan	4000	Perusahaan	Pusat	Dhazus			
						Perusahaan di Kawasan Industri yang Menerapkan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	8000	Perusahaan	Pusat
						Perusahaan yang mendapatkan sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan SMK3	5000	Perusahaan	Pusat
						Perusahaan yang menerapkan K3, lingkungan kerja, dan hygiene perusahaan	4000	Perusahaan	Pusat

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

- Kemnaker
- Pemda

- Kemnaker
- Pemda

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja																
4.3.3 Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja																
97.	Indikator KP Pengembangan Industri Halal (perubahan data pada Tabel 4.27, Halaman IV.72)	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	
		8.	Pengembangan Industri Halal	Berkembangnya Industri Halal						8.	Pengembangan Industri Halal	Berkembangnya Industri Halal				
				<i>Declaration on Halal Industry</i>	1	Dokumen	DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kemendag • Kemen PPN/ Bappenas • Kemenlu 				Jumlah dokumen keluaran Indonesia – <i>Middle East and Countries Summit on Halal Industries</i>	3	<i>Declaration, Work Plan, Network</i>	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Kemendag • Kemenlu
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																
98.	Indikator Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja (perubahan data pada Tabel 4.28, Halaman IV.77)	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{**)}	2020^{**)}	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{**)}	2020^{**)}	
		Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja														
		3.	Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi	Orang	N/A ^{a)}	N/A ^{a)}	N/A ^{a)}	1.890.345	3.	Dihapus						
		6.	Jumlah Tenaga Kerja Industri	Juta Orang	17,5	18,3	N/A	19,7	6.	Jumlah Tenaga Kerja Industri	Juta Orang	17,5	18,3	18,9	19,7	
		7.	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Juta Orang	12,6	12,6 ^{e)}	12,7 ^{e)}	13,0	7.	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Juta Orang	12,7 ^{a)}	12,9 ^{d)}	13,0	13,0	
		8.	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Juta Orang	17,4	17,9 ^{b)}	18,4 ^{b)}	19,0	8.	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Juta Orang	17,7	17,9 ^{e)}	18,4 ^{e)}	19,0	
Sumber: BPS 2018; Sakernas 2018; RKP 2019.																
Keterangan: *) Realisasi; **) Target berdasarkan proyeksi Direktorat Pendidikan dan Agama Bappenas (basis target Visi 2045); ^{a)} Data tidak tersedia karena sebelumnya merupakan data gabungan jumlah lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; ^{b)} Data realisasi pelatihan di 14 K/L, kecuali Kemendikbud dan Kemristekdikti; ^{c)} Data realisasi BNSP Desember 2018; ^{d)} Target RKP 2019, (Proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah = 37%); ^{e)} Target Kemenpar; ^{f)} Prognosa.																
Sumber: BPS 2018; Sakernas 2018; RKP 2019.																
Keterangan: *) Realisasi; **) Target merupakan proyeksi dengan basis target Visi 2045; ^{a)} Data tidak tersedia karena sebelumnya merupakan data gabungan jumlah lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; ^{b)} Data realisasi pelatihan di 14 K/L, kecuali Kemendikbud dan Kemristekdikti; ^{c)} Data realisasi BNSP Desember 2018; ^{d)} Target RKP 2019, (Proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah = 37%); ^{e)} Prognosa; ^{f)} Lampiran Pidato Presiden Tahun 2019.																

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																				
		<table border="1" data-bbox="550 529 1490 565"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>• Bekraf</td> </tr> </table> <p data-bbox="550 570 1490 597">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>									• Bekraf	<table border="1" data-bbox="1505 529 2422 984"> <tr> <td></td><td></td><td>SDM Bidang Sertifikasi (Asesor dan Master Asesor) yang Dilatih</td><td>1.500</td><td>Orang</td><td>Pusat</td><td> <ul data-bbox="2237 529 2422 870" style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemenkominfo • Kemendikbud • Kemenkes • KLHK • Kemenkop UKM • Kementekdikti • Kemendag • Kemenhub </td> </tr> </table> <p data-bbox="1505 989 2422 1016">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>			SDM Bidang Sertifikasi (Asesor dan Master Asesor) yang Dilatih	1.500	Orang	Pusat	<ul data-bbox="2237 529 2422 870" style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemenkominfo • Kemendikbud • Kemenkes • KLHK • Kemenkop UKM • Kementekdikti • Kemendag • Kemenhub 																										
								• Bekraf																																					
		SDM Bidang Sertifikasi (Asesor dan Master Asesor) yang Dilatih	1.500	Orang	Pusat	<ul data-bbox="2237 529 2422 870" style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemenkominfo • Kemendikbud • Kemenkes • KLHK • Kemenkop UKM • Kementekdikti • Kemendag • Kemenhub 																																							
101.	K/L Pelaksana KP Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ((perubahan data pada Tabel 4.29, Halaman IV.80)	<table border="1" data-bbox="550 1024 1490 1438"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Target</th> <th>Unit</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.</td> <td>Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</td> <td>Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Terbentuknya Lembaga Pengelola Kartu Prakerja</td> <td>1</td> <td>Lembaga</td> <td>Pusat</td> <td> <ul data-bbox="1298 1240 1490 1438" style="list-style-type: none"> • Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Kemenko Perekonomian • Bappenas • Pemda </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	4.	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi							Terbentuknya Lembaga Pengelola Kartu Prakerja	1	Lembaga	Pusat	<ul data-bbox="1298 1240 1490 1438" style="list-style-type: none"> • Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Kemenko Perekonomian • Bappenas • Pemda 	<table border="1" data-bbox="1505 1024 2422 1406"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Target</th> <th>Unit</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.</td> <td>Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</td> <td>Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Terbentuknya Lembaga Pengelola Kartu Prakerja</td> <td>1</td> <td>Lembaga</td> <td>Pusat</td> <td> <ul data-bbox="2252 1224 2422 1406" style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Bappenas </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana	4.	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi							Terbentuknya Lembaga Pengelola Kartu Prakerja	1	Lembaga	Pusat	<ul data-bbox="2252 1224 2422 1406" style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Bappenas
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana																																							
4.	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi																																											
		Terbentuknya Lembaga Pengelola Kartu Prakerja	1	Lembaga	Pusat	<ul data-bbox="1298 1240 1490 1438" style="list-style-type: none"> • Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Kemenko Perekonomian • Bappenas • Pemda 																																							
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Unit	Lokasi	K/L Pelaksana																																							
4.	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi																																											
		Terbentuknya Lembaga Pengelola Kartu Prakerja	1	Lembaga	Pusat	<ul data-bbox="2252 1224 2422 1406" style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemnaker • Kemenperin • Kemendikbud • Bappenas 																																							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020									
4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja																	
4.3.4 Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)																	
102.	Indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (perubahan data pada Tabel 4.30, Halaman IV.81 – IV.82)	No	Sasaran/Indikator	Satuan	2017¹⁾	2018¹⁾	2019¹⁾	2020¹⁾	No	Sasaran/Indikator	Satuan	2017¹⁾	2018¹⁾	2019¹⁾	2020¹⁾		
		1.	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	Persen	16,54	6,39	7,00 - 9,00	6,88 - 9,24	1.	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	Persen	16,54	6,39	7,00 - 9,00	4,30		
		3.	Nilai ekspor produk perikanan	Miliar USD	4,45	4,86	9,54	6,1 ^{*)}	3.	Nilai ekspor produk perikanan	Miliar USD	4,45	4,86	9,54 ^{*)}	6,17		
		4.	Kontribusi Ekspor Produk Industri	Persen	44,97	46,10	55,00 - 65,00	49,00 - 50,00 ^{*)}	4.	Kontribusi Ekspor Produk Industri	Persen	44,97	46,03	55,00 - 65,00	49,50		
		6.	Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif	Miliar USD	20,50 ^{**)}	21,00 ^{**)}	21,50	21,50 - 22,60	6.	Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif	Miliar USD	20,50 ^{**)}	21,00 ^{**)}	21,50	21,50 - 22,30		
		7.	Jumlah Wisatawan Nusantara	Juta Perjalanan	277	303,4 ^{b)}	308	312	7.	Jumlah Wisatawan Nusantara	Juta Perjalanan	270,8	303,4 ^{b)}	308	312		
		8.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Juta Orang	14,04	15,81	17,50 ^{c)}	18,50	8.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Juta Orang	14,04	15,81	16,4 ^{b)}	18		
		9.	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	Persen	2,49	2,68	2,60	2,79 - 3,11	9.	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	Persen	2,49	2,68	2,60	2,57		
		Sumber: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian; Berita Resmi Statistik BPS; Badan Ekonomi Kreatif (diolah oleh Bappenas); Neraca Pembayaran BI dan PDB ADHB BPS; Kementerian Perdagangan.								Sumber: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, Berita Resmi Statistik BPS, Badan Ekonomi Kreatif (IPEK), Neraca Pembayaran BI dan PDB ADHB BPS, Kementerian Perdagangan							
		Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target; ^{*)} Angka proyeksi berdasarkan perkiraan realisasi 2019; ^{b)} Angka proyeksi Kementerian Pariwisata hingga akhir 2018; ^{c)} Prognosa.								Keterangan: ^{*)} Realisasi, ^{**)} Target, ^{*)} Angka proyeksi Kementerian Pariwisata hingga akhir 2018, ^{b)} prognosa, ^{c)} Merupakan angka target, sedangkan prognosa senilai 5,50							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
103.	K/L pelaksana dari KP Peningkatan Efektivitas <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) dan Diplomasi Ekonomi (perubahan pada Tabel 4.31, Halaman IV.83)	3.	Peningkatan Efektivitas <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) dan Diplomasi Ekonomi	Mempercepat penyelesaian perundingan dan peningkatan pemanfaatan implementasi FTA					3.	Peningkatan Efektivitas <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) dan Diplomasi Ekonomi	Mempercepat penyelesaian perundingan dan peningkatan pemanfaatan implementasi FTA				
				Jumlah perundingan FTA yang diselesaikan	5	FTA	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag • BKPM • Kemenlu • Kemenperin • KKP • Kementan • Kemenpar • Kemen KUKM • Bekraf 			Jumlah perundingan FTA yang diselesaikan	5	FTA	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag • BKPM • Kemenlu • Kemenperin • KKP • Kementan • Kemenparekraf • Kemen KUKM
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								
104.	K/L pelaksana dari KP Pengelolaan Impor (perubahan pada Tabel 4.31, Halaman IV.84)	5.	Pengelolaan Impor	Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan impor					5.	Pengelolaan Impor	Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan impor				
				Pertumbuhan impor barang konsumsi	9,2	Persen	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag • Kemenkeu • Kemenperin • Kemenpar 			Pertumbuhan impor barang konsumsi	9,2	Persen	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag • Kemenkeu • Kemenperin • Kemenparekraf
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020									
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana		
105.	Target indikator dan K/L pelaksana dari KP Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif, (perubahan pada Tabel 4.31, Halaman IV.84)	7.	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif	Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif					7.	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif	Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif						
				Jumlah pameran wisata 10 DPP dan 10 destinasi branding	24	Pameran	Pusat	• Bekraf • Kemenpar • Kemenlu			Jumlah pameran wisata 10 DPP dan 10 destinasi branding	26	Pameran	Pusat	• Kemenparekraf • Kemenlu • Kemenkominfo		
				Jumlah misi penjualan 10 DPP dan 10 destinasi branding	37	Misi Penjualan	Pusat	• Kemenkominfo • Kemendag			Jumlah misi penjualan 10 DPP dan 10 destinasi branding	28	Misi Penjualan	Pusat	• Kemendag		
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019										
4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riel, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja																	
4.3.5 Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi																	
106.	Target indikator Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (perubahan data pada Tabel 4.32, Halaman IV.85)	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}		
		Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi								Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
		1.	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan/PDB	Persen	4,20	4,15	4,19	4,22-4,23		1.	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan/PDB	Persen	4,20	4,15	4,19	4,23	
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target									

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi
107.	Target Indikator dari KP Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan (perubahan data pada Tabel 4.33, Halaman IV.86)	1.	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Meningkatnya pendalaman sektor keuangan.				1.	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Meningkatnya pendalaman sektor keuangan.				
				Rasio M2/PDB	40,1 - 40,9	Persen	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kemendagri • Kemenkeu 			Rasio M2/PDB	40,4	Persen	Pusat
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							
108.	K/L Pelaksana dari KP Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan <i>Industry 4.0</i> (perubahan data pada Tabel 4.33, Halaman IV.87)	2.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan <i>Industry 4.0</i>	Berkembangnya teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan				2.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan <i>Industry 4.0</i>	Berkembangnya teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan				
				Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500	Orang	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenperin • Bekraf • Kemenkominfo • Kemenpar 			Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500	Orang	Pusat
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
109.	K/L Pelaksana dari KP Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan (perubahan data pada Tabel 4.33, Halaman IV.87)	4.	Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan	2.845	Perusahaan	Pusat	• Kemenpar • Kemenperin • BSN	4.	Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan	2.845	Perusahaan	Pusat	• Kemenparekraf • Kemenperin • BSN
				Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	2.845	Perusahaan	Pusat	• Kemenpar • Kemenperin • BSN			Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	2.845	Perusahaan	Pusat	• Kemenparekraf • Kemenperin • BSN
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							
110.	K/L pelaksana dari KP Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital (perubahan data pada Tabel 4.33, Halaman IV.88)	5.	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data serta informasi perkembangan ekonomi, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	2	Database	Pusat	• Bekraf • BPS	5.	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data serta informasi perkembangan ekonomi, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	2	Database	Pusat	• Kemenparekraf • BPS
				Data statistik ekonomi kreatif yang sesuai standar	2	Database	Pusat	• Bekraf • BPS			Data statistik ekonomi kreatif yang sesuai standar	2	Database	Pusat	• Kemenparekraf • BPS
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
111.	Target Indikator dari KP Reformasi Fiskal (perubahan data pada Tabel 4.33, Halaman IV.88)	5. Reformasi Fiskal						5. Reformasi Fiskal							
		Terlaksananya reformasi fiskal						Terlaksananya reformasi fiskal							
				Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>)	13,8	Persen	Pusat	• Kemenkeu			Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>)	1,5	Persen	Pusat	• Kemenkeu
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							
4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja															
4.3.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan															
112.	Kerangka regulasi pada PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi (perubahan pada halaman IV.89)	1) KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital: percepatan penyusunan Undang – Undang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Integrated Tourism Master Plan</i> .						1) KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital: percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Integrated Tourism Master Plan</i> .							
113.		<p>KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi:</p> <p>Untuk perbaikan iklim usaha, diperlukan penyusunan (1) Revisi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Peraturan-peraturan teknis sebagai amanat Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p>						<p>KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk perbaikan iklim usaha, diperlukan revisi (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. • Untuk meningkatkan investasi, diperlukan inventarisasi, pendalaman, dan revisi regulasi yang mengatur pelayanan investasi yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. <p>Untuk memfasilitasi kemudahan usaha dan meningkatkan investasi, diperlukan pendekatan <i>omnibus law</i> perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan.</p>							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
114.	Perubahan kerangka regulasi pada PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM (perubahan pada halaman IV.89)	Untuk mendukung pencapaian PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM diantaranya dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi. Kerangka regulasi yang diperlukan adalah mengkaji dan merevisi regulasi yang menghambat pengembangan usaha koperasi dan memberikan landasan hukum pada kegiatan koperasi model baru yang inovatif, seperti koperasi pekerja dan koperasi <i>startup</i> .	Untuk memperkuat kewirausahaan dan UMKM, diperlukan pendekatan <i>omnibus law</i> yang meliputi penyerderhanaan, pencabutan, dan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan UMKM. Sementara itu, untuk mendukung strategi peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi diperlukan pengkajian ulang, revisi, dan penyusunan regulasi terkait perkoperasian sebagai landasan hukum untuk mengembangkan koperasi model baru yang inovatif, seperti koperasi pekerja dan koperasi <i>start-up</i> .
115.	Kerangka regulasi pada PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja (penambaha pada halaman IV.90)	-	Untuk memperbaiki iklim investasi dan mendorong lebih banyak penciptaan lapangan kerja diperlukan pendekatan <i>omnibus law</i> untuk mensinergikan regulasi terkait kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan dan perlindungan UMKM, serta pengembangan kawasan ekonomi.

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup															
4.4.1 Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan															
116.	Perubahan Target PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Tabel 4.35 (perubahan pada hal IV.93)	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{*)}	2020^{*)}	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{*)}	2020^{*)}
		1.	Meningkatnya produksi pangan						1.	Meningkatnya produksi pangan					
			Persentase Pertumbuhan produksi jagung	Persen	22,5	4,2	3	3,9		Persentase Pertumbuhan produksi jagung	Persen	22,5	4,2	3	28,2
		2.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan						2.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan					
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persen	N/A	N/A	N/A	10		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persen	N/A	N/A	N/A	70		
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							
117.	Tabel 4.36 Perubahan Sasaran, Indikator, Satuan, Lokasi dan K/L Pelaksana pada KP dari PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam tabel 4.36 (perubahan pada halaman IV.94)	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		1.	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan					1.	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan				
				Jumlah konsumsi daging	7,1	Kg/Kapita/Tahun	34 Provinsi	Kementan			Jumlah konsumsi daging	12,93	Kg/Kapita/Tahun	34 Provinsi	Kementan
				Keterjangkauan pangan lokal untuk anak sekolah	35	Persen	34 Provinsi	• Kementan • Kemen-dikbud • Kemenkes • Kemen-dagri			Jumlah konsumsi protein asal ternak	10,65	Gram/Kapita/Hari	34 Provinsi	Kementan, KKP, Kemenkes
									Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang	10-20	Persen Penerima BPNT	Provinsi	Kementan, Kemensos, Kemenkes		

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		3.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Hasil Laut						3.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Hasil Laut				
			Jumlah produksi rumput laut	10,99	Juta ton	34 Provinsi	KKP			Jumlah produksi rumput laut	10,99	Juta ton	25 Provinsi	KKP		
			Jumlah kapal perikanan yang terbangun	30	Unit	5 Provinsi	KKP			Jumlah kapal perikanan yang terbangun	30	Unit	6 Provinsi	KKP		
			Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dioptimalkan	13	Lokasi	13 Lokasi	KKP			Luas lahan garam yang difasilitasi	600	Hektare	8 Provinsi	• KKP • BIG		
			Luas lahan garam yang difasilitasi	600	Hektar	9 Provinsi	• KKP • BIG	4.	Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian	Meningkatnya Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pertanian						
		4.	Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian	Meningkatnya Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pertanian								Nilai tambah tenaga kerja pertanian	36,19	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja/ Tahun	34 Provinsi	Kementan
			Nilai tambah tenaga kerja pertanian	28	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja/ Tahun	34 Provinsi	Kementan			Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap penelitian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	65-80	Persen	34 Provinsi	• Kementan • LIPI • BPPT		
			Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap penelitian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	80	Persen	34 Provinsi	• Kementan • LIPI • BPPT	5.	Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian	Terlaksananya upaya peningkatan produktivitas dan perlindungan sumber daya pertanian						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		6. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Sistem pangan terkelola dengan baik						Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	30 (tanaman) 8 (ternak)	Varietas Unggul Baru Galur	34 Provinsi	Kementan
		<i>Food Global Security Index</i>	56,9	Nilai	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • KLHK • BPOM • Kemendag 		Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	4.250	Aksesi	34 Provinsi	Kementan	
		Tingkat pemborosan pangan	250	Kg/Kapita/Tahun	5 Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemkes • Kemenpar • BPOM 	6. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Sistem pangan terkelola dengan baik					
		Tingkat susut produksi pangan	20	Persen	15 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemendag • Kemenperin • BPS 		<i>Global Food Security Index</i>	56,9	Nilai	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • KLHK • BPOM • Kemendes • Kemendag • BPS 	
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Data belum tersedia								Tingkat pemborosan pangan	8	%	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemkes • Kemenpar • BPOM 	
								Tingkat susut produksi pangan	7	Persen	15 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemendag • Kemenperin • BPS 	
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Data belum tersedia													

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020										
4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup																	
4.4.2 Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air																	
118.	Tabel 4.37 Perubahan Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dalam Tabel 4.37 (perubahan pada halaman IV.99)	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{*)}	2020^{*)}	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{*)}	2020^{*)}		
		1.	Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi							1.	Tertatanya hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi						
			Luas kawasan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi	Juta hektare	N/A	N/A	N/A	65		Luas identifikasi pemetaan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	Juta hektare	N/A	N/A	N/A	65		
			Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibangun	Unit	99	170	200	352		Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kategori maju	Unit	N/A	N/A	N/A	20		
		2.	Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS								Jumlah kawasan konservasi yang dimantapkan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitasnya	Unit KK	N/A	N/A	N/A	552	
			Jumlah DAS yang dibangun rencana indikasi program berbasis DAS	DAS	N/A	N/A	N/A	34		Luas inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Juta hektare	N/A	N/A	N/A	65		
		3.	Terbangunnya waduk multiguna								Luas penetapan/pemantapan kawasan hutan terutama pada kawasan konservasi	Juta Hektare	N/A	N/A	N/A	1	
			Jumlah waduk multiguna yang dibangun	Unit Waduk	34	38	36	41		2.	Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS						
		4.	Terkelolanya sistem irigasi secara modern								Jumlah Sistem Data dan Informasi DAS terintegrasi dan realtime	Sistem	N/A	N/A	N/A	1	
			Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola secara modern	Daerah Irigasi	N/A	N/A	N/A	7		3.	Terbangunnya waduk multiguna						
		Sumber: Kementerian PPN/Bppenas (diolah), 2019															
		Keterangan: *) Realisasi; **) Target															

PERIHAL		RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				
NO		Jumlah wilayah sungai prioritas yang direstorasi kawasannya	4	Wilayah sungai	3 Provinsi	Kemen PUPR	<i>dihapus</i>				
3.	Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna	Pembangunan bendungan dan bangunan penampang air lainnya	5	Bendungan	5 Provinsi	Kemen PUPR	Pembangunan bendungan dan bangunan penampang air lainnya	45	Bendungan	18 Provinsi	Kemen PUPR
		Jumlah bendungan baru yang dibangun	5	Bendungan	5 Provinsi	Kemen PUPR	Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan (<i>on going</i>)	45	Bendungan	18 Provinsi	Kemen PUPR
		Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan (<i>on going</i>)	36	Bendungan	20 Provinsi	Kemen PUPR	Jumlah embung dan bangunan penampang air lainnya yang dibangun	70	Embung	23 Provinsi	Kemen PUPR
		Jumlah embung dan bangunan penampang air lainnya yang dibangun	11	Embung	5 Provinsi	Kemen PUPR	Penambahan fungsi dan pemanfaatan bendungan eksisting				
		Penambahan fungsi bendungan eksisting					Jumlah bendungan eksisting yang mengalami penambahan fungsi air baku	4	Unit	3 Provinsi	Kemen PUPR
		Jumlah bendungan eksisting yang mengalami penambahan fungsi air baku	5	Unit	5 Provinsi	Kemen PUPR	Jumlah bendungan eksisting yang mengalami penambahan fungsi listrik	1	Unit	Jawa Barat	Kemen PUPR

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				
		Pelaksanaan pemeliharaan bendungan					Pelaksanaan peningkatan keamanan bendungan				
		Jumlah bendungan yang dikelola dan ditingkatkan keamanan dan fungsinya	134	Bendungan	11 Provinsi	Kemen PUPR	Jumlah bendungan yang dikelola dan ditingkatkan keamanan	43	Bendungan	13 Provinsi	Kemen PUPR
		Pelaksanaan bendungan yang direhabilitasi					Pelaksanaan bendungan yang direhabilitasi				
		Jumlah bendungan yang direhabilitasi	1	Bendungan	Jawa Tengah	Kemen PUPR	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	2	Bendungan	Jawa Tengah, Kalimantan Timur	Kemen PUPR
4.	Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (<i>Smart Water Management</i>)	Peningkatan efisiensi pengelolaan air menggunakan teknologi					Peningkatan efisiensi pengelolaan air menggunakan teknologi				
		Jumlah wilayah sungai yang memiliki sistem pemantauan kualitas air	64	Wilayah Sungai	30 Provinsi	Kemen PUPR	Jumlah unit teknologi <i>smart water management</i>	2	Unit	Pusat	Kemen PUPR
5	Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan					Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan				
		Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun	0,08	Juta Ha	17 Provinsi	Kemen PUPR	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun	15.000	Ha	20 Provinsi	Kemen PUPR
		Jumlah bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun	10	Unit	5 Provinsi	Kemen PUPR	Jumlah bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun	5	Unit	4 Provinsi	Kemen PUPR
		Luas jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau ditingkatkan	0,29	Juta Ha	24 Provinsi	Kemen PUPR	Luas jaringan irigasi permukaan	80.000	Ha	24 Provinsi	Kemen PUPR

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Jumlah KK yang terlayani tangki septik	1.455	KK	Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Disperkim Prov. Jawa Barat 					Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	
			Jumlah biogas limbah ternak yang terbangun	100	Unit	Kertasari	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • DLH Kab Karawang • Dinas Pertanian Kab Bandung • Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat • Dinas Perikanan dan Peternakan Kab Bandung Barat • Dinas Pertanian Kab Bekasi • DLH Kab Bandung Barat 					Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Penda
			Jumlah biogas limbah ternak yang terbangun	100	Unit	Kertasari							<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Penda
			Jumlah rumah kompos limbah ternak yang terbangun	12	Titik	Tersebar di DAS Citarum							<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Penda
			Kapasitas pengelolaan sampah: 30% kenaikan cakupan pelayanan										
			Jumlah unit TPST yang terbangun	1	Unit	Kota Bandung							<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Jumlah rumah kompos limbah ternak yang terbangun	12	Titik	Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan, Dinas Pertanian Kab Bandung • Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat 					<ul style="list-style-type: none"> • Pemda • Kemen PUPR • Pemda 	
			Kapasitas pengelolaan sampah: 30% kenaikan cakupan pelayanan										
			Jumlah unit TPST (20-30 ton/hari) yang terbangun	274	Unit	Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Disperkim Prov Jawa Barat 					<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Pemda 	
			Jumlah unit TPST (10-30 ton/hari) yang terbangun	10	Unit	Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • DLH Kab Bandung 					<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Pemda 	
			Jumlah TPS3R yang terbangun	295	Unit	Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • DLH Kota Bandung • DLH Kab Cianjur 						
			a. Jumlah TPST Penanganan Sampah Sungai yang terbangun	1	Unit	Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • DLH Kab Bandung 						
			Jumlah TPS3R yang terbangun	4	Unit						Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda • Kemen PUPR • Pemda 	
			Jumlah TPST Penanganan Sampah Sungai yang terbangun	1	Unit						Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Pemda 	
			Jumlah unit TPST POO, TPST PDU yang terbangun	25	Unit						Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Pemda 	
			Jumlah unit rumah kompos sampah yang terbangun	10	Unit						Tersebar di DAS Citarum	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR • Pemda 	
			Pengurangan skor genangan: 15%										
			Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	20,66	Km						Sepanjang Sungai Citarum	Kemen PUPR	
			Panjang kanal banjir yang dibangun	1	Km						Sepanjang Sungai Citarum	Kemen PUPR	
			Panjang sungai yang direstorasi dan dipelihara	95	Km						Sepanjang Sungai Citarum	Kemen PUPR (BBWS Citarum)	
			Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019										

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					
				Jumlah unit TPST POO, TPST PDU yang terbangun	25	Unit	Tersebar di DAS Citarum	• Kemen PUPR • DLH Kota Bandung				
		Jumlah unit rumah kompos sampah yang terbangun	10	Unit	Tersebar di DAS Citarum	• Kemen PUPR • DLH Prov Jawa Barat						
		Pengurangan skor genangan: 15%										
		Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan	21,6	Km	Sepanjang Sungai Citarum	Kemen PUPR (BBWS Citarum)						
		Panjang kanal banjir yang dibangun	5,31	Km	Sepanjang Sungai Citarum	Kemen PUPR (BBWS Citarum)						
		Panjang sungai yang direstorasi dan dipelihara	1,3125	Km	Sepanjang Sungai Citarum	Kemen PUPR (BBWS Citarum)						
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019												

4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

4.4.3 Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT

120.	Sasaran dan Indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT pada tabel	Sasaran/ Indikator						Sasaran/ Indikator							
		No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)
		2	Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien					2	Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien						
			Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1.012	1.064	1.200	1.310		Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1.012	1.064	1.200	1.161

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					
	4.39 (perubahan pada halaman IV.106)	3 Meningkatkan Efisiensi Energi						3 Meningkatkan Efisiensi Energi					
		Intensitas Energi Primer/Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah)	SBM/Miliar Rupiah	434	428,6	424	421 /226,7	Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/Miliar Rupiah	N/A	N/A	N/A	0,9
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target					
121.	Perubahan sasaran dan indikator KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT pada tabel 4.40 (perubahan pada halaman IV.107)	No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana						No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana					
		1.	Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan	Meningkatkan pembangunan pembangkit ET					1.	Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan	Meningkatkan pembangunan pembangkit ET		
			Pembangunan PLT EBT (Kumulatif)	10.944	MW	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha		Pembangunan PLT Panas Bumi	2.273	MW	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha
		Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BBN						Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BBN					
			Jumlah produksi bahan bakar nabati	10	Juta KL	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha		Pembangunan PLT Bioenergi	1.922,5	MW	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha
			Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel terhadap BBM Jenis Minyak Solar	30	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha		Pembangunan PLT ET Lainnya	6.949,7	MW	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha
		Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BBN						Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BBN					
		2.	Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik	Memperluas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan tenaga listrik yang efisien					Jumlah produksi biofuel	9	Juta KL	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
				Peningkatan implementasi SKEM (tambahan)	3	Peralatan	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM	4.	Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi	Meningkatnya implementasi efisiensi energi		
		Pengembangan Industri Pendukung EBT	Meningkatnya kandungan komponen dalam negeri yang digunakan untuk infrastruktur EBT						Jumlah Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaatan energi	3	Peralatan	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM
		TKDN PLT Panas Bumi	33	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha			Meningkatnya kandungan komponen dalam negeri yang digunakan untuk infrastruktur EBT				
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							TKDN PLT Panas Bumi	30	Persen	Tersebar di Seluruh Indonesia	• Kemen ESDM • Badan Usaha
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019				

4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

4.4.4 Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

122.	Perubahan Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada tabel 4.41 (perubahan pada halaman IV.109)	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)
		1.	Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan							1.	Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan				
		a.	Indeks kualitas air	Nilai	58,68 ^{o)}	51,01 ^{o)}	55	73	a.	Indeks kualitas air	Nilai	58,68 ^{o)}	51,01 ^{o)}	55	55,1
		b.	Indeks kualitas udara	Nilai	87,03 ^{o)}	84,76 ^{o)}	84	84	b.	Indeks kualitas udara	Nilai	87,03 ^{o)}	84,76 ^{o)}	84	84,1
		c.	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	56,88 ^{o)}	61,03 ^{o)}	62	62,5	c.	Indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	Nilai	56,88 ^{o)}	61,03 ^{o)}	62	61,6

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		d. Indeks kualitas air laut	Nilai	N/A	N/A	N/A	59,5	d. Indeks kualitas air laut	Nilai	N/A	N/A	N/A	58,5			
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								
123.	Perubahan Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada tabel 4.42 (perubahan pada halaman IV.110)	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	
		1.	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup						1.	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
				Persentase penurunan luas hutan/ lahan yang terbakar	10	Persen	Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KLHK				Persentase penurunan luas hutan/ lahan yang terbakar	2	Persen	Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	KLHK
				Jumlah pelayanan prediksi dan peringatan dini cuaca dengan <i>Scaling Up Weather Capacity II</i>	34	Provinsi	34 Provinsi	BMKG				Akurasi informasi meteorologi	76	Persen	34 Provinsi	BMKG
		Jumlah pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	34	Provinsi	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> KLHK Pemda 					Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku utama lingkungan hidup	1.668	Unit usaha/Kegiatan	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> KLHK Pemda Swasta 	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
			Jumlah tersedianya informasi data kualitas air sungai, danau, dan laut untuk <i>early warning system</i> pencemaran dan kerusakan lingkungan	71	Lokasi	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Pemda 			Jumlah stasiun pemantauan kualitas air dan udara secara kontinyu untuk <i>early warning system</i> pencemaran dan kerusakan lingkungan .	126	Unit	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Pemda
	2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup							2. Penanggulan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup				
		Persentase peningkatan kualitas fungsi ekosistem pesisir dan laut	17,5	Persen	Pusat	KLHK				Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	64,80	Juta Ton	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • KPUPR • Kemenko maritim • Pemda
		Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun.	80	Kabupaten /Kota	34 Provinsi	KLHK			Jumlah limbah B3 yang dikelola	99,19	Juta Ton	34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Kemen perin • KESDM • Kemendes 	
		Jumlah sampah yang tertangani di TN/KK/ destinasi wisata prioritas pesisir dan laut sebesar 63.000 ton dalam 5 tahun	21.000	Ton	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • KKP 			3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup				

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
			Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan medis	5	Unit	5 Provinsi	KLHK			Luas ekosistem gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	301.800	Ha	10 Provinsi	KLHK (Badan Restorasi Gambut)	
			Jumlah fasilitas pengolahan emas non merkuri di PESK yang memiliki izin	5	Unit	5 Provinsi	KLHK			Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terhabilitasi	16	Lokasi	11 provinsi	KKP	
3.	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup								Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	25	Jenis	Pusat	• KLHK • LIPI	
			Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut	300.000	Ha	7 Provinsi	KLHK (Badan Restorasi Gambut)			Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan	260.000	Ton	34 Provinsi	• KLHK • Swasta	
			Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	77,50	Ha	4 Provinsi	KLHK			Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	8	Kawasan	7 Provinsi	KKP	
			Luas kawasan konservasi perairan baru	700.000	Ha	3 Lokasi	KKP	4.	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup					
			Jumlah kawasan pesisir yang terhabilitasi	16	Lokasi	6 provinsi	KKP								

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		8	Lokasi	7 Provinsi	KKP	34	Persen	34 Provinsi	KLHK				
		Jumlah kawasan pesisir yang di restorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran											
		Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah	2	Persen	Pusat								
4.	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup											
		Persentase ketaatan penegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan Kkehutanan	65	Persen	34 Provinsi								
		Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk pembangan liar, kebakaran hutan dan lahan, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	120	Kasus	34 Provinsi								
		Persentase penegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	219	Kasus	34 Provinsi								
		Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	1,7	Juta hektare	34 Provinsi								
		Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman											

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																															
					Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan	17	Gugatan	34 Provinsi	KLHK																																														
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																																																					
124.	Aspek Kewilayahan	PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini						PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini																																															
4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup																																																							
4.4.5 Program Prioritas Penguatan Ketahanan Bencana																																																							
125.	Perubahan Sasaran dan Indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana pada Tabel 4.43 (Perubahan pada halaman IV.113)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017*)</th> <th>2018*)</th> <th>2019**)</th> <th>2020**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Indikator Baru</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)	1.	Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana							<i>Indikator Baru</i>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017*)</th> <th>2018*)</th> <th>2019**)</th> <th>2020**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat</td> <td>Menit</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>5,0</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)	1.	Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana							Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Menit	N/A	N/A	N/A	5,0
		No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)																																															
1.	Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana																																																						
	<i>Indikator Baru</i>																																																						
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017*)	2018*)	2019**)	2020**)																																																	
1.	Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana																																																						
	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Menit	N/A	N/A	N/A	5,0																																																	
Sumber: a) BNPB, 2016-2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Sumber: a) BNPB, 2016-2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target																																																	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi
126.	Perubahan Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana pada tabel 4.44 (perubahan pada halaman IV.114)	2.	Penguatan Peringatan Dini Bencana	Terwujudnya sistem peringatan dini bencana terpadu				2.	Penguatan Peringatan Dini Bencana	Terwujudnya sistem peringatan dini bencana terpadu				
				<i>Indikator Baru</i>							Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidro-meteorologis dan tektonis	90	Persen	34 Provinsi
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019						
127.	4.46 Kerangka Regulasi (perubahan pada halaman IV.116)	Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah Rancangan Peraturan Presiden Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi Petani.						Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah Rancangan Peraturan Presiden Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi Petani. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan turunan lainnya dari undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, yaitu peraturan terkair pendayagunaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, serta sistem informasi sumber daya air; Kerangka kelembagaan Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung PN ketahan pangan air dan lingkungan hidup: 1. Penataan tugas, fungsi, dan peningkatan kapasitas mengelola bendungan untuk mendukung tercapainya pengelolaan bendungan yang bersifat multiguna, terutama menjamin terlaksananya operasi dan pemeliharaan bendungan yang berkelanjutan; 2. Penataan tugas, fungsi, dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi dan sinergi sistem pengelolaan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan kerja sama multi pihak antar kementerian, level pemerintahan, dan petani						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
BAB 4. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL															
4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan															
128.	Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan (Perubahan pada tabel 4.45 Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, Indikator Sasaran pada halaman IV.116)	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017^{a)}	2018^{b)}	2019^{c)}	2020^{c)}	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017^{a)}	2018^{b)}	2019^{c)}	2020^{c)}
		1.	Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat						1.	Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat					
			<i>Crime Rate</i>	Orang/100.000 penduduk	129 ^{b)}	129 ^{b)}	129	128 ^{b)}		<i>Crime Rate</i>	Orang/100.000 penduduk	129 ^{b)}	129 ^{b)}	129	129 ^{b)}
		2.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri						2.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri					
			Indeks pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	Nilai	90.50 ^{a)}	92,46 ^{a)}	84.23	84.23 ^{a)}		Indeks pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	Nilai	N/A ^{***)}	N/A ^{***)}	N/A ^{***)}	86 ^{a)}
Sumber: a) Global Firepower 2018 (diolah); b) Statistik Kriminal 2018; c) Kementerian Luar Negeri Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Target tentatif menunggu penyesuaian formulasi terbaru								Sumber: a) Global Firepower 2018 (diolah); b) Statistik Kriminal 2018; c) Kementerian Luar Negeri Keterangan: *) Realisasi; **) Target; Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Metode Perhitungan Baru							
4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan															
4.5.1 Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan															
129.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan (perubahan data pada tabel 4.47 target 1.c halaman IV.118)	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
		1.	Peningkatan Kekuatan Pertahanan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista					1.	Peningkatan Kekuatan Pertahanan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista				
				Jenis sarana-prasarana pertahanan yang dibangun	10	Jenis	Pusat	Kemenhan			Jenis sarana-prasarana pertahanan yang dibangun	13	Jenis	Pusat	Kemenhan
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana
130.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan (perubahan data pada Tabel 4.47 di target dan indikator dan penyesuaian nomenklatur indikator halaman IV.118)	3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar					3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar				
				Jumlah pos pengamanan perbatasan (Pamtas) yang dibangun	9	Bangunan	NTT, Papua	Kemenhan			Jumlah pos pengamanan perbatasan (Pamtas) yang dibangun	12	Pos	Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua	Kemenhan
				Jumlah Pos TNI AL (Posal) yang dibangun	16	Bangunan	Papua	Kemenhan			Jumlah Pos TNI AL (Posal) yang dibangun	15	Kegiatan	Pusat	Kemenhan
				Jumlah masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem hankam yang difasilitasi pemberdayaan	150	Orang	Pusat	BNPP			Jumlah masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem hankam yang difasilitasi pemberdayaan	180	Orang	Pusat	BNPP
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020									
4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 4.5.2 Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional																
131.	Indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional (Perubahan pada tabel 4.48 Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, Indikator Sasaran pada halaman IV.120)	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{a)}	2018^{a)}	2019^{a,b)}	2020^{a,b)}	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{a)}	2018^{a)}	2019^{a,b)}	2020^{a,b)}	
		1.	Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia							1.	Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia					
			Persentase Kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral dan regional	Persen	94.55	120.37	95	95.67 ^{***)}			Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	Forum	N/A ^{****)}	N/A ^{****)}	N/A ^{****)}	10 ^{a)}
			Persentase Kemajuan perundingan perbatasan	Persen	100	98,11	100	100 ^{***)}			Indeks Kemajuan Perundingan Perbatasan Maritim	Nilai	N/A ^{****)}	N/A ^{****)}	N/A ^{****)}	32.9 ^{a)}
		2.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri							2.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri					
			Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri	Nilai	80.62 ^{a)}	77.38 ^{a)}	78.39	78.39 ^{***)}			Persentase Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri	Persen	N/A ^{***)}	N/A ^{***)}	N/A ^{***)}	34.4 ^{b)}
			Persentase Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Nilai	118.66 ^{a)}	123.34 ^{a)}	100	100 ^{***)}			Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	Persen	N/A ^{****)}	N/A ^{****)}	N/A ^{****)}	12.9 ^{b)}
			Persentase Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Nilai	95.76 ^{a)}	116.62 ^{a)}	88.5	88.5 ^{***)}			Persentase Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	Persen	N/A ^{****)}	N/A ^{****)}	N/A ^{****)}	21.50 ^{b)}
		Sumber: a) Kementerian Luar Negeri; b) Kementerian PPN/Bappenas; Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) target tentatif menunggu penyesuaian formulasi terbaru							Sumber: a) Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024; b) Kementerian Luar Negeri Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Metode Perhitungan Baru; ****) Indikator Baru.							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
				Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional	87	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu			Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri				
				Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan atau regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI	89	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu			Persentase Kerja Sama di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Ditanda-tangani	21.5	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
				Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas <i>Public Awareness Campaign</i> perlindungan WNI	89	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu			Persentase Standar/ Panduan Teknis di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang diterapkan	17.2	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
				Persentase respon positif pemberdayaan kelompok masyarakat dalam kerangka perlindungan WNI di luar negeri	89	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu			Persentase Produk Hukum Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Disahkan	21.5	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
											Persentase SDM K/L/I/ Perwakilan RI yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	17.2	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
											Persentase Kertas Kerja Analisa Pelayanan dan Pelindungan WNI	8.6	Persen	Pusat Perwakilan	Kemenlu
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019															

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020										
								dan BHI di Luar Negeri yang Dihasilkan					
								Persentase Rekomendasi Kemenlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan Internasional	30.1	Persen	Pusat Perwakilan		Kemenlu
								Persentase Rekomendasi Kemenlu yang Diterima dalam Kebijakan / Regulasi Nasional terkait Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	30.1	Persen	Pusat Perwakilan		Kemenlu
								Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas <i>Public Awareness Campaign</i> (PAC) Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	25.8	Persen	Pusat Perwakilan		Kemenlu
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019													

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Jumlah Satker yang Didam-pingi Pemba-ngunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	31	Satker	Pusat	Kejaksaan		Jumlah pemerintah Provinsi yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Daerah I	7	Provinsi	Daerah	ANRI
			Jumlah Sosialisasi Revisi Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	31	Kegiatan	Pusat	Kejaksaan		Jumlah pemerintah Provinsi/ kab/kota yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Daerah II	8	Provinsi/ kab/kota	Daerah	ANRI
			Jumlah Angkatan Peserta Diklat Pemulihan Aset	4	Angkatan	Pusat	Kejaksaan		Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	10	Instansi Pemerintah	Pusat	ANRI
			Jumlah Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait Perkara	20	Laporan	Pusat	Kejaksaan		Jumlah unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/ WBBM di wilayah I	165	Unit Kerja	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB
			Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	1	Laporan	Pusat	KPK		Jumlah unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/ WBBM di wilayah II	165	Unit Kerja	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB
			Jumlah Laporan <i>Monitoring</i> Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	2	Laporan	Pusat	KPK						
			Jumlah UKPEJ yang Mencapai Maturitas (level 3)	100	UKPEJ	Pusat dan Daerah	LKPP						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
			Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset	15	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	ANRI			Jumlah unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM di wilayah III	165	Unit Kerja	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB
			Jumlah Unit Kerja yang Dievaluasi untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	495	Unit Kerja	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB			Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah I	217	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB
			Jumlah Instansi Pemerintah yang Diberikan Asistensi dan Dievaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	616	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB			Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah I	217	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB
			Jumlah Instansi Pemerintah yang Mengimplementasikan Integritas ASN	100	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB			Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah II	189	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB
			Jumlah Instansi Pemerintah yang Diawasi Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	150	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	KASN			Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah II	189	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB
			Jumlah Rekomendasi atas Pelaksanaan Seleksi JPT di	1500	Rekomendasi	Pusat dan Daerah	KASN							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Instansi Pemerintah					Jumlah IP yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah III	210	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB	
			Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta Pemantauan dan Evaluasi	1	Sistem Terintegrasi	Pusat dan Daerah	Kemen-PPN/Bappenas						
			Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi	72	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	ANRI	Jumlah IP yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah III	210	Instansi Pemerintah	Pusat dan Daerah	Kemen-PANRB	
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Jumlah IP yang telah mengimplementasikan pmbangunan integritas ASN	60	Instansi Pemerintah	Pusat	Kemen-PANRB
								Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah	1500	Rekomendasi	Pusat	KASN	
								Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi di Pemerintah Pusat	36	Instansi Pusat	Pusat	ANRI	
								Jumlah Pemerintah Provinsi Kab/Kota yang Mene-	18	Kab/Kota	Daerah	ANRI	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				
			rapkan c-Arsip Terintegrasi di kearsipan daerah I				
			Jumlah Pemerintah Provinsi Kab/Kota yang Menerapkan c-Arsip Terintegrasi di kearsipan daerah II	21	Kab/Kota	Daerah	ANRI
			Rekomendasi hasil pembinaan SPP dan manajemen resiko Bidang ekonomi dan keuangan	7	LHP	Pusat	BPKP
			Rekomendasi hasil pembinaan SPP dan manajemen resiko bidang pangan, pengelolaan energi dan sumber daya alam	5	LHP	Pusat	BPKP
			Rekomendasi hasil pembinaan SPP dan manajemen resiko bidang infrastruktur, tata ruang dan perhubungan	4	LHP	Pusat	BPKP
			Rekomendasi hasil pembinaan SPP dan manajemen resiko bidang ekonomi kreatif, perdagangan dan kctnagakerjaan	4	LHP	Pusat	BPKP

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					
				Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko bidang kerjasama investasi dan pembiayaan pembangunan	3	LHP	Pusat	BPKP
				Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko bidang politik dan penegakan hukum	17	LHP	Pusat	BPKP
				Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko bidang sosial dan penanganan bencana	7	LHP	Pusat	BPKP
				Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko bidang pengembangan SDM dan kebudayaan	8	LHP	Pusat	BPKP
				Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan reformasi birokrasi	13	LHP	Pusat	BPKP

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																					
									Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko bidang badan usaha konektivitas, pariwisata, Kawasan industri dan perumahan	8	LHP	Pusat	BPKP																																
									Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko pelaksanaan pengawasan tata kelola pemerintah daerah	4	LHP	Pusat	BPKP																																
									Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko bidang hankam	9	LHP	Pusat	BPKP																																
									Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen resiko di daerah	1143	LHP	Pusat dan Daerah	BPKP																																
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																																													
135.	<p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi</p> <p>(Perubahan data pada Tabel 4.51 sasaran, indikator, target, dan satuan pada halaman IV.125)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Penataan Biaya Politik</td> <td colspan="5">Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase Program Siaran berindeks di atas 3</td> <td>75</td> <td>Persen</td> <td>Pusat</td> <td>Komisi Penyiaran Indonesia</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	5	Penataan Biaya Politik	Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik							Persentase Program Siaran berindeks di atas 3	75	Persen	Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Penataan Biaya Politik</td> <td colspan="5">Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3</td> <td>7</td> <td>TV</td> <td>Pusat</td> <td>Komisi Penyiaran Indonesia</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	5	Penataan Biaya Politik	Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik							Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	7	TV	Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																							
5	Penataan Biaya Politik	Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik																																											
		Persentase Program Siaran berindeks di atas 3	75	Persen	Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia																																							
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																							
5	Penataan Biaya Politik	Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik																																											
		Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	7	TV	Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia																																							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
				Jumlah Provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 70 (kategori baik)	24	Provinsi	Pusat dan Daerah	Dewan Pers			Persentase Provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73	78	Persen
		Persentase sengketa informasi terdaftar yang diselesaikan	80	Persen	Pusat	Komisi Informasi Pusat			Jumlah regulasi/ kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D	2	Dokumen	Pusat	Ditjen IKP Kemkominfo
		Persentase terbentuknya PPID di Provinsi dan Kabupaten/ Kota	100	Persen	Pusat dan Daerah	Ditjen IKP Kemkominfo			Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun Berjalan yang Belum Diselesaikan	72	Sengketa	Pusat	Komisi Informasi Pusat
		Persentase pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi	75	Persen	Pusat dan Daerah	Komisi Informasi Pusat			Jumlah Badan Publik yang Informatif	35	Badan Publik	Pusat	Komisi Informasi Pusat
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019						

4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

4.5.4 Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

136.	Tabel 4.52 Sasaran dan Indikator PP Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut (perubahan data indikator pada halaman IV.131)	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾
		1	Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat						1	Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat					
			Skor <i>Global Terrorism Index</i>	Nilai	4,54	4,54 ⁽²⁾	4,54 ⁽²⁾	4,3		Skor <i>Global Terrorism Index</i>	Nilai	4,54	4,54 ⁽²⁾	4,54 ⁽²⁾	4,44
		2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber						2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020									
			Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> Indonesia ^{b)}	Nilai	0,42	0,78	0,80	0,83			Skor <i>Global Cybersecurity Index</i> Indonesia ^{b)}	Nilai	0,42	0,78	0,78	0,79	
		3	Meningkatnya keamanan laut								3	Meningkatnya keamanan laut					
			<i>Relay time</i> informasi ^{d)}	Menit	N/A	N/A	N/A	60			<i>Relay time</i> informasi ^{d)}	Menit	N/A	N/A	N/A	300	
			<i>Response time</i> instansi kmla ^{d)}	Jam	N/A	N/A	N/A	24									
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target									
137.	Tabel 4.53 Sasaran dan Indikator KP Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (penghapusan data indikator pada halaman IV.133)	No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	<i>Dihapus</i>								
		1	Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme	Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme													
			Draft Indeks Aktualisasi Pancasila		1	Dokumen	Pusat	BPIP									
			Jumlah modul pendidikan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi ASN		1	Dokumen	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PANRB • BPIP • BKN • LAN • Kemen dagri 									
138.	Tabel 4.53 Sasaran dan Indikator KP Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber (perubahan data indikator pada halaman IV.133)	2	Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber dan menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber					2	Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber dan menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber		Jumlah kegiatan literasi dan budaya keamanan siber	4	Nilai	Pusat	BSSN

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
				pada negara ASEAN dan Pasifik					Jumlah regulasi terkait mana-jemen krisis keamanan siber nasional	1	Regulasi	Pusat	BSSN
				Jumlah kegiatan literasi dan budaya keamanan siber	4	Kegiatan	Pusat	BSSN	Jumlah regulasi terkait pembentukan CERT	1	Regulasi	Pusat	BSSN
				Pembangunan Infrastruktur Politeknik Siber dan Sandi	4	Gedung perkuliahan	Pusat	BSSN	Jumlah regulasi terkait tata kelola keamanan siber pada sektor IKN (ISAC & VVDP)	2	Regulasi	Pusat	BSSN
				Jumlah regulasi terkait manajemen krisis keamanan siber nasional	1	Dokumen	Pusat	BSSN	Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Keamanan Siber	1	Regulasi	Pusat	BSSN
				Jumlah regulasi terkait pembentukan CERT	1	Dokumen	Pusat	BSSN	Jumlah dokumen Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IKN	1	Regulasi	Pusat	BSSN
				Jumlah regulasi terkait tata kelola keamanan siber pada sektor IKN (ISAC & VVDP)	2	Dokumen	Pusat	BSSN	Jumlah Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah	1	Dokumen	Pusat	BSSN
				Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Keamanan Siber	1	Dokumen	Pusat	BSSN	Jumlah Kerangka Regulasi Literasi Keamanan Siber dan Pengendalian Informasi	1	Regulasi	Pusat	BSSN
				Jumlah dokumen Rencana Strategis Keamanan Siber sektor IKN	1	Dokumen	Pusat	BSSN					
				Jumlah Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah	3	Dokumen	Pusat	BSSN					
				Jumlah Kerangka Regulasi Literasi	1	Dokumen	Pusat	BSSN					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																						
4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 4.5.5 Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas																																																																									
140.	Tabel 4.54 Sasaran dan Indikator PP Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas (perubahan data indikator pada halaman IV.131)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{b)}</th> <th>2019^{**)}</th> <th>2020^{**)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menurunnya penyalahgunaan narkotika</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika</td> <td>Persen</td> <td>2,9^{a)}</td> <td>2,65^{b)}</td> <td>2,65^{b)}</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menurunnya tingkat kejahatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Clearance rate</i></td> <td>Persen</td> <td>62,99^{a)}</td> <td>65,66^{a)}</td> <td>65,66^{a)}</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BNN 2018, b) Statistik Kriminal 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	1	Menurunnya penyalahgunaan narkotika							Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	2,9 ^{a)}	2,65 ^{b)}	2,65 ^{b)}	2,55	2	Menurunnya tingkat kejahatan							<i>Clearance rate</i>	Persen	62,99 ^{a)}	65,66 ^{a)}	65,66 ^{a)}	68	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{b)}</th> <th>2019^{**)}</th> <th>2020^{**)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menurunnya penyalahgunaan narkotika</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika</td> <td>Persen</td> <td>1,77^{a)}</td> <td>1,77^{a)}</td> <td>1,77^{a)}</td> <td>1,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menurunnya tingkat kejahatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Clearance rate</i></td> <td>Persen</td> <td>62,99^{b)}</td> <td>62,99^{b)}</td> <td>62,99^{b)}</td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BNN 2018, b) Statistik Kriminal 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	1	Menurunnya penyalahgunaan narkotika							Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	1,77 ^{a)}	1,77 ^{a)}	1,77 ^{a)}	1,86	2	Menurunnya tingkat kejahatan							<i>Clearance rate</i>	Persen	62,99 ^{b)}	62,99 ^{b)}	62,99 ^{b)}	63
No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}																																																																			
1	Menurunnya penyalahgunaan narkotika																																																																								
	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	2,9 ^{a)}	2,65 ^{b)}	2,65 ^{b)}	2,55																																																																			
2	Menurunnya tingkat kejahatan																																																																								
	<i>Clearance rate</i>	Persen	62,99 ^{a)}	65,66 ^{a)}	65,66 ^{a)}	68																																																																			
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}																																																																			
1	Menurunnya penyalahgunaan narkotika																																																																								
	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	1,77 ^{a)}	1,77 ^{a)}	1,77 ^{a)}	1,86																																																																			
2	Menurunnya tingkat kejahatan																																																																								
	<i>Clearance rate</i>	Persen	62,99 ^{b)}	62,99 ^{b)}	62,99 ^{b)}	63																																																																			
141.	Tabel 4.55 Sasaran dan Indikator KP Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika (perubahan lokasi target dan data indikator pada halaman IV.136, 137)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika</td> <td>Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	1	Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan Prioritas</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Target</th> <th>Satuan</th> <th>Lokasi</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika</td> <td>Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana	1	Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika																																														
No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																																			
1	Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika																																																																							
No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/ Indikator	Target	Satuan	Lokasi	K/L Pelaksana																																																																			
1	Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika	Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika																																																																							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Jumlah kawasan rawan kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program <i>Alternative Development</i>	6	Kawasan	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Sumut, Sulsel, Kalsel	BNN		Jumlah kawasan rawan kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program <i>Alternative Development</i>	6	Kawasan	Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Medan, Banjarmasin, Makassar	BNN
			Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	20.000	Orang	Pusat	Kemensos		Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	21.714	Orang	Pusat	Kemensos
142.	Tabel 4.55 Sasaran dan Indikator KP Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (perubahan target indikator pada halaman IV.136, 137)	2	Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat				2	Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat			
			Jumlah rumah susun yang dibangun	6	Paket	Densus 88 AT, Sumut, Jabar, Jateng, Kalbar, dan Sulsel	POLRI		Jumlah rumah susun yang dibangun	16	Lokasi	Densus 88 AT, Sumut, Jabar, Jateng, Kalbar, dan Sulsel	POLRI
			Jumlah dokumen Rencana Aksi Penanganan konflik sosial	34	Dokumen	Pusat	Kemendagri		Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	61	Persentase	Daerah	Kemendagri
			Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	41.930	Orang	Pusat	Kemensos		Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan	43.018	Orang	Pusat	Kemensos

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019	pencegahan konflik sosial Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																																
BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG																																																																																			
5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang																																																																																			
5.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)																																																																																			
143.	Deskripsi Umum Paragraf 2 kalimat terakhir, Halaman V.1	Selanjutnya, TPB/SDGs juga diurusutamakan ke dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 agar terintegrasi target dan indikatornya dengan pembangunan nasional mendatang.	Selanjutnya, TPB/SDGs diurusutamakan ke dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 agar terintegrasi target dan indikatornya dengan pembangunan nasional mendatang.																																																																																
144.	Tabel 5.1 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Perubahan target pertumbuhan ekonomi, IKLH. Halaman V.2	<p>Pertumbuhan PDB tahun 2020 5,4 – 6,0</p> <table border="1" data-bbox="556 1045 1509 1403"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{*)}</th> <th>2018^{*)}</th> <th>2019^{**)}</th> <th>2020^{**)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td>Persen</td> <td>5,1^{*)}</td> <td>5,2^{*)}</td> <td>5,1-5,6^{*)}</td> <td>5,4-6,0^{*)}</td> <td>Koordinator: Kemenko Perekonomian</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td colspan="7">Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</td> <td>Nilai</td> <td>66,9^{*)}</td> <td>65,5-66,5^{*)}</td> <td>66,5-68,5^{*)}</td> <td>69,25-71,25^{*)}</td> <td>KLHK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana	1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan								Pertumbuhan PDB	Persen	5,1 ^{*)}	5,2 ^{*)}	5,1-5,6 ^{*)}	5,4-6,0 ^{*)}	Koordinator: Kemenko Perekonomian	3.	Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)								Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,9 ^{*)}	65,5-66,5 ^{*)}	66,5-68,5 ^{*)}	69,25-71,25 ^{*)}	KLHK	<p>Pertumbuhan PDB tahun 2020 5,3 – 5,5</p> <table border="1" data-bbox="1524 1045 2457 1403"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{*)}</th> <th>2018^{*)}</th> <th>2019^{**)}</th> <th>2020^{**)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td>Persen</td> <td>5,1^{*)}</td> <td>5,2^{*)}</td> <td>5,1-5,6^{*)}</td> <td>5,3-5,5^{*)}</td> <td>Koordinator: Kemenko Perekonomian</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td colspan="7">Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</td> <td>Nilai</td> <td>66,9^{*)}</td> <td>65,5-66,5^{*)}</td> <td>66,5-68,5^{*)}</td> <td>68,71^{*)}</td> <td>KLHK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana	1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan								Pertumbuhan PDB	Persen	5,1 ^{*)}	5,2 ^{*)}	5,1-5,6 ^{*)}	5,3-5,5 ^{*)}	Koordinator: Kemenko Perekonomian	3.	Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)								Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,9 ^{*)}	65,5-66,5 ^{*)}	66,5-68,5 ^{*)}	68,71 ^{*)}	KLHK
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana																																																																												
1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan																																																																																		
	Pertumbuhan PDB	Persen	5,1 ^{*)}	5,2 ^{*)}	5,1-5,6 ^{*)}	5,4-6,0 ^{*)}	Koordinator: Kemenko Perekonomian																																																																												
3.	Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)																																																																																		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,9 ^{*)}	65,5-66,5 ^{*)}	66,5-68,5 ^{*)}	69,25-71,25 ^{*)}	KLHK																																																																												
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana																																																																												
1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan																																																																																		
	Pertumbuhan PDB	Persen	5,1 ^{*)}	5,2 ^{*)}	5,1-5,6 ^{*)}	5,3-5,5 ^{*)}	Koordinator: Kemenko Perekonomian																																																																												
3.	Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)																																																																																		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	66,9 ^{*)}	65,5-66,5 ^{*)}	66,5-68,5 ^{*)}	68,71 ^{*)}	KLHK																																																																												

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020															
145.	<p>Tabel 5.2 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Perubahan pada nomenklatur sasaran, indikator pada tabel 5.2, halaman V.4</p>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana							
		1.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN instansi pemerintah	1.	Peningkatan kualitas manajemen ASN		2.	2.	Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah		Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional	Persen	N/A	N/A	N/A	-	Seluruh K/L dan Pemda	Jumlah instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansi*****	Instansi Pemerintah	N/A	N/A	N/A	-	Seluruh K/L dan Pemda
			Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi***		<i>dihapus</i>		3.	3.	Peningkatan kualitas pelayanan publik		a. Jumlah IP dengan UPP Tertentu yang menerapkan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Standar Pelayanan)	Unit Pelayanan Publik	N/A	300	375	435	Seluruh K/L dan Pemda	a. Jumlah instansi pemerintah dengan UPP Tertentu yang menerapkan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Standar Pelayanan)	Unit Pelayanan Publik	N/A	300	375	435	Seluruh K/L dan Pemda

PERIHAL		RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
NO		c. Jumlah Upp Tertentu	Unit pelayanan publik	****)	****)	****)	****)	20	Seluruh K/L dan Pemda	c. Persentase instansi pemerintah yang melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Instansi Pemerintah	****)	****)	20	Seluruh K/L dan Pemda	
		d. Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik***	Instansi pemerintah	****)	****)	****)	****)	300	Seluruh K/L dan Pemda							
		h. Jumlah penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (<i>external complaint handling</i>) ***	Laporan	6172	5011	5500	6000	Seluruh K/L dan Pemda								
		Indikator Baru														
										f. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan inovasi dalam pelayanan publik	Persen	N/A	N/A	N/A	20	Seluruh K/L dan Pemda

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		<p>4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <table border="1" data-bbox="618 607 1490 776"> <tr> <td>Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) instansional dengan maturitas level III***</td> <td>Persen</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>21</td> <td>Seluruh K/L dan Pemda</td> </tr> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) instansional dengan maturitas level III***	Persen	N/A	N/A	N/A	21	Seluruh K/L dan Pemda	<p>4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas instansi pemerintah</p> <p style="text-align: center;"><i>dihapus</i></p> <table border="1" data-bbox="1564 704 2412 850"> <tr> <td>Persentase instansi pemerintah yang menyusun dan penegakan kode etik. Dan kode perilaku ***</td> <td>Persen</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>20</td> <td>Seluruh K/L dan Pemda</td> </tr> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	Persentase instansi pemerintah yang menyusun dan penegakan kode etik. Dan kode perilaku ***	Persen	N/A	N/A	N/A	20	Seluruh K/L dan Pemda
Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) instansional dengan maturitas level III***	Persen	N/A	N/A	N/A	21	Seluruh K/L dan Pemda											
Persentase instansi pemerintah yang menyusun dan penegakan kode etik. Dan kode perilaku ***	Persen	N/A	N/A	N/A	20	Seluruh K/L dan Pemda											
<p>5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang 5.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p>																	
146.	<p>5.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Perubahan Arah Kebijakan V.6</p>	<p>Arah Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah melalui pemenuhan: (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; serta (c) Penyusunan pola karir instansional. Meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansional; dan (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; serta (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik; (b) Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat baik internal maupun eksternal; (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik; 	<p>Arah Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah melalui pemenuhan: (a) Rencana kebutuhan ASN jangka menengah; (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; serta (c) Penyusunan pola karir instansional. Meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansional; dan (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik; (b) Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat; (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; (e) Pemutakhiran informasi layanan pada SIPP; (f) Integrasi pelayanan publik (mal pelayanan publik); serta (g) Penerapan inovasi pelayanan publik. 														

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		(e) Pemutakhiran informasi layanan pada SIPP; (f) Integrasi pelayanan publik (mal pelayanan publik); serta (g) Penerapan inovasi pelayanan publik. 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan tingkat maturitas level III;	4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; serta (c) Penyusunan dan penegakan kode etik dan kode perilaku.

5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang

5.1.3 Pengarusutamaan Gender

147.	Tabel 5.3 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender Penambahan nomenklatur aktivitas indikator dan target, halaman V.7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(*)</th> <th>2019^(*)</th> <th>2020^(*)</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</td> <td>Nilai</td> <td>90,96</td> <td>90,99*</td> <td>91,64</td> <td>91,87</td> <td>Kemen PPPA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</td> <td>Nilai</td> <td>71,74</td> <td>72,10**</td> <td>72,81</td> <td>73,36</td> <td>Kemen PPPA</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7"><i>Indikator Baru</i></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(*)	2020 ^(*)	K/L Pelaksana	1.	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan								Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,96	90,99*	91,64	91,87	Kemen PPPA		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71,74	72,10**	72,81	73,36	Kemen PPPA		<i>Indikator Baru</i>							<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(*)</th> <th>2019^(*)</th> <th>2020^(*)</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</td> <td>Nilai</td> <td>90,96</td> <td>90,99</td> <td>91,64**</td> <td>91,87</td> <td>Seluruh KL terkait</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</td> <td>Nilai</td> <td>71,74</td> <td>72,10</td> <td>72,81**</td> <td>73,36</td> <td>Seluruh KL terkait</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</td> <td>Persen</td> <td>50,89</td> <td>51,88</td> <td>51,89**</td> <td>52,51</td> <td>Seluruh KL terkait</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(*)	2020 ^(*)	K/L Pelaksana	1.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan								Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,96	90,99	91,64**	91,87	Seluruh KL terkait		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71,74	72,10	72,81**	73,36	Seluruh KL terkait		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	50,89	51,88	51,89**	52,51	Seluruh KL terkait
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(*)	2020 ^(*)	K/L Pelaksana																																																																												
1.	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan																																																																																		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,96	90,99*	91,64	91,87	Kemen PPPA																																																																												
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71,74	72,10**	72,81	73,36	Kemen PPPA																																																																												
	<i>Indikator Baru</i>																																																																																		
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(*)	2020 ^(*)	K/L Pelaksana																																																																												
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan																																																																																		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,96	90,99	91,64**	91,87	Seluruh KL terkait																																																																												
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71,74	72,10	72,81**	73,36	Seluruh KL terkait																																																																												
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	50,89	51,88	51,89**	52,51	Seluruh KL terkait																																																																												
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target	Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target																																																																																

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
148.	Perubahan Arah Kebijakan Pengarusutamaan Gender Hal V.7 - V.8	<p>Arah Kebijakan</p> <p>Sasaran Pengarusutamaan Gender akan dicapai melalui 2 (dua) kebijakan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan; (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; serta (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilih. 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui (a) Peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, serta menerima manfaat pembangunan dan (b) Peningkatan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. 	<p>Arah Kebijakan</p> <p>Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, melalui: a) Penguatan kebijakan dan regulasi pemberdayaan perempuan, b) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha tentang isu gender dan akar permasalahannya; c) Peningkatan pemberdayaan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik dan jabatan publik; dan d) Peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; 2. Penguatan kelembagaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa, melalui: a) Penguatan komitmen; b) Penguatan dasar hukum termasuk aturan pelaksanaannya; c) Peningkatan kapasitas SDM, inovasi pendekatan, dan pengembangan sistem; d) Penguatan koordinasi antarinstansi penggerak dan pelaksana PUG; e) Pengelolaan pengetahuan; dan f) Pelibatan pemangku kepentingan terkait; dan 3. Penguatan proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa, melalui: a) Penyediaan dan pemanfaatan data gender; b) Penguatan analisis terhadap data gender untuk menemukenali isu gender, dan c) Pengintegrasian isu gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
<p>5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang 5.1.6 Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim</p>			

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	K/L Pelaksana	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	K/L Pelaksana
149.	<p>Tabel 5.7 Sasaran dan Indikator Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Ketahanan Iklim. Menurunnya potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim</p> <p>(Perubahan header kolom sasaran/indikator, nomenklatur indikator, dan target indikator sasaran, Tabel 5.7 hal. V.14)</p>	1.	Menurunnya potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim							1.	Menurunnya potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim						
			Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bahaya iklim	Persen	N/A	N/A	N/A	0,2313***	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen PUPR • KKP • Kemenkes • KLHK • BNPB • BMKG 		Persentase potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persen	N/A	N/A	N/A	0,56***	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemen PUPR • KKP • Kemenkes • KLHK • BNPB • BMKG
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								
		Keterangan: Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) PDB akibat bahaya perubahan iklim oleh 4 (empat) sector prioritas adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 0,876%							Keterangan: Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Potensi kehilangan PDB akibat bahaya perubahan iklim oleh 4 (empat) sector prioritas adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 0,876% terhadap total PDB atau setara dengan Rp11.681								
150.	<p>Tabel 5.8 Target Aktivitas Peningkatan Ketahanan Iklim, sektor Kelautan dan Perikanan</p> <p>(Perubahan nomenklatur indikator dan satuan aktivitas pengelolaan meteorologi maritim, hal. V.15)</p>	3.	Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun	Hektare	134.075	Kementan	3.	Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun	Hektare	135.600	Kementan		
					Jumlah irigasi perpompaan	Unit	933						Jumlah irigasi perpompaan	Unit	1.000		
				Jumlah embung pertanian	Unit	400						Jumlah embung pertanian	Unit	200			

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																
			Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Rasio data dan informasi OPT yang dimanfaatkan dalam pengendalian OPT terhadap data dan informasi OPT yang dihasilkan	Hektare	500				Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Area yang difasilitasi dalam penanganan dan pengendalian OPT	Hektare	144.000																																											
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																																																
151.	Tabel 5.10 Target Aktivitas Mitigasi Perubahan Iklim pada Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2020 Perubahan pada target, halaman V.18 – V.23	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bidang</th> <th>Aktivitas</th> <th>Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>Target 2020</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kehutanan</td> <td>Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif</td> <td>Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif</td> <td>Hektare</td> <td>56.000</td> <td>KLHK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air (penanaman dan pemeliharaan tanaman dalam rangka pemulihan ekosistem)</td> <td>Luas kawasan konservasi yang bermasalah</td> <td>Hektare</td> <td>25.000</td> <td>KLHK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pencegahan kebakaran hutan dan lahan</td> <td>Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan</td> <td>Desa</td> <td>1.200</td> <td>KLHK</td> </tr> </tbody> </table>	Bidang	Aktivitas	Indikator	Satuan	Target 2020	K/L Pelaksana	Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif	Hektare	56.000	KLHK		Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air (penanaman dan pemeliharaan tanaman dalam rangka pemulihan ekosistem)	Luas kawasan konservasi yang bermasalah	Hektare	25.000	KLHK		Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan	Desa	1.200	KLHK	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bidang</th> <th>Aktivitas</th> <th>Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>Target 2020</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kehutanan</td> <td>Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif</td> <td>Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif</td> <td>Hektare</td> <td>54.500</td> <td>KLHK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (<i>open area</i>)</td> <td>Luas kawasan konservasi yang bermasalah</td> <td>Hektare</td> <td>1.800.000</td> <td>KLHK</td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="2">Pencegahan kebakaran hutan dan lahan</td> <td>Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan</td> <td>Desa</td> <td>1.200</td> <td>KLHK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase penurunan luas area kebakaran hutan/lahan yang terbakar</td> <td>Persen</td> <td>2</td> <td>KLHK</td> </tr> </tbody> </table>	Bidang	Aktivitas	Indikator	Satuan	Target 2020	K/L Pelaksana	Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif	Hektare	54.500	KLHK		Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (<i>open area</i>)	Luas kawasan konservasi yang bermasalah	Hektare	1.800.000	KLHK		Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	Desa	1.200	KLHK		Persentase penurunan luas area kebakaran hutan/lahan yang terbakar	Persen	2	KLHK
Bidang	Aktivitas	Indikator	Satuan	Target 2020	K/L Pelaksana																																																			
Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif	Hektare	56.000	KLHK																																																			
	Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air (penanaman dan pemeliharaan tanaman dalam rangka pemulihan ekosistem)	Luas kawasan konservasi yang bermasalah	Hektare	25.000	KLHK																																																			
	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan	Desa	1.200	KLHK																																																			
Bidang	Aktivitas	Indikator	Satuan	Target 2020	K/L Pelaksana																																																			
Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif	Hektare	54.500	KLHK																																																			
	Penanganan permasalahan di kawasan Konservasi (<i>open area</i>)	Luas kawasan konservasi yang bermasalah	Hektare	1.800.000	KLHK																																																			
	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan	Desa	1.200	KLHK																																																			
		Persentase penurunan luas area kebakaran hutan/lahan yang terbakar	Persen	2	KLHK																																																			

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			persentase penurunan luas area kebakaran hutan/lahan yang terbakar	Persen	10	KLHK		Penanggulang-an kebakaran hutan dan lahan	Jumlah dilaksanakannya Operasi Pengamanan Hutan	Operasi	250	KLHK	
		Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah bulan pelaksanaan Operasi Pengamanan Hutan dan Pemadaman darat	Bulan	12	KLHK		Pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat	Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	Hektare	77,5	KLHK	
		Pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat	Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Hektare	77,5	KLHK		Pengembangan Mitigasi perubahan Iklim melalui <i>system agroforestry</i>	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim	Produk	11	KLHK	
		Pengembangan Mitigasi perubahan Iklim melalui <i>system agroforestry</i>	Jumlah pilot IPTEK untuk bidang <i>sosekjak</i> dan perubahan iklim	Pilot IPTEK	1	KLHK							
		Pertanian	Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan perubahan iklim dan pencegahan kebakaran	Kelompok Tani	7.350	Kementan	Pertanian	Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Hektare	1.245	Kementan
								Pengembang-an Tanaman Perkebunan	Luas area tanaman perkebunan yang dikembangkan	Hektare	16.000 (Kopi) 7.150 (Kakao), 13.100	Kementan	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		infrastruktur energi baru terbarukan	terbarukan yang terbangun (PLT Panas Bumi, Air, Mikro Hidro, Surya, dan Bioenergi)					Mikro Hidro, Surya, dan Bioenergi)				
		Konservasi energi	1. Intensitas Energi Primer; 2. Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Label Peralatan Rumah Tangga ;	SBM Miliar Peralat-an SKEM	421.225 3	Kemen ESDM		1. Penurunan Intensitas Energi Final; 2. Jumlah Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada peralatan pemanfaat energi;	SBM Miliar Peralat-an SKEM	0,9 3	Kemen ESDM	
		Substitusi energi (PN4 PP1)	Jumlah produksi Bahan Bakar Nabati	Juta KL	10	Kemen ESDM		Substitusi energi (PN4 PP1)	Jumlah produksi Biofuel	Juta KL	9	Kemen ESDM
	Transportasi	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Panjang konektivitas multimoda dan antarmoda	Km	Pembangunan jalan tol sepanjang 300 km; Pembangunan (termasuk jalur ganda dan reaktivasi) jalur kereta		Transportasi	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Panjang konektivitas multimoda dan antarmoda	Km	Pembangunan jalan tol sepanjang 300 km; Pembangunan (termasuk jalur ganda dan reaktivasi) jalur kereta api pada lintas utama sepanjang 217,80 Km;	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020			
		<p>Peningkatan sistem angkutan umum masal perkotaan</p> <p>Jumlah lokasi pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan</p> <p>Kota</p>	<p>Peningkatan sistem angkutan umum masal perkotaan</p>	<p>Jumlah lokasi pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan</p>	<p>Kota</p>	<p>Peningkatan pelabuhan utama dengan kedalaman 16 meter di 1 lokasi; Pembangunan bandara baru; Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan di 6 lokasi; Pembangunan dan pengembangan terminal type A sebanyak 1 lokasi</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Pelaksanaan subsidi angkutan motor melalui kereta api	Jumlah subsidi angkutan motor melalui kereta api	Paket	1					BRT di 10 Kota		
			Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Jumlah angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Paket	1					- Pembangunan layanan BRT di 10 Kota		
			Pembangunan/ Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Jumlah lokasi pembangunan/ pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Lokasi	60							
		Industri	Implementasi Konservasi Energi dan Diversifikasi Energi Sektor Industri	Jumlah kebijakan Implementasi Konservasi Energi dan Diversifikasi Energi Sektor Industri	Kebijakan	5	Kemenperin	Industri	Kebijakan Penurunan Emisi GRK Sektor Industri	Efisiensi Pengelolaan Industri	Kebijakan	3	Kemenperin
		Pengelolaan Limbah	Pembangunan infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah skala regional, kota, kawasan, dan berbasis masyarakat	Cakupan layanan persampahan	KK	748.095	Kemen PUPR	Pengelolaan Limbah	Pembangunan infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah skala regional, kota, kawasan, dan berbasis masyarakat	Cakupan layanan persampahan	KK	545.523	Kemen PUPR
									Pembangunan infrastruktur air limbah sistem	Cakupan layanan air limbah	KK	1.487.158	Kemen PUPR

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
			Pembangun-an infrastruktur air limbah sistem terpusat skala regional, kota, permukiman, dan berbasis masyarakat	Cakupan layanan air limbah	KK	522.950	Kemen PUPR		terpusat skala regional, kota, permukiman, dan berbasis masyarakat					
			Pengurangan timbulan sampah melalui pembangun-an Pusat Daur Ulang (PDU)	Jumlah PDU yang terbangun	Lokasi	2 (dua) Lokasi 21.747.500 Ton	KLHK		Pengurangan timbulan sampah melalui pembangun-an Pusat Daur Ulang (PDU)	Pengurangan Timbulan Sampah Melalui Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di Destinasi Wisata	Lokasi	1 (satu)	KLHK	
		Manajemen Pesisir Laut	Rehabilitasi hutan mangrove dan konservasi padang lamun	Jumlah lokasi hutan mangrove dan padang lamun yang direhabilitasi	Lokasi	7	KLHK	Manajemen Pesisir Laut	Rehabilitasi hutan mangrove dan konservasi padang lamun	Luas pemulihan ekosistem mangrove	Hektare	1.000	KLHK	
			Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai	Jumlah lokasi ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai yang dipulihkan kerusakannya	Lokasi	10	KLHK		Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai	Jumlah lokasi pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai	Lokasi	16	KLHK	
			Peningkatan Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/ dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah	Luas kawasan konservasi baru yang ditetapkan/ dicadangkan di tingkat	Ha	700.000	KKP		Peningkatan Kawasan konservasi baru yang ditetapkan di tingkat Nasional dan Daerah	Luas kawasan konservasi baru yang ditetapkan di tingkat Nasional dan Daerah	Ha	700.000	KKP	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
				Nasional dan Daerah									Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019				
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019															
5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama																	
5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Bencana																	
152.	Kependudukan dan Keluarga Berencana -V.24-	Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menjaga angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) nasional sebesar 2,1.							Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) nasional sampai pada tingkat <i>replacement rate</i> yaitu 2,1 di tahun 2024.								
5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama																	
5.2.2 Kesehatan																	
153.	Tabel 5.12 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan a. Indikator dan target 2020 (Halaman V.27-28)	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana
		1. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat							1. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat								
			Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak ⁽²⁾	Persen	N/A	N/A	N/A	30	Kemenkes		Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kegawatdaruratan maternal dan neonatal ⁽³⁾	Orang	N/A	N/A	N/A	960	Kemenkes
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat	Persen	92	90,8	93	92,9	Kemenkes		<i>dihapus</i>						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020									
		imunisasi dasar lengkap**)								Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans dan intervensi gizi berkualitas **)	Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	51	Kemenkes	
		Jumlah kabupaten/kota melaksanakan surveilans dan intervensi gizi berkualitas**)	Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	260	Kemenkes									
		2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular															
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta**)	Kab/Kota	372	382	398	432	Kemenkes	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta**)	Kab/Kota	372	382	398	416	Kemenkes		
		3. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas															
		Jumlah rencana induk nasional fasilitas pelayanan kesehatan**)	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	Kemenkes	Jumlah rencana induk nasional fasilitas pelayanan kesehatan**)	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	Kemenkes		
		Persentase RSUD Kelas C dengan 7 jenis dokter spesialis**)	Persen	54,93	61,63	60	75	Kemenkes	<i>Dihapus</i>								
		Jumlah FKTP yang memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar**)	Unit	3.210	6.669	7.033	7.197	Kemenkes	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar**)	Persen	N/A	N/A	N/A	48	Kemenkes		
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target									

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
154.	Arah Kebijakan (Halaman V.28-30)	<p>Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (<i>Primary Health Care</i>)-dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui strategi pembangunan bidang kesehatan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pengembangan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku hygiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita termasuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini lapangan serta penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat; serta h) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi 	<p>Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (<i>Primary Health Care</i>) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan yang didukung jaminan pembiayaan dan kemampuan <u>pelayanan esensial dasar dan</u> emergensi komprehensif, penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap; c) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; d) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah dengan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling; peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; dan peningkatan KB pasca persalinan; dan e) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan,

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi yang bersifat <i>life saving</i> dengan didukung data yang kuat (<i>evidence based policy</i>) termasuk fortifikasi dan pemberian <i>multiple micronutrient</i> yang efektif bagi balita, anak usia sekolah/remaja, calon pengantin, calon ibu hamil, dan ibu hamil; c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (<i>food based approach</i>); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat; g) Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga masyarakat madani, perguruan tinggi dan organisasi profesi dan mitra pembangunan lainnya; serta h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas.</p> <p>3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, <i>emerging diseases</i>, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan <i>real time surveilans</i> dan pengendalian vektor; b) penguatan <i>health security</i> terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan <i>alert system</i> kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; serta d) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.</p> <p>4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk</p>	<p>perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; c) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat <i>life saving</i> dengan didukung bukti (<i>evidence based policy</i>) termasuk fortifikasi pangan; e) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (<i>food based approach</i>); f) penguatan sistem surveilans gizi; g) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.</p> <p>3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, <i>emerging diseases</i>, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok; b) penguatan <i>health security</i> terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan <i>alert system</i> kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; d) pengendalian resistensi antimikroba; dan e) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.</p> <p>4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas antarmoda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur; f) penguatan akses, kualitas, advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di semua tatanan; serta g) penguatan kolaborasi multisektor untuk mendukung upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijakan berwawasan kesehatan (<i>Health in All Policies</i>).</p> <p>5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:</p> <p>a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan <i>online</i> termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan <i>telemedicine</i>, digitalisasi rekam medis dan rekam medis <i>online</i>; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (<i>flying health care</i>) dan gugus pulau; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; serta perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3);</p>	<p>berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur.</p> <p>5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:</p> <p>a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya; pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan; pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia; penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan <i>online</i> termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan <i>telemedicine</i>, digitalisasi rekam medis dan rekam medis <i>online</i>; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (<i>flying dan sailing health care</i>) dan gugus</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; pengembangan kebijakan re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas; serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi <i>real time</i> berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan <i>life sciences</i>; serta pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;</p> <p>d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan <i>pre</i> dan <i>post market</i> obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;</p>	<p>pulau; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; dan penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3);</p> <p>b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk dengan pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan); afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; afirmasi pendayagunaan dan mekanisme re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar (seperti tenaga promosi kesehatan, dokter keluarga layanan primer, dan perawat komunitas); penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi <i>real time</i> berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan <i>life sciences</i>; dan pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;</p> <p>d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan <i>pre</i> dan <i>post market</i> obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>e. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem <i>single entry</i>; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital termasuk <i>big data</i> untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan <i>earmark</i> cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.</p>	<p>kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan;</p> <p>e. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem <i>single entry</i>; penguatan data rutin; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan termasuk <i>big data</i>; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan <i>earmark</i> cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.</p>

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

5.2.3 Pendidikan

155.	Perubahan target mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi Tabel 5.13 Sasaran dan	Sasaran/ Indikator	Satuan	2020	Sasaran/ Indikator	Satuan	2020
		Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi	Ribu Mahasiswa	410	Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi	Ribu Mahasiswa	365

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																												
	Indikator Pembangunan Pendidikan (Halaman V.32)	Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019	Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																																																												
156.	Perubahan K/L pelaksana akibat perubahan nomenklatur K/L pada Tabel 5.13, (Halaman V.31 – V.32)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="619 672 695 711">No.</th> <th data-bbox="695 672 1179 711">Sasaran/Indikator</th> <th data-bbox="1179 672 1446 711">K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="619 711 695 750">1.</td> <td data-bbox="695 711 1179 750">Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun</td> <td data-bbox="1179 711 1446 750"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 750 695 850"></td> <td data-bbox="695 750 1179 850">Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun</td> <td data-bbox="1179 750 1446 850"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemenristekdikti </td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 850 695 951"></td> <td data-bbox="695 850 1179 951">Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun</td> <td data-bbox="1179 850 1446 951"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemenristekdikti </td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 951 695 990">2.</td> <td data-bbox="695 951 1179 990">Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik</td> <td data-bbox="1179 951 1446 990"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 990 695 1055"></td> <td data-bbox="695 990 1179 1055">Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2</td> <td data-bbox="1179 990 1446 1055"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti </td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1055 695 1120"></td> <td data-bbox="695 1055 1179 1120">Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi</td> <td data-bbox="1179 1055 1446 1120"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti </td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1120 695 1185">1.</td> <td data-bbox="695 1120 1179 1185">Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi</td> <td data-bbox="1179 1120 1446 1185"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1185 695 1250"></td> <td data-bbox="695 1185 1179 1250">Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi</td> <td data-bbox="1179 1185 1446 1250"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti </td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1250 695 1315"></td> <td data-bbox="695 1250 1179 1315">Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya</td> <td data-bbox="1179 1250 1446 1315"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="556 1328 1043 1354">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	No.	Sasaran/Indikator	K/L Pelaksana	1.	Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemenristekdikti 		Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemenristekdikti 	2.	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik			Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti 		Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti 	1.	Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi			Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti 		Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti 	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1607 672 1683 711">No.</th> <th data-bbox="1683 672 2096 711">Sasaran/Indikator</th> <th data-bbox="2096 672 2368 711">K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1607 711 1683 750">1.</td> <td data-bbox="1683 711 2096 750">Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun</td> <td data-bbox="2096 711 2368 750"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1607 750 1683 850"></td> <td data-bbox="1683 750 2096 850">Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun</td> <td data-bbox="2096 750 2368 850"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1607 850 1683 951"></td> <td data-bbox="1683 850 2096 951">Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun</td> <td data-bbox="2096 850 2368 951"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1607 951 1683 990">2.</td> <td data-bbox="1683 951 2096 990">Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik</td> <td data-bbox="2096 951 2368 990"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1607 990 1683 1055"></td> <td data-bbox="1683 990 2096 1055">Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2</td> <td data-bbox="2096 990 2368 1055"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1607 1055 1683 1120"></td> <td data-bbox="1683 1055 2096 1120">Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi</td> <td data-bbox="2096 1055 2368 1120"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1607 1120 1683 1185">3.</td> <td data-bbox="1683 1120 2096 1185">Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi</td> <td data-bbox="2096 1120 2368 1185"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1607 1185 1683 1250"></td> <td data-bbox="1683 1185 2096 1250">Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi</td> <td data-bbox="2096 1185 2368 1250"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1607 1250 1683 1315"></td> <td data-bbox="1683 1250 2096 1315">Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya</td> <td data-bbox="2096 1250 2368 1315"> <ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1539 1354 2026 1380">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	No.	Sasaran/Indikator	K/L Pelaksana	1.	Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 		Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 	2.	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik			Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 		Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 	3.	Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi			Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 		Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag
No.	Sasaran/Indikator	K/L Pelaksana																																																													
1.	Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun																																																														
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemenristekdikti 																																																													
	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag • Kemenristekdikti 																																																													
2.	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik																																																														
	Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti 																																																													
	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti 																																																													
1.	Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi																																																														
	Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti 																																																													
	Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenag • Kemenristekdikti 																																																													
No.	Sasaran/Indikator	K/L Pelaksana																																																													
1.	Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun																																																														
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 																																																													
	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 																																																													
2.	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik																																																														
	Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 																																																													
	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 																																																													
3.	Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi																																																														
	Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 																																																													
	Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud • Kemenag 																																																													

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾
157.	Perubahan indikator dan target pada Sasaran Pembangunan Pendidikan "1. Meningkatkan taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun" Tabel 5.13 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan (Halaman V.31)	1	Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun					1	Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun						
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,45 ^{a)}	8,52 ^{a)}	8,8	8,8		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,45 ^{a)}	8,52 ^{a)}	8,63	8,74
			Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Persen	95,5 ^{a)}	95,7 ^{a)}	96,1	96,2		<i>dihapus</i>					
		Sumber: ^{a)} BPS (diolah), 2018; ^{b)} Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; ^{c)} Kemenristekdikti (diolah), 2018 Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target.						Sumber: ^{a)} BPS (diolah), 2018; ^{b)} Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; ^{c)} Kemenristekdikti (diolah), 2018 Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target.							
158.	Perubahan indikator dan target pada Sasaran Pembangunan Bidang "2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidik" Tabel 5.13 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan (Halaman V.31)	2	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik					2	Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik						
			Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV	Persen	80,0 ^{b)}	85,0	90,0	95,0		<i>dihapus</i>					
		Sumber: ^{a)} BPS (diolah), 2018; ^{b)} Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; ^{c)} Kemenristekdikti (diolah), 2018 Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target.						Sumber: ^{a)} BPS (diolah), 2018; ^{b)} Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; ^{c)} Kemenristekdikti (diolah), 2018 Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target.							
159.	Perubahan indikator dan target pada Sasaran Pembangunan Bidang "3. Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik bagi siswa miskin dan Bidik	3.	Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi					3.	Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi						
		Sumber: ^{a)} BPS (diolah), 2018; ^{b)} Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; ^{c)} Kemenristekdikti (diolah), 2018 Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target.						Sumber: ^{a)} BPS (diolah), 2018; ^{b)} Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; ^{c)} Kemenristekdikti (diolah), 2018 Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target.							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		Saka/ Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi ¹⁾							Jumlah kegiatan organisasi kepramukaan (Kwarnas/ Saka/ Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi ¹⁾	Lembaga	35 ^{1) ii)}	35 ^{1) ii)}	35 ⁱⁱ⁾	17	Kemempora		
		Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemuda-an dengan lembaga lintas sektoral	Doku- men	5 ¹⁾	5 ¹⁾	6	6	Kemempora	Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri	Doku- men	5 ¹⁾	5 ¹⁾	6	6	Kemempora		
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								
161.	Sasaran dan indikator pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2020 (tabel 5.15)	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017¹⁾	2018¹⁾	2019¹⁾	2020¹⁾	K/L Pelaksana	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017¹⁾	2018¹⁾	2019¹⁾	2020¹⁾	K/L Pelaksana
		2	Meningkatnya budaya olahraga							2	Meningkatnya budaya olahraga						
			Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Persen	27,61 ^{b)}	31,38 ^{d)}	32,83	34,26	Kemempora		Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga ⁱⁱⁱ⁾	Persen	27,61 ^{b)}	31,38 ^{d)}	Meningkat	Meningkat	Kemempora

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		Jumlah peserta olahraga olimpik yang difasilitasi di sekolah dasar, me-nengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal ⁱⁱ	Orang	17.000 ^{ii) iii)}	122.400 ^{ii) iii)}	17.000 ⁱⁱⁱ⁾	17.000	Kemenpora	Jumlah peserta olahraga olimpik yang difasilitasi di sekolah dasar, me-nengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal ⁱ⁾	Orang	17.000 ^{ii) iii)}	122.400 ^{ii) iii)}	17.000 ⁱⁱⁱ⁾	17.000	Kemenpora		
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								
162.	Sasaran dan indikator pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2020 (tabel 5.15)	No.	Sasaran / Indikator	Satuan	2017ⁱ⁾	2018ⁱ⁾	2019ⁱⁱ⁾	2020ⁱⁱ⁾	K/L Pelaksana	No.	Sasaran / Indikator	Satuan	2017ⁱ⁾	2018ⁱ⁾	2019ⁱⁱ⁾	2020ⁱⁱ⁾	K/L Pelaksana
		3.	Meningkatnya prestasi olahraga							3	Meningkatnya prestasi olahraga						
			Jumlah tenaga, keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan di daerah ⁱⁱ	Orang	2.380 ^{ii) iii)}	2.380 ^{ii) iii)}	2.380 ⁱⁱⁱ⁾	3.000	Kemenpora		Jumlah tenaga, keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan di daerah ⁱⁱ	Orang	2.380 ^{ii) iii)}	2.380 ^{ii) iii)}	2.380 ⁱⁱⁱ⁾	3.000	Kemenpora
			Jumlah bibit olahragawan olimpik yang difasilitasi dalam Pemanduan bakat cabang olahraga unggulan ⁱⁱ	Orang	12.400 ^{ii) iii)}	16.400 ^{ii) iii)}	16.000 ^{ii) iii)}	16.000	Kemenpora		Jumlah bibit olahragawan olimpik yang difasilitasi dalam Pemanduan bakat cabang olahraga unggulan ⁱ⁾	Orang	12.400 ^{ii) iii)}	16.400 ^{ii) iii)}	16.000 ^{ii) iii)}	10.000	Kemenpora
			Jumlah olahragawan olimpik yang difasilitasi dalam	Orang	4.269 ^{ii) iii)}	5.000 ^{ii) iii)}	5.000 ^{ii) iii)}	5.000	Kemenpora		Jumlah olahragawan olimpik yang difasilitasi dalam	Orang	4.269 ^{ii) iii)}	5.000 ^{ii) iii)}	5.000 ^{ii) iii)}	500	Kemenpora

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		pengembangan olahragawan berbakat i)							pengembangan olahragawan berbakat i)						
		Jumlah PPLP/PPLM yang memenuhi standar	Unit	N/A **)	N/A **)	N/A **)	7	Kemenpora	Jumlah PPLP/PPLM yang memenuhi standar	Unit	N/A **)	N/A **)	N/A **)	7	Kemenpora
		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional dan internasional baik single dan/atau multievent	Kegiatan	10 **)	17 **)	17	17	Kemenpora	Jumlah olahragawan yang terfasilitasi ikut serta pada kejuaraan olahraga junior bertaraf nasional regional dan internasional (single dan atau multi event)	orang	5.000 **)	6.000 **)	6.000	6.000	Kemenpora
		Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, pemerintah daerah, luar negeri dan pihak swasta berbasis cabang olahraga Olimpik i)	Dokumen	6 **)	6 **)	5 **)	10	Kemenpora	Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, pemerintah daerah, luar negeri dan pihak swasta berbasis cabang olahraga Olimpik i)	Dokumen	6 **)	6 **)	5 **)	10	Kemenpora
		Jumlah fasilitasi bidang pengkajian iptek dan database olahraga i)	Kegiatan	10 **)	10 **)	5 **)	10	Kemenpora	Jumlah fasilitasi bidang pengkajian iptek dan database olahraga i)	Kegiatan	10 **)	10 **)	5 **)	9	Kemenpora
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
163.	Perbaiki keterangan tabel 5.15 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Sumber: a) Kemenpora, 2019; b) BPS, 2015; c) BPS, 2018 (data tersedia tiga tahunan). Keterangan: *) Realisasi; **) Target; i) Usulan indikator baru/penyesuaian; ii) Fasilitasi pada Kwarnas dan 34 Kwarda Gerakan Pramuka; iii) Tidak hanya pada cabang olahraga Olimpik; iv) Belum dilakukan; v) Tidak termasuk fasilitasi pengkajian <i>database</i>	Sumber: a) Kemenpora, 2019; b) BPS, 2015; c) BPS, 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; i) Usulan indikator baru/penyesuaian; ii) Fasilitasi pada Kwarnas dan 34 Kwarda Gerakan Pramuka; iii) Data tersedia tiga tahunan; iv) Tidak hanya pada cabang olahraga Olimpik; v) Belum dilakukan; vi) Tidak termasuk fasilitasi pengkajian <i>database</i>

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
5.2.6 Agama

164.	Sasaran dan Indikator 5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 5.2.6 Sub Bidang Sub bidang Agama (Perubahan data pada Tabel 5.16 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama Halaman V.38)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran / Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017ⁱ⁾</th> <th>2018ⁱ⁾</th> <th>2019ⁱⁱ⁾</th> <th>2020ⁱⁱ⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Kerukunan Umat Beragama</td> <td>Nilai</td> <td>72,27</td> <td>70,90</td> <td>72,38</td> <td>73,87</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Kepuasan Jemaah Haji</td> <td>Nilai</td> <td>84,85</td> <td>85,23</td> <td>86,00</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan (KUA)</td> <td>KUA</td> <td>3.188</td> <td>3.188</td> <td>3.400</td> <td>3.700</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran / Indikator	Satuan	2017 ⁱ⁾	2018 ⁱ⁾	2019 ⁱⁱ⁾	2020 ⁱⁱ⁾	1.	Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama							Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	72,27	70,90	72,38	73,87	2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan							Indeks Kepuasan Jemaah Haji	Nilai	84,85	85,23	86,00	87,00		Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan (KUA)	KUA	3.188	3.188	3.400	3.700	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran / Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017ⁱ⁾</th> <th>2018ⁱ⁾</th> <th>2019ⁱⁱ⁾</th> <th>2020ⁱⁱ⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Kerukunan Umat Beragama</td> <td>Nilai</td> <td>72,27</td> <td>70,90</td> <td>73,83ⁱ⁾</td> <td>73,87</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks Kepuasan Jemaah Haji</td> <td>Nilai</td> <td>84,85</td> <td>85,23</td> <td>85,91ⁱ⁾</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan</td> <td>KUA</td> <td>3.188</td> <td>3.188</td> <td>3.078</td> <td>3.188</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran / Indikator	Satuan	2017 ⁱ⁾	2018 ⁱ⁾	2019 ⁱⁱ⁾	2020 ⁱⁱ⁾	1.	Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama							Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	72,27	70,90	73,83 ⁱ⁾	73,87	2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan							Indeks Kepuasan Jemaah Haji	Nilai	84,85	85,23	85,91 ⁱ⁾	87,00		Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	KUA	3.188	3.188	3.078	3.188
No.	Sasaran / Indikator	Satuan	2017 ⁱ⁾	2018 ⁱ⁾	2019 ⁱⁱ⁾	2020 ⁱⁱ⁾																																																																																	
1.	Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama																																																																																						
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	72,27	70,90	72,38	73,87																																																																																	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan																																																																																						
	Indeks Kepuasan Jemaah Haji	Nilai	84,85	85,23	86,00	87,00																																																																																	
	Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan (KUA)	KUA	3.188	3.188	3.400	3.700																																																																																	
No.	Sasaran / Indikator	Satuan	2017 ⁱ⁾	2018 ⁱ⁾	2019 ⁱⁱ⁾	2020 ⁱⁱ⁾																																																																																	
1.	Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama																																																																																						
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	72,27	70,90	73,83 ⁱ⁾	73,87																																																																																	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan																																																																																						
	Indeks Kepuasan Jemaah Haji	Nilai	84,85	85,23	85,91 ⁱ⁾	87,00																																																																																	
	Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	KUA	3.188	3.188	3.078	3.188																																																																																	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (orang)	Orang	45.000	45.000	62.262	62.262	Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya	Orang	45.000	45.000	33.460	33.460		
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								
5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama															
5.2.7 Kebudayaan															
165.	Pemutakhiran target indikator pembangunan bidang kebudayaan pada Tabel 5.17	No.	Sasaran / Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{**)}	2020^{**)}	No.	Sasaran / Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{**)}	2020^{**)}
		1.	Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia						1.	Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia					
		Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	Nilai Budaya/ Tradisi	N/A	370	347	347		Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi	Nilai Budaya/ Tradisi	N/A	370	1.516	1.971	
		Jumlah even seni budaya	Even	133	144	144	88		Jumlah even seni budaya	Even	133	144	702	290	
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								
5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama															
5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan															
166.	Perbaiki Arah Kebijakan	Kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, melalui:						Kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO, melalui:							
		1. Peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG;						1. Peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan PUG dan PPRG;							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak pidana KtP termasuk TPPO; 3. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan pencegahan KtP termasuk TPPO; 4. Penguatan koordinasi antar-K/L/OPD Penggerak PPRG, antara K/L/OPD pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD Pengerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya; 5. Peningkatan kerja sama multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG dan perlindungan perempuan dari KtP termasuk TPPO; 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia K/L/OPD Pengerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh prasyarat PUG melalui PPRG di K/L/OPD tersebut; 7. Penguatan data, sistem, dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin dan data KtP termasuk TPPO; 8. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di semua tingkatan dan penguatan sinergi antarunit layanan KtP; 9. Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO di provinsi/kab/kota; dan 10. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG dan KtP termasuk TPPO. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan regulasi dan aturan pelaksanaan terkait PUG, PPRG, serta perlindungan perempuan dari KtP dan TPPO; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia K/L/OPD Penggerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh prasyarat PUG; 4. Penguatan koordinasi antar-K/L/OPD Penggerak PPRG, antara K/L/OPD pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD Pengerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya; 5. Peningkatan kerja sama multipihak antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan PUG, PPRG, serta perlindungan perempuan dari KtP dan TPPO; 6. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, pemerintah, individu baik laki-laki maupun perempuan, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO; 7. Penguatan data gender, pengembangan sistem data terpadu, serta pemanfaatan data gender, termasuk data KtP dan TPPO; 8. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di semua tingkatan dan penguatan sinergi antarunit layanan KtP dan TPPO; 9. Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO di provinsi/kab/kota; dan <p>Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG, PPRG, serta upaya pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO.</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																																																																																																																							
5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi 5.3.1 Keuangan Negara																																																																																																																																																																															
167.	Perubahan data pada Tabel 5.20 Sasaran dan Indikator Keuangan Negara. (halaman V.44-V45) <ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Perpajakan (% PDB): halaman V.44, terdapat pemutakhiran data untuk 2020 mengikuti APBN 2020 menggunakan poin Belanja Modal (% PDB): halaman V.44, terdapat pemutakhiran data untuk 2020 mengikuti APBN 2020 menggunakan poin Subsidi Energi (% PDB): halaman V.44, terdapat pemutakhiran data untuk 2020 mengikuti APBN 2020 menggunakan poin Keseimbangan Primer (% PDB): halaman V.44, terdapat pemutakhiran 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽²⁾</th> <th>2019⁽³⁾</th> <th>2020⁽⁴⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penerimaan perpajakan</td> <td>Persen PDB</td> <td>9,90⁽⁴⁾</td> <td>10,24</td> <td>11,10</td> <td>10,57-11,18</td> <td>Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="7">Meningkatnya kualitas belanja negara</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belanja modal</td> <td>Persen PDB</td> <td>1,50⁽⁴⁾</td> <td>1,24</td> <td>1,18</td> <td>1,43-1,58</td> <td rowspan="2">Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subsidi energi</td> <td>Persen PDB</td> <td>0,70⁽⁴⁾</td> <td>1,03</td> <td>0,99</td> <td>0,82-0,83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="7">Membaiknya keseimbangan primer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Keseimbangan primer</td> <td>Persen PDB</td> <td>(0,90)⁽⁴⁾</td> <td>(0,08)</td> <td>(0,13)</td> <td>0,00-0,23</td> <td>Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="7">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Surplus/defisit anggaran</td> <td>Persen PDB</td> <td>(2,51)⁽⁴⁾</td> <td>(1,82)</td> <td>(1,84)</td> <td>(1,75)-(1,52)</td> <td rowspan="2">Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stok utang pemerintah pusat</td> <td>Persen PDB</td> <td>29,38⁽⁴⁾</td> <td>29,78</td> <td>30,00</td> <td>30,10-29,40</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019 ⁽³⁾	2020 ⁽⁴⁾	K/L Pelaksana	1	Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan								Penerimaan perpajakan	Persen PDB	9,90 ⁽⁴⁾	10,24	11,10	10,57-11,18	Kemenkeu	2	Meningkatnya kualitas belanja negara								Belanja modal	Persen PDB	1,50 ⁽⁴⁾	1,24	1,18	1,43-1,58	Kemenkeu		Subsidi energi	Persen PDB	0,70 ⁽⁴⁾	1,03	0,99	0,82-0,83	3	Membaiknya keseimbangan primer								Keseimbangan primer	Persen PDB	(0,90) ⁽⁴⁾	(0,08)	(0,13)	0,00-0,23	Kemenkeu	4	Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah								Surplus/defisit anggaran	Persen PDB	(2,51) ⁽⁴⁾	(1,82)	(1,84)	(1,75)-(1,52)	Kemenkeu		Stok utang pemerintah pusat	Persen PDB	29,38 ⁽⁴⁾	29,78	30,00	30,10-29,40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽²⁾</th> <th>2019⁽³⁾</th> <th>2020⁽⁴⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penerimaan perpajakan</td> <td>Persen PDB</td> <td>9,90⁽⁴⁾</td> <td>10,24</td> <td>11,10</td> <td>10,69</td> <td>Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="7">Meningkatnya kualitas belanja negara</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belanja modal</td> <td>Persen PDB</td> <td>1,50⁽⁴⁾</td> <td>1,24</td> <td>1,18</td> <td>1,20</td> <td rowspan="2">Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subsidi energi</td> <td>Persen PDB</td> <td>0,70⁽⁴⁾</td> <td>1,03</td> <td>0,99</td> <td>0,72</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="7">Membaiknya keseimbangan primer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Keseimbangan primer</td> <td>Persen PDB</td> <td>(0,90)⁽⁴⁾</td> <td>(0,08)</td> <td>(0,13)</td> <td>(0,07)</td> <td>Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="7">Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Surplus/defisit anggaran</td> <td>Persen PDB</td> <td>(2,51)⁽⁴⁾</td> <td>(1,82)</td> <td>(1,84)</td> <td>(1,76)</td> <td rowspan="2">Kemenkeu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stok utang pemerintah pusat</td> <td>Persen PDB</td> <td>29,38⁽⁴⁾</td> <td>29,78</td> <td>30,00</td> <td>29,45</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019 ⁽³⁾	2020 ⁽⁴⁾	K/L Pelaksana	1	Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan								Penerimaan perpajakan	Persen PDB	9,90 ⁽⁴⁾	10,24	11,10	10,69	Kemenkeu	2	Meningkatnya kualitas belanja negara								Belanja modal	Persen PDB	1,50 ⁽⁴⁾	1,24	1,18	1,20	Kemenkeu		Subsidi energi	Persen PDB	0,70 ⁽⁴⁾	1,03	0,99	0,72	3	Membaiknya keseimbangan primer								Keseimbangan primer	Persen PDB	(0,90) ⁽⁴⁾	(0,08)	(0,13)	(0,07)	Kemenkeu	4	Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah								Surplus/defisit anggaran	Persen PDB	(2,51) ⁽⁴⁾	(1,82)	(1,84)	(1,76)	Kemenkeu		Stok utang pemerintah pusat	Persen PDB	29,38 ⁽⁴⁾	29,78	30,00	29,45
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019 ⁽³⁾	2020 ⁽⁴⁾	K/L Pelaksana																																																																																																																																																																								
1	Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan																																																																																																																																																																														
	Penerimaan perpajakan	Persen PDB	9,90 ⁽⁴⁾	10,24	11,10	10,57-11,18	Kemenkeu																																																																																																																																																																								
2	Meningkatnya kualitas belanja negara																																																																																																																																																																														
	Belanja modal	Persen PDB	1,50 ⁽⁴⁾	1,24	1,18	1,43-1,58	Kemenkeu																																																																																																																																																																								
	Subsidi energi	Persen PDB	0,70 ⁽⁴⁾	1,03	0,99	0,82-0,83																																																																																																																																																																									
3	Membaiknya keseimbangan primer																																																																																																																																																																														
	Keseimbangan primer	Persen PDB	(0,90) ⁽⁴⁾	(0,08)	(0,13)	0,00-0,23	Kemenkeu																																																																																																																																																																								
4	Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah																																																																																																																																																																														
	Surplus/defisit anggaran	Persen PDB	(2,51) ⁽⁴⁾	(1,82)	(1,84)	(1,75)-(1,52)	Kemenkeu																																																																																																																																																																								
	Stok utang pemerintah pusat	Persen PDB	29,38 ⁽⁴⁾	29,78	30,00	30,10-29,40																																																																																																																																																																									
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2019 ⁽³⁾	2020 ⁽⁴⁾	K/L Pelaksana																																																																																																																																																																								
1	Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan																																																																																																																																																																														
	Penerimaan perpajakan	Persen PDB	9,90 ⁽⁴⁾	10,24	11,10	10,69	Kemenkeu																																																																																																																																																																								
2	Meningkatnya kualitas belanja negara																																																																																																																																																																														
	Belanja modal	Persen PDB	1,50 ⁽⁴⁾	1,24	1,18	1,20	Kemenkeu																																																																																																																																																																								
	Subsidi energi	Persen PDB	0,70 ⁽⁴⁾	1,03	0,99	0,72																																																																																																																																																																									
3	Membaiknya keseimbangan primer																																																																																																																																																																														
	Keseimbangan primer	Persen PDB	(0,90) ⁽⁴⁾	(0,08)	(0,13)	(0,07)	Kemenkeu																																																																																																																																																																								
4	Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah																																																																																																																																																																														
	Surplus/defisit anggaran	Persen PDB	(2,51) ⁽⁴⁾	(1,82)	(1,84)	(1,76)	Kemenkeu																																																																																																																																																																								
	Stok utang pemerintah pusat	Persen PDB	29,38 ⁽⁴⁾	29,78	30,00	29,45																																																																																																																																																																									

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
	<p>data untuk 2020 mengikuti APBN 2020 menggunakan poin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surplus/Defisit APBN (% PDB): halaman V.45, terdapat pemutakhiran data untuk 2020 mengikuti APBN 2020 menggunakan poin • Stok Utang Pemerintah (% PDB): halaman V.45, terdapat pemutakhiran data untuk 2020 mengikuti APBN 2020 menggunakan poin 	<p>Sumber: *) Kemenkeu, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Realisasi sementara; ***) Target; ****) Target Sementara (Perhitungan Bappenas)</p>	<p>Sumber: *) Kemenkeu, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Realisasi sementara; ***) Target; ****) Berdasarkan APBN 2020</p>
<p>5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi 5.3.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Kewirausahaan</p>			
168.	<p>Perubahan narasi pada Sub Bab 5.3.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Kewirausahaan (halaman V.48)</p>	<p>Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Kewirausahaan memiliki peran yang besar pada perekonomian Indonesia. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM bergantung terhadap kondisi ekonomi nasional karena keterlibatannya dalam rantai nilai global masih rendah. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM hanya sebesar 14% terhadap nilai ekspor Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Adanya keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global berperan dalam peningkatan pangsa pasar dan menjadi alternatif disaat perekonomian domestik lesu. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 57,9 juta orang sehingga berperan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.</p> <p>Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif dalam perannya sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah koperasi</p>	<p>Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Kewirausahaan memiliki peran yang besar pada perekonomian Indonesia. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM bergantung terhadap kondisi ekonomi nasional karena keterlibatannya dalam rantai nilai global masih rendah. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM hanya sebesar 14% terhadap nilai ekspor Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Adanya keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global berperan dalam peningkatan pangsa pasar. Selain itu, UMKM berperan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penyerapan tenaga kerja sebanyak 57,9 juta orang.</p> <p>Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif dalam perannya sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah koperasi</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>mencapai 209 ribu unit dengan proporsi jumlah koperasi aktif sebesar 60 persen. Namun demikian, jumlah serapan tenaga kerja oleh koperasi dan daya ungkitnya terhadap kesejahteraan anggota masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah jenis koperasi yang berkembang masih terbatas pada koperasi simpan pinjam, konsumsi dan produksi</p> <p>Seiring dengan itu, potensi kewirausahaan Indonesia ditunjukkan dengan minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi untuk berusaha. Di tahun 2017, berdasarkan survey Global Entrepreneurship Monitor, terdapat 47,74 persen penduduk Indonesia mempunyai minat dan motivasi untuk berusaha atau lebih besar dari rata-rata global sebesar 43,43 persen. Namun, rasio wirausaha yang berorientasi pertumbuhan terhadap wirausaha berorientasi kebutuhan masih rendah.</p> <p>Potensi UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan yang besar dalam perekonomian harus diiringi dengan kapasitas dan daya saing yang mumpuni untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Bagi UMKM, tantangan mengenai skema pembiayaan yang belum tepat sasaran, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, dan pemasaran yang masih belum optimal berperan pada <i>global value chain</i> perlu menjadi fokus perhatian. Selain itu, kemudahan,</p> <p>kepastian, dan perlindungan usaha masih perlu untuk diberikan perhatian agar memberikan rasa aman bagi UMKM dalam berusaha.</p> <p>Peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi pun membutuhkan pendekatan baru. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga koperasi, antara lain meliputi tata kelola dan partisipasi anggota serta pengembangan inovasi model bisnis koperasi yang mengakomodasi disrupsi teknologi. Dari sisi kewirausahaan, minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi belum direalisasikan dalam bentuk usaha yang berorientasi tumbuh. Selain itu, mayoritas wirausaha merupakan wirausaha pemula yang masih minim pengetahuan mengenai teknologi informasi dan masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja karena masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup (<i>necessity entrepreneurs</i>).</p>	<p>mencapai 209 ribu unit dengan proporsi jumlah koperasi aktif sebesar 60 persen. Namun demikian, jumlah serapan tenaga kerja oleh koperasi dan daya ungkitnya terhadap kesejahteraan anggota masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah jenis koperasi yang berkembang masih terbatas pada koperasi simpan pinjam, konsumsi dan produksi, serta belum berkembangnya koperasi model baru seperti koperasi pekerja dan koperasi <i>start-up</i>.</p> <p>Seiring dengan itu, potensi kewirausahaan Indonesia ditunjukkan dengan minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi untuk berusaha. Di tahun 2017, berdasarkan survey <i>Global Entrepreneurship Monitor</i>, terdapat 47,74 persen penduduk Indonesia mempunyai minat dan motivasi untuk berusaha atau lebih besar dari rata-rata global sebesar 43,43 persen.</p> <p>Potensi UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan yang besar dalam perekonomian harus diiringi dengan kapasitas dan daya saing yang mumpuni untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Bagi UMKM, tantangan mengenai skema pembiayaan yang belum tepat sasaran, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, dan belum optimal berperan pada <i>global value chain</i> perlu menjadi fokus perhatian. Selain itu, kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha masih perlu untuk diberikan perhatian agar memberikan rasa aman bagi UMKM dan wirausaha dalam berusaha.</p> <p>Kinerja kelembagaan dan usaha koperasi pun membutuhkan pendekatan baru. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga koperasi, antara lain meliputi tata kelola dan partisipasi anggota serta pengembangan inovasi model bisnis koperasi yang mengakomodasi disrupsi teknologi. Dari sisi kewirausahaan, minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi belum direalisasikan dalam bentuk usaha yang berorientasi tumbuh. Selain itu, mayoritas wirausaha merupakan wirausaha pemula yang masih minim pengetahuan mengenai teknologi informasi dan masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja karena masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup (<i>necessity entrepreneurs</i>).</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																
5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi 5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri																																																																			
169.	Perubahan data target Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. (paragraf 1, halaman V.50)	Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri merupakan upaya untuk mewujudkan ekonomi yang kompetitif dan berkembangnya sektor-sektor dalam perekonomian. Ekonomi yang kompetitif ditandai dengan meningkatnya daya saing produk dalam negeri, terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan iklim usaha yang sehat sementara itu berkembangnya sektor ekonomi ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang tercipta dari aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,46—5,58 persen.	Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri merupakan upaya untuk mewujudkan ekonomi yang kompetitif dan berkembangnya sektor-sektor dalam perekonomian. Ekonomi yang kompetitif ditandai dengan meningkatnya daya saing produk dalam negeri, terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan iklim usaha yang sehat sementara itu berkembangnya sektor ekonomi ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang tercipta dari aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,46 persen.																																																																
170.	Perubahan data pada Tabel 5.23 Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri. (halaman V.50)	<table border="1" data-bbox="556 1045 1509 1370"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{*)}</th> <th>2018^{*)}</th> <th>2019^{**)}</th> <th>2020^{**)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pencerapan pasar rakyat digital</td> <td>Pasar</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi</td> <td>Persen</td> <td>0,48</td> <td>25,2</td> <td>8,0</td> <td>10,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="556 1370 1509 1414">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana	1	Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja								Pencerapan pasar rakyat digital	Pasar	N/A	N/A	N/A	1			Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi	Persen	0,48	25,2	8,0	10,0		<table border="1" data-bbox="1524 1045 2457 1370"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{*)}</th> <th>2018^{*)}</th> <th>2019^{**)}</th> <th>2020^{**)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pencerapan pasar rakyat digital</td> <td>Pasar</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pertumbuhan volume transaksi perdagangan-an berjangka komoditi</td> <td>Persen</td> <td>0,48</td> <td>25,2</td> <td>8,0</td> <td>8,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1524 1370 2457 1414">Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana	1	Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja								Pencerapan pasar rakyat digital	Pasar	N/A	N/A	N/A	3			Pertumbuhan volume transaksi perdagangan-an berjangka komoditi	Persen	0,48	25,2	8,0	8,0	
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana																																																												
1	Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja																																																																		
	Pencerapan pasar rakyat digital	Pasar	N/A	N/A	N/A	1																																																													
	Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi	Persen	0,48	25,2	8,0	10,0																																																													
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana																																																												
1	Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja																																																																		
	Pencerapan pasar rakyat digital	Pasar	N/A	N/A	N/A	3																																																													
	Pertumbuhan volume transaksi perdagangan-an berjangka komoditi	Persen	0,48	25,2	8,0	8,0																																																													

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi 5.3.5 Kerja Sama Ekonomi Internasional			
171.	Perubahan Arah Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Internasional. (halaman V.52 - V.53)	<p>Kebijakan kerjasama ekonomi internasional diarahkan pada: (i) menganalisis peta komoditas unggulan Indonesia; (ii) menganalisis negara mitra potensial kerjasama bilateral Indonesia; serta (iii) mengkoordinasikan lintas stakeholders dalam kerjasama ekonomi bilateral Indonesia. Untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan tersebut, dilakukan melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjajakan kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. 2. Menganalisa komoditas unggulan dan berdaya saing yang dimiliki Indonesia serta negara mitra potensial guna mencapai perundingan dan implementasi kerjasama ekonomi internasional yang efektif dan efisien. 3. Mengkoordinasikan sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan dan implementasi hasil perundingan, kerjasama ekonomi internasional 4. Mengintensifkan perundingan kerjasama bilateral yang sudah berjalan, seperti: Indonesia-Turkey FTA, Indonesia-Tunisia PTA, dan Indonesia-Mozambique FTA. 5. Menghidupkan kembali perundingan kerjasama bilateral yang selama ini mengalami kendala, seperti: Indonesia-India CECA dan Indonesia-Republic of Korea FTA. 6. Mempercepat dimulainya proses perundingan kerjasama bilateral: Indonesia-Kenya FTA, Indonesia-Morocco FTA, Indonesia-Peru FTA, Indonesia-South Africa FTA, Indonesia-Chinese Taipei FTA, Indonesia-Ukraine FTA, dan Indonesia-USA FTA. 7. Melanjutkan langkah konkrit penerapan kerjasama bilateral: Indonesia-Australia CEPA dan Indonesia-Chile FTA. 	<p>Kebijakan kerjasama ekonomi internasional diarahkan pada: (i) menganalisis peta komoditas unggulan Indonesia; (ii) menganalisis negara mitra potensial kerjasama bilateral Indonesia; serta (iii) mengkoordinasikan lintas stakeholders dalam kerjasama ekonomi bilateral Indonesia. Untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan tersebut, dilakukan melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjajaki kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. 2. Menganalisa komoditas unggulan dan berdaya saing yang dimiliki Indonesia serta negara mitra potensial guna mencapai perundingan dan implementasi kerjasama ekonomi internasional yang efektif dan efisien. 3. Mengkoordinasikan sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan dan implementasi hasil perundingan, kerjasama ekonomi internasional 4. Mengintensifkan perundingan kerjasama bilateral yang sedang berjalan, seperti: Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, dan Indonesia-EU CEPA. 5. Melanjutkan langkah konkrit ratifikasi dan penerapan kerjasama bilateral, antara lain: Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, dan Indonesia-Korea CEPA 6. Mempercepat dimulainya proses perundingan kerjasama bilateral, antara lain: Indonesia-New Zealand CEPA, Indonesia-Peru FTA, Indonesia-Canada FTA, Indonesia-Sri Lanka PTA, dan Indonesia-Djibouti PTA 7. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional, antara lain dengan: (i) membangun database terkait hasil

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																
		8. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional, antara lain dengan: (i) membangun database terkait hasil perundingan maupun informasi terkait negara mitra perundingan kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; (ii) pembangunan data statistik perdagangan jasa; serta (iii) pengembangan sistem informasi serta pemberian layanan masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis yang dapat memfasilitasi serta mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional.	perundingan maupun informasi terkait negara mitra perundingan kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; (ii) pembangunan data statistik perdagangan jasa; serta (iii) pengembangan sistem informasi serta pemberian layanan masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis yang dapat memfasilitasi serta mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional.																																																
5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi 5.3.6 Jasa Keuangan																																																			
172.	Perubahan narasi pada subbab 5.3.6 Jasa Keuangan. (paragraf pertama, halaman V.53)	Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Sampai dengan April 2019, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan kinerja perbankan dan industri keuangan non bank, serta kinerja pasar modal yang tetap terkendali di tengah tekanan perekonomian global. Namun demikian, pada tahun 2020, stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: (1) berlanjutnya pengetatan likuiditas global; (2) relatif rendahnya tingkat inklusi keuangan; (3) relatif dangkalnya sektor keuangan domestik; serta (4) belum berkembangnya industri jasa keuangan syariah.	Sektor keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Sampai dengan Oktober 2019, kinerja sektor keuangan tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan kinerja perbankan dan industri keuangan non bank, serta kinerja pasar modal yang tetap terkendali di tengah tekanan perekonomian global. Namun demikian, pada tahun 2020, sektor keuangan diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu: (1) relatif dangkalnya sektor keuangan domestik, (2) perkembangan teknologi sektor keuangan, dan (3) belum berkembangnya jasa keuangan syariah.																																																
173.	Perubahan data pada Tabel 5.25 Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan. (halaman V.53 – V.54)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi</td> <td>Persen</td> <td>5,5</td> <td>4,2</td> <td>6,0</td> <td>6,1 – 6,6</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenkeu </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi								Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	5,5	4,2	6,0	6,1 – 6,6	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenkeu 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi</td> <td>Persen</td> <td>5,5</td> <td>4,2</td> <td>6,0</td> <td>6,3</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenkeu Kemendagri </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi								Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	5,5	4,2	6,0	6,3	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenkeu Kemendagri
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																																												
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi																																																		
	Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	5,5	4,2	6,0	6,1 – 6,6	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenkeu 																																												
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																																												
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi																																																		
	Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	5,5	4,2	6,0	6,3	<ul style="list-style-type: none"> Kemenko Perekonomian Kemenkeu Kemendagri 																																												

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																											
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>• Kemen-dagri</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="7">Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat</td> <td>Hasil Analisis</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td></td> <td>• Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan</td> </tr> </table> <p>Sumber: BPS, 2018. Keterangan: *)Realisasi **)APBN 2019 ***) Target.</p>									• Kemen-dagri	2	Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang									Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat	Hasil Analisis	N/A	N/A	N/A	N/A		• Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td colspan="6">Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat</td> <td>Hasil Analisis</td> <td>795</td> <td>1004</td> <td>732</td> <td>905</td> <td>• Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan</td> </tr> </table> <p>Sumber: BPS, 2018; PPATK, 2018. Keterangan: *)Realisasi **)APBN 2019 ***) Target.</p>	2	Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang								Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat	Hasil Analisis	795	1004	732	905	• Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
								• Kemen-dagri																																						
2	Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang																																													
	Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat	Hasil Analisis	N/A	N/A	N/A	N/A		• Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan																																						
2	Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang																																													
	Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat	Hasil Analisis	795	1004	732	905	• Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan																																							

5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi

5.3.7 Badan Usaha Milik Negara

174.	Perubahan data pada Tabel 5.26 Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara. (halaman V.55)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017¹⁾</th> <th>2018¹⁾</th> <th>2019¹⁾</th> <th>2020¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyaluran belanja modal (<i>capex</i>) BUMN</td> <td>Triliun</td> <td>303,00^{a)}</td> <td>400,80</td> <td>488,00</td> <td>523,40-559,80</td> <td>Kemen BUMN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pembentukan Holding BUMN</td> <td> Holding</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>Kemen BUMN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peningkatan pasar ke luar negeri</td> <td>Negara tujuan ekspor</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>Kemen BUMN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: ^{a)} KemenBUMN, 2018. Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target.</p>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana	1	Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN								Penyaluran belanja modal (<i>capex</i>) BUMN	Triliun	303,00 ^{a)}	400,80	488,00	523,40-559,80	Kemen BUMN		Pembentukan Holding BUMN	Holding	N/A	N/A	N/A	N/A	Kemen BUMN		Peningkatan pasar ke luar negeri	Negara tujuan ekspor	N/A	N/A	N/A	N/A	Kemen BUMN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017¹⁾</th> <th>2018¹⁾</th> <th>2019¹⁾</th> <th>2020¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyaluran belanja modal (<i>capex</i>) BUMN</td> <td>Triliun</td> <td>303,00^{a)}</td> <td>400,80</td> <td>488,00</td> <td>525,00</td> <td>Kemen BUMN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pembentukan Holding BUMN</td> <td> Holding</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1^{b)}</td> <td>2</td> <td>Kemen BUMN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peningkatan pasar ke luar negeri</td> <td>Negara tujuan ekspor</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>30</td> <td>Kemen BUMN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: ^{a)} KemenBUMN, 2018. ^{b)} Angka sementara Keterangan: ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target.</p>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana	1	Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN								Penyaluran belanja modal (<i>capex</i>) BUMN	Triliun	303,00 ^{a)}	400,80	488,00	525,00	Kemen BUMN		Pembentukan Holding BUMN	Holding	1	1	1 ^{b)}	2	Kemen BUMN		Peningkatan pasar ke luar negeri	Negara tujuan ekspor	N/A	N/A	N/A	30	Kemen BUMN
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana																																																																												
1	Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN																																																																																		
	Penyaluran belanja modal (<i>capex</i>) BUMN	Triliun	303,00 ^{a)}	400,80	488,00	523,40-559,80	Kemen BUMN																																																																												
	Pembentukan Holding BUMN	Holding	N/A	N/A	N/A	N/A	Kemen BUMN																																																																												
	Peningkatan pasar ke luar negeri	Negara tujuan ekspor	N/A	N/A	N/A	N/A	Kemen BUMN																																																																												
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana																																																																												
1	Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN																																																																																		
	Penyaluran belanja modal (<i>capex</i>) BUMN	Triliun	303,00 ^{a)}	400,80	488,00	525,00	Kemen BUMN																																																																												
	Pembentukan Holding BUMN	Holding	1	1	1 ^{b)}	2	Kemen BUMN																																																																												
	Peningkatan pasar ke luar negeri	Negara tujuan ekspor	N/A	N/A	N/A	30	Kemen BUMN																																																																												

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																
175.	Perubahan narasi di bagian sasaran. (halaman V.55)	Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 2020. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun 2020 adalah sekitar Rp523,40 - Rp559,80 triliun.	Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 2020. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun 2020 adalah sekitar Rp525,00 triliun.																																																
5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi 5.3.8 Data dan Informasi Statistik																																																			
176.	Perubahan narasi pada subbab 5.3.8 Data dan Informasi Statistik. (Paragraf 1, halaman V.56)	Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik. Sasaran bidang statistik mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (<i>outcome</i>) dari satu atau beberapa program, Program BPS yang terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung kinerja BPS lembaga. Rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi dan mewujudkan Misi untuk kurun waktu 2020-2024.	Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh penyelenggara statistik. Sasaran bidang statistik mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (<i>outcome</i>) dari satu atau beberapa program, yang terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung kinerja lembaga.																																																
177.	Parubahan data pada Tabel 5.27 Sasaran dan Indikator Bidang Data dan Informasi Statistik. (Halaman V.56)	<table border="1" data-bbox="556 1138 1509 1372"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017¹⁾</th> <th>2018¹⁾</th> <th>2019^{**)}</th> <th>2020^{**)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Meningkatnya kualitas data statistik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS</td> <td>Persen</td> <td>94,51^{*)}</td> <td>96,27^{*)}</td> <td>96,27</td> <td>96,27</td> <td>BPS</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="556 1377 1509 1451">Sumber: ^{*)} BPS, 2019. Keterangan: ^{*)} Realisasi; ^{**)} Target pada Renstra dibawah capaian realisasi, sehingga menyesuaikan capaian target realisasi.</p>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana	1	Meningkatnya kualitas data statistik								Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS	Persen	94,51 ^{*)}	96,27 ^{*)}	96,27	96,27	BPS	<table border="1" data-bbox="1524 1138 2454 1372"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017¹⁾</th> <th>2018¹⁾</th> <th>2019^{**)}</th> <th>2020^{**)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Meningkatnya kualitas data statistik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS</td> <td>Persen</td> <td>94,51^{*)}</td> <td>96,72^{*)}</td> <td>96,72</td> <td>96,72</td> <td>BPS</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1524 1377 2454 1451">Sumber: ^{*)} BPS, 2019. Keterangan: ^{*)} Realisasi; ^{**)} Target pada Renstra dibawah capaian realisasi, sehingga menyesuaikan capaian target realisasi.</p>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana	1	Meningkatnya kualitas data statistik								Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS	Persen	94,51 ^{*)}	96,72 ^{*)}	96,72	96,72	BPS
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana																																												
1	Meningkatnya kualitas data statistik																																																		
	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS	Persen	94,51 ^{*)}	96,27 ^{*)}	96,27	96,27	BPS																																												
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana																																												
1	Meningkatnya kualitas data statistik																																																		
	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS	Persen	94,51 ^{*)}	96,72 ^{*)}	96,72	96,72	BPS																																												

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
178.	Perubahan narasi pada subbab 5.3.8 Data dan Informasi Statistik: Arah Kebijakan. (halaman V.56 – V.57)	<p>Kebijakan data statistik pada tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dan memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu, mudah diakses, serta konsisten. Kebijakan data statistik dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang tepat sesuai perkembangan fakta terkini (<i>evidence-based policy</i>).</p> <p>Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2020 diprioritaskan pada beberapa hal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan data statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi Prioritas Nasional. Dukungan data statistik terutama Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan (Program Prioritas: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan), Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah (Program Prioritas: Transformasi Digital), Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja (Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) dan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup (Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan). 2. Pelaksanaan Prioritas Bidang yang dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data untuk 136 indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia. b. Melanjutkan Pengembangan Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada; (i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah; (ii) transparansi data; (iii) peningkatan layanan publik untuk penggunaan data sesuai kebutuhannya; (iv) mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data. 	<p>Kebijakan data dan informasi statistik pada tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan statistik yang berkualitas dan memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu, mudah diakses, serta konsisten. Kebijakan data dan informasi statistik dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang tepat sesuai perkembangan fakta terkini (<i>evidence-based policy</i>).</p> <p>Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2020 diprioritaskan pada beberapa hal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan data dan informasi statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi Prioritas Nasional. Dukungan data statistik terutama Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan (Program Prioritas: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan), Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah (Program Prioritas: Transformasi Digital), Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja (Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) dan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup (Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan). 2. Pelaksanaan Prioritas Bidang yang dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan data untuk 136 indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta alat <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia. b. Melanjutkan Pengembangan Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada; (i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah, instansi daerah dan swasta; (ii) transparansi data; (iii) peningkatan layanan

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>c. Penyediaan data rutin yang lebih berkualitas dan tepat waktu, antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data.</p> <p>3. Peningkatan kualitas data statistik meliputi: (1) peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; (2) penerapan penjaminan kualitas data (<i>quality assurance framework</i>); (3) peningkatan manajemen sensus dan survei untuk perbaikan <i>response rate</i> dan keengganan responden (<i>respondent burdent</i>); (4) peningkatan kemudahan dan kecepatan akses serta perbaikan layanan terhadap data dan informasi statistik; (5) pengembangan metodologi <i>Small Area Estimation</i> (SAE) untuk mengestimasi area yang lebih kecil; (6) pengembangan data terpadu sebagai implementasi dari Satu Data Indonesia dan terciptanya Sistem Statistik Nasional (SSN).</p>	<p>publik untuk penggunaan data sesuai kebutuhannya; (iv) mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.</p> <p>c. Penyediaan data rutin yang lebih berkualitas dan tepat waktu, antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data.</p> <p>3. Peningkatan kualitas data statistik meliputi: (1) peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; (2) penerapan penjaminan kualitas data (<i>quality assurance framework</i>); (3) peningkatan manajemen sensus dan survei untuk perbaikan <i>response rate</i> dan keengganan responden (<i>respondent burdent</i>); (4) peningkatan kemudahan dan kecepatan akses serta perbaikan layanan terhadap data dan informasi statistik; (5) pengembangan metodologi <i>Small Area Estimation</i> (SAE) untuk mengestimasi area yang lebih kecil; (6) pengembangan data terpadu sebagai implementasi dari Satu Data Indonesia dan terciptanya Sistem Statistik Nasional (SSN).</p>
<p>5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi 5.3.9 Ketenagakerjaan</p>			
179.	Perubahan narasi pada arah kebijakan. (halamanV.59)	<p>Arah kebijakan meningkatkan perlindungan pekerja migran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penataan regulasi dan operasionalisasi badan perlindungan pekerja migran Indonesia. 2. Memperluas pasar dan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui peningkatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral dengan/antar negara mitra dan lembaga internasional lainnya. 	<p>Arah kebijakan meningkatkan perlindungan pekerja migran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penataan regulasi dan operasionalisasi badan perlindungan pekerja migran Indonesia. 2. Memperluas pasar dan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui peningkatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral dengan/antar negara mitra dan lembaga internasional lainnya.

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>3. Meningkatkan keahlian calon pekerja migran sesuai dengan kebutuhan pengguna agar seluruh pekerja migran Indonesia menjadi pekerja yang berkeahlian (<i>zero unskilled</i>).</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan untuk calon pekerja migran melalui pembentukan LTSA di wilayah kantong pekerja migran dan meningkatkan penyelenggaraan penempatan melalui pengembangan sistem informasi terpadu.</p> <p>5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.</p>	<p>3. Meningkatkan keahlian calon pekerja migran sesuai dengan kebutuhan pengguna agar pekerja migran Indonesia menjadi pekerja yang berkeahlian (<i>zero unskilled</i>) dan bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan untuk calon pekerja migran melalui pembentukan LTSA di wilayah kantong pekerja migran dan meningkatkan penyelenggaraan penempatan melalui pengembangan sistem informasi terpadu.</p> <p>Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.</p>

5.4 Bidang Iptek

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																		
		No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																										
180.	Perubahan target Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan Iptek dan perubahan K/L pelaksana akibat perubahan nomenklatur K/L pada Tabel 5.29, (Halaman V.60 – V.61)	<p>1 Meningkatkan kontribusi Iptek sebagai penghela pembangunan ekonomi yang berkelanjutan</p> <table border="1"> <tr> <td>Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional</td> <td>Produk inovasi</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>1^(d)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kemenristekdikti LIPI BPPT LAPAN BATAN BAPETEN </td> </tr> <tr> <td>Inovasi teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA</td> <td>Produk inovasi</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>4^(d)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> BPPT LAPAN BATAN </td> </tr> </table>							Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	Produk inovasi	N/A	N/A	N/A	1 ^(d)	<ul style="list-style-type: none"> Kemenristekdikti LIPI BPPT LAPAN BATAN BAPETEN 	Inovasi teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Produk inovasi	N/A	N/A	N/A	4 ^(d)	<ul style="list-style-type: none"> BPPT LAPAN BATAN 	<p>1 Meningkatkan kontribusi Iptek sebagai penghela pembangunan ekonomi yang berkelanjutan</p> <table border="1"> <tr> <td>Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional</td> <td>Produk inovasi</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>1^(d)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kemenristek/BRI N LIPI BPPT LAPAN BATAN BAPETEN </td> </tr> <tr> <td>Inovasi teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA</td> <td>Produk inovasi</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>4^(d)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> BPPT LAPAN BATAN </td> </tr> </table>							Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	Produk inovasi	N/A	N/A	N/A	1 ^(d)	<ul style="list-style-type: none"> Kemenristek/BRI N LIPI BPPT LAPAN BATAN BAPETEN 	Inovasi teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Produk inovasi	N/A	N/A	N/A	4 ^(d)	<ul style="list-style-type: none"> BPPT LAPAN BATAN
Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	Produk inovasi	N/A	N/A	N/A	1 ^(d)	<ul style="list-style-type: none"> Kemenristekdikti LIPI BPPT LAPAN BATAN BAPETEN 																																					
Inovasi teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Produk inovasi	N/A	N/A	N/A	4 ^(d)	<ul style="list-style-type: none"> BPPT LAPAN BATAN 																																					
Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	Produk inovasi	N/A	N/A	N/A	1 ^(d)	<ul style="list-style-type: none"> Kemenristek/BRI N LIPI BPPT LAPAN BATAN BAPETEN 																																					
Inovasi teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA	Produk inovasi	N/A	N/A	N/A	4 ^(d)	<ul style="list-style-type: none"> BPPT LAPAN BATAN 																																					
		<p>2 Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi <i>Research Power-House</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah SDM Iptek penerima beasiswa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kemenristekdikti </td> </tr> </table>							Jumlah SDM Iptek penerima beasiswa						<ul style="list-style-type: none"> Kemenristekdikti 	<p>2 Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi <i>Research Power-House</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah SDM Iptek penerima beasiswa peningkatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Kemendik-bud LIPI </td> </tr> </table>							Jumlah SDM Iptek penerima beasiswa peningkatan						<ul style="list-style-type: none"> Kemendik-bud LIPI 														
Jumlah SDM Iptek penerima beasiswa						<ul style="list-style-type: none"> Kemenristekdikti 																																					
Jumlah SDM Iptek penerima beasiswa peningkatan						<ul style="list-style-type: none"> Kemendik-bud LIPI 																																					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020										PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																									
		peningkatan kualifikasi pendidikan (S2 dan S3)	• LIPI • BPPT			Orang	8.595 ^{a)}	8.595	5.556	6.034 ^{d)}	6.034 ^{d)}			Orang	8.595 ^{a)}	8.595	5.556	6.034 ^{d)}	6.034 ^{d)}			Orang	650 ^{b)}	650	870	798 ^{d)}	798 ^{d)}			Lembaga	46 ^{a)}	81	90	120 ^{d)}	120 ^{d)}	Kemenristekdikti	Kemenristek/ BRIN	Pranata litbang yang terakreditasi	50 ^{a)}	50	55	55 ^{d)}	55 ^{d)}	Kemenristekdikti	Kemenristek/ BRIN	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi	70 ^{a)}	70 ^{a)}	50	30 ^{d)}	30 ^{d)}	Kemenristek/ BRI N	Kemenristek/ BRI N
3		Terciptanya ekosistem inovasi yang mendorong komersialisasi hasil riset				Produk inovasi di industri	70 ^{a)}	52	50	50 ^{d)}	50 ^{d)}			Produk inovasi	70 ^{a)}	52	50	30 ^{d)}	30 ^{d)}	Kemenristek/ BRI N	Kemenristek/ BRI N																																
		Produk inovasi litbang di industri	• Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN			Produk inovasi	70 ^{a)}	52	50	50 ^{d)}	50 ^{d)}			Produk inovasi	70 ^{a)}	52	50	30 ^{d)}	30 ^{d)}	Kemenristek/ BRI N	Kemenristek/ BRI N																																
		Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri	Kemenristekdikti			Produk inovasi	13 ^{a)}	13	15	15 ^{d)}	15 ^{d)}			Produk inovasi	13 ^{a)}	13	15	5 ^{d)}	5 ^{d)}	Kemenristek/ BRIN	Kemenristek/ BRIN																																
		Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	Kemenristekdikti			Tenant	137 ^{a)}	143	240	70 ^{d)}	70 ^{d)}			Tenant	137 ^{a)}	143	240	70 ^{d)}	70 ^{d)}	Kemenristek/ BRIN	Kemenristek/ BRIN																																

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		Jumlah Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	CPPBT	204 ^{a)}	118	115	8)	Kemenristekdikti	Jumlah Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	CPPBT	204 ^{a)}	118	115	75	Kemendikbud
Aplikasi pendaftaran paten (<i>resident</i>)	Aplikasi	1.777 ^{e)}	1.362 ^{e)}	2.000	3.000 ^{d)}	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • Kemenkum-ham 	Aplikasi pendaftaran paten (<i>resident</i>)	Aplikasi	1.777 ^{e)}	1.362 ^{e)}	2.000	2.200 ^{d)}	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek/BRI N • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • Kemenkum-ham 		
4 Meningkatkan jumlah anggaran dan kualitas belanja litbang nasional							4 Meningkatkan jumlah anggaran dan kualitas belanja litbang nasional								
Persentase anggaran litbang terhadap PDB	Persen	0,2 ^{d)}	N/A	N/A	0,21 ^{d)}	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristekdikti • BAPPENAS • Kemenkeu 	Persentase anggaran litbang terhadap PDB	Persen	0,2 ^{d)}	N/A	N/A	0,21 ^{d)}	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek/BRI N • BAPPENAS • Kemenkeu 		
Sumber : a) Kemenristekdikti, 2018; b) Kemenristekdikti dan LIPI, 2018; c) LIPI, 2016; d) Bappenas, 2018; e) Ditjen KI Kemenkumham, 2018							Sumber : a) Kemenristekdikti, 2018; b) Kemenristekdikti dan LIPI, 2018; c) LIPI, 2016; d) Bappenas, 2018; e) Ditjen KI Kemenkumham, 2018								
Keterangan : *) Realisasi; **) Target							Keterangan : *) Realisasi; **) Target								

5.5 Bidang Pembangunan Politik

5.5.1 Politik Dalam Negeri

181.	Tabel 5.30 Penambahan dan Penyesuaian nomenklatur sasaran, indikator, target dan satuan (Halaman V.62)	No	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana	No	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana
		1	Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang makin kokoh	Indeks Kebebasan Sipil	Nilai	76,45 ^{a)}	78,75 ^{a)}	87	88	Kemenko Polhukam	1	Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang makin kokoh	Indeks Kebebasan Sipil ^{a)}	Nilai	78,75	78,46	87

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		Indeks Hak-Hak Politik	Nilai	70,11 *)	66,63*)	68	69	Kemenko Polhukam	Indeks Hak-Hak Politik*)	Nilai	66,63	65,79	68	69	Kemenko Polhukam
		Indeks Lembaga Demokrasi	Nilai	62,08 *)	72,49 *)	79	80	Kemenko Polhukam	Indeks Lembaga Demokrasi *)	Nilai	72,49	75,25	79	80	Kemenko Polhukam
		Jumlah kebijakan tata kelola komunikasi publik yang terintegrasi	Doku- men	3	3	3	6	Kemkominfo	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D	Doku- men	3	3	3	2	Ditjen IKP Kemkominfo
		Sumber: a) Badan Pusat Statistik (BPS), 2016-2017; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2016-2017. Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: a) Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2018; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2016-2017; c) indikator berbeda dengan tahun sebelumnya Keterangan: *) Realisasi; **) Target						
182.	Arah Kebijakan (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.63)	<p>Dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri yaitu terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh, maka arah kebijakan yang akan ditempuh selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menata lembaga demokrasi, melalui strategi: (a) penyusunan skema bantuan keuangan partai politik; (b) peningkatan demokrasi internal partai politik; (c) penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; (d) penguatan penyelenggara pemilu; serta (e) penyempurnaan Undang-Undang bidang politik. 2. Memperkuat hak-hak politik dan kebebasan sipil, melalui strategi: (a) pelaksanaan pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten; (b) meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; serta (c) peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemiluan. 3. Memperkuat wawasan kebangsaan melalui strategi: (a) pengarusutamaan Pancasila dalam kebijakan program pembangunan; (b) pelaksanaan revitalisasi pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara; (c) peningkatan kapasitas ASN berbasis Pancasila; (d) peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah; (d) pengintegrasian data 							<p>Dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri yaitu terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh, maka arah kebijakan yang akan ditempuh selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menata lembaga demokrasi, melalui strategi: (a) penyusunan skema bantuan keuangan partai politik; (b) peningkatan demokrasi internal partai politik; (c) penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; (d) penguatan penyelenggara pemilu; serta (e) penyempurnaan Undang-Undang bidang politik. 2. Memperkuat hak-hak politik dan kebebasan sipil, melalui strategi: (a) pelaksanaan pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten; (b) meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; serta (c) peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemiluan. 3. Memperkuat wawasan kebangsaan melalui strategi: (a) pengarusutamaan Pancasila dalam kebijakan program pembangunan; (b) pelaksanaan revitalisasi pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara; (c) peningkatan kapasitas ASN berbasis Pancasila; (d) peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah; (d) 						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		<p>konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (e) pemantapan dan mengembangkan sistem deteksi dini; (f) penguatan koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; serta (g) pemantapan program Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu).</p> <p>Meningkatkan kualitas komunikasi publik, melalui strategi: (a) penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D ; (b) penguatan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat; (c) penyediaan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T; (d) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; (e) peningkatan akses komunikasi publik; (f) peningkatan literasi media; (g) penyusunan standardisasi lembaga pers dan jurnalis; serta (h) peningkatan kualitas isi atau program siaran.</p>	<p>pengintegrasian data konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (e) pemantapan dan mengembangkan sistem deteksi dini; (f) penguatan koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; serta (g) pemantapan program Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu).</p> <p>Meningkatkan kualitas komunikasi publik, melalui strategi: (a) penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D ; (b) penyediaan konten dan akses informasi publik yang merata dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T; (c) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; (d) peningkatan literasi TIK masyarakat; (e) Standardisasi lembaga pers dan jurnalis; serta (f) peningkatan kualitas lembaga penyiaran.</p>

5.5 Bidang Pembangunan Politik

5.5.2 Politik Luar Negeri

183.	Tabel 5.31 Menghapus dan menambah indikator, serta menyesuaikan target dan K/L (halaman V.64)	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana	No	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana
		2	Menguatnya kerja sama pembangunan internasional								2	Menguatnya kerja sama pembangunan internasional					
			Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi	Persen	53,33	71,43	70	70	Kemenlu, Kemssetneg		Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi	Persen	53,33	71,43	70	70	Kemenlu
			Persentase kemitraan institusi non pemerintah dalam kerjasama pembangunan melalui forum dan organisasi inter-nasional	Persen	N/A	N/A	20	28	<ul style="list-style-type: none"> • ANRI • Kemen PUPR • Kemenkeu • Kemendikbud, • Kemenlu • Kementan • KKP • Kemendag • Kemensetneg • Kemenkes 		Tingkat partisipasi aktor non pemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional	Persen	N/A ^e	N/A ^e	2,23	2,96-3,16	<ul style="list-style-type: none"> • ANRI • Kemen PUPR • Kemenkeu • Kemendikbud • Kemenlu • Kementan • KKP • Kemendag • Kemensetneg • Kemenkes

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																														
		Sumber: Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas (diolah) Keterangan:*) Realisasi; **) Target; N/A) Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru.							Sumber: Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas (diolah) Keterangan:*) Realisasi; **) Target; N/A) Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru; † indikator baru																														

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																																								
5.6 Bidang Pembangunan Aparatur																																																																																											
184.	Bidang Pembangunan Aparatur hal.V.67 (Perubahan narasi pada paragraf 2)	Rencana pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran dan target Prioritas Nasional (PN) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu meningkatnya kapasitas birokrasi yang didukung melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas birokrasi, perluasan inovasi dan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.	Rencana pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran dan target Prioritas Nasional (PN) dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu terwujudnya ASN profesional, berintegritas, dan netral; pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif; akuntabilitas keuangan dan kinerja.																																																																																								
185.	Tabel 5.32 Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur (Perubahan data hal.V.67-68)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="642 922 712 976">No.</th> <th data-bbox="712 922 1116 976">Sasaran/ Indikator</th> <th data-bbox="1116 922 1253 976">2018¹⁾</th> <th data-bbox="1253 922 1390 976">2020¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="642 976 712 1029">1.</td> <td data-bbox="712 976 1116 1029">Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi</td> <td data-bbox="1116 976 1253 1029"></td> <td data-bbox="1253 976 1390 1029"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1029 1116 1073">Opini WTP atas laporan keuangan</td> <td data-bbox="1116 1029 1253 1073"></td> <td data-bbox="1253 1029 1390 1073"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1073 1116 1117">- Kementerian/Lembaga</td> <td data-bbox="1116 1073 1253 1117">91,00²⁾</td> <td data-bbox="1253 1073 1390 1117">96,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1117 1116 1161">- Provinsi</td> <td data-bbox="1116 1117 1253 1161">N/A</td> <td data-bbox="1253 1117 1390 1161">100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1161 1116 1205">- Kabupaten</td> <td data-bbox="1116 1161 1253 1205">N/A</td> <td data-bbox="1253 1161 1390 1205">90,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1205 1116 1248">- Kota</td> <td data-bbox="1116 1205 1253 1248">N/A</td> <td data-bbox="1253 1205 1390 1248">75,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1248 1116 1292">Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B SAKIP)</td> <td data-bbox="1116 1248 1253 1292"></td> <td data-bbox="1253 1248 1390 1292"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1292 1116 1336">- Kementerian/Lembaga</td> <td data-bbox="1116 1292 1253 1336">92,77²⁾</td> <td data-bbox="1253 1292 1390 1336">94,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1336 1116 1380">- Provinsi</td> <td data-bbox="1116 1336 1253 1380">94,12²⁾</td> <td data-bbox="1253 1336 1390 1380">97,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="712 1380 1116 1424">- Kabupaten/Kota</td> <td data-bbox="1116 1380 1253 1424">46,85²⁾</td> <td data-bbox="1253 1380 1390 1424">50,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	2018 ¹⁾	2020 ¹⁾	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi				Opini WTP atas laporan keuangan				- Kementerian/Lembaga	91,00 ²⁾	96,00		- Provinsi	N/A	100,00		- Kabupaten	N/A	90,00		- Kota	N/A	75,00		Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B SAKIP)				- Kementerian/Lembaga	92,77 ²⁾	94,00		- Provinsi	94,12 ²⁾	97,00		- Kabupaten/Kota	46,85 ²⁾	50,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1577 922 1647 976">No.</th> <th data-bbox="1647 922 2090 976">Sasaran/ Indikator</th> <th data-bbox="2090 922 2227 976">2018¹⁾</th> <th data-bbox="2227 922 2364 976">2020¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1577 976 1647 1029">1.</td> <td data-bbox="1647 976 2090 1029">Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi</td> <td data-bbox="2090 976 2227 1029"></td> <td data-bbox="2227 976 2364 1029"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1029 2090 1073">Opini WTP atas laporan keuangan</td> <td data-bbox="2090 1029 2227 1073"></td> <td data-bbox="2227 1029 2364 1073"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1073 2090 1117">- Kementerian/Lembaga</td> <td data-bbox="2090 1073 2227 1117">94,00²⁾</td> <td data-bbox="2227 1073 2364 1117">95,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1117 2090 1161">- Provinsi</td> <td data-bbox="2090 1117 2227 1161">94,00²⁾</td> <td data-bbox="2227 1117 2364 1161">95,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1161 2090 1205">- Kabupaten</td> <td data-bbox="2090 1161 2227 1205">79,00²⁾</td> <td data-bbox="2227 1161 2364 1205">80,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1205 2090 1248">- Kota</td> <td data-bbox="2090 1205 2227 1248">90,00²⁾</td> <td data-bbox="2227 1205 2364 1248">91,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1248 2090 1292">Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B SAKIP)</td> <td data-bbox="2090 1248 2227 1292"></td> <td data-bbox="2227 1248 2364 1292"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1292 2090 1336">- Kementerian/Lembaga</td> <td data-bbox="2090 1292 2227 1336">92,77²⁾</td> <td data-bbox="2227 1292 2364 1336">94,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1336 2090 1380">- Provinsi</td> <td data-bbox="2090 1336 2227 1380">94,12²⁾</td> <td data-bbox="2227 1336 2364 1380">85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1647 1380 2090 1424">- Kabupaten/Kota</td> <td data-bbox="2090 1380 2227 1424">46,85²⁾</td> <td data-bbox="2227 1380 2364 1424">50,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	2018 ¹⁾	2020 ¹⁾	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi				Opini WTP atas laporan keuangan				- Kementerian/Lembaga	94,00 ²⁾	95,00		- Provinsi	94,00 ²⁾	95,00		- Kabupaten	79,00 ²⁾	80,00		- Kota	90,00 ²⁾	91,00		Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B SAKIP)				- Kementerian/Lembaga	92,77 ²⁾	94,00		- Provinsi	94,12 ²⁾	85,00		- Kabupaten/Kota	46,85 ²⁾	50,00
No.	Sasaran/ Indikator	2018 ¹⁾	2020 ¹⁾																																																																																								
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi																																																																																										
	Opini WTP atas laporan keuangan																																																																																										
	- Kementerian/Lembaga	91,00 ²⁾	96,00																																																																																								
	- Provinsi	N/A	100,00																																																																																								
	- Kabupaten	N/A	90,00																																																																																								
	- Kota	N/A	75,00																																																																																								
	Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B SAKIP)																																																																																										
	- Kementerian/Lembaga	92,77 ²⁾	94,00																																																																																								
	- Provinsi	94,12 ²⁾	97,00																																																																																								
	- Kabupaten/Kota	46,85 ²⁾	50,00																																																																																								
No.	Sasaran/ Indikator	2018 ¹⁾	2020 ¹⁾																																																																																								
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi																																																																																										
	Opini WTP atas laporan keuangan																																																																																										
	- Kementerian/Lembaga	94,00 ²⁾	95,00																																																																																								
	- Provinsi	94,00 ²⁾	95,00																																																																																								
	- Kabupaten	79,00 ²⁾	80,00																																																																																								
	- Kota	90,00 ²⁾	91,00																																																																																								
	Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B SAKIP)																																																																																										
	- Kementerian/Lembaga	92,77 ²⁾	94,00																																																																																								
	- Provinsi	94,12 ²⁾	85,00																																																																																								
	- Kabupaten/Kota	46,85 ²⁾	50,00																																																																																								

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																								
		<table border="1" data-bbox="642 630 1390 818"> <tr> <td>3.</td> <td colspan="2">Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td colspan="2">Persentase K/L/D yang memiliki indeks sistem merit dengan kategori Baik ke atas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>38 50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>18 40</td> </tr> </table> <p data-bbox="568 834 1480 880">Sumber: *) BPK, 2017 – 2019; *) Kemen PANRB, 2017 – 2019; *) BPKP, 2017 – 2019; *) Ombudsman Republik Indonesia, 2017 – 2019</p> <p data-bbox="568 896 1435 941">Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019; ***) Menggunakan Metode Pengukuran Baru yang Lebih Mencerminkan Kualitas RB</p>	3.	Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit		a.	Persentase K/L/D yang memiliki indeks sistem merit dengan kategori Baik ke atas			- Kementerian/Lembaga	38 50		- Provinsi	18 40	<table border="1" data-bbox="1572 630 2354 818"> <tr> <td>3.</td> <td colspan="2">Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td colspan="2">Persentase K/L/D yang memiliki indeks sistem merit dengan kategori Baik ke atas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>38 90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>18 37</td> </tr> </table> <p data-bbox="1527 834 2424 880">Sumber: *) BPK, 2017 – 2019; *) Kemen PANRB, 2017 – 2019; *) BPKP, 2017 – 2019; *) Ombudsman Republik Indonesia, 2017 – 2019</p> <p data-bbox="1527 896 2394 941">Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019; ***) Menggunakan Metode Pengukuran Baru yang Lebih Mencerminkan Kualitas RB</p>	3.	Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit		a.	Persentase K/L/D yang memiliki indeks sistem merit dengan kategori Baik ke atas			- Kementerian/Lembaga	38 90		- Provinsi	18 37
3.	Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit																										
a.	Persentase K/L/D yang memiliki indeks sistem merit dengan kategori Baik ke atas																										
	- Kementerian/Lembaga	38 50																									
	- Provinsi	18 40																									
3.	Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit																										
a.	Persentase K/L/D yang memiliki indeks sistem merit dengan kategori Baik ke atas																										
	- Kementerian/Lembaga	38 90																									
	- Provinsi	18 37																									
186.	Arah Kebijakan (Perubahan narasi hal.V.69, poin 2 dan 3)	<ol data-bbox="550 980 1485 1252" style="list-style-type: none"> Meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui strategi: (a) perluasan penerapan inovasi pelayanan publik dan penguatan pola replikasi inovasi; (b) penguatan pengawasan eksternal atas kinerja pelayanan publik; serta (c) penerapan <i>e-services</i>/digitalisasi pelayanan public; (d) penguatan penerapan standar pelayanan publik. Menguatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit, antara lain melalui strategi (a) pelaksanaan manajemen talenta dan <i>talent pool</i> nasional ASN; (b) pengembangan pola karir nasional ASN; (c) penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi implementasi sistem merit; (d) peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN; dan (e) peningkatan profesionalitas ASN 	<ol data-bbox="1515 980 2424 1279" style="list-style-type: none"> Meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui strategi: (a) perluasan penerapan inovasi pelayanan publik dan penguatan pola replikasi inovasi; (b) penguatan pengawasan eksternal atas kinerja pelayanan publik; (c) penerapan <i>e-services</i>/digitalisasi pelayanan publik; dan (d) penguatan penerapan pelayanan terpadu. Menguatnya implementasi manajemen ASN yang profesional berbasis merit, antara lain melalui strategi (a) pelaksanaan manajemen talenta dan <i>talent pool</i> nasional ASN; (b) pengembangan pola karir nasional ASN; (c) penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi implementasi sistem merit; (d) peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN; (e) penyederhanaan eselonisasi; dan (f) penataan jabatan fungsional. 																								

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																											
5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang 5.7.1. Informasi Geospasial																																																																																			
187.	Sasaran dan indikator pembangunan bidang informasi geospasial (perubahan data pada Tabel 5.33. Sasaran dan Indikator Pembangunan / Pengarusutamaan Bidang Informasi Geospasial, poin 1.a, 1.c, dan 1.d, Halaman V.70)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(*)</th> <th>2019^(**)</th> <th>2020^(**)</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun</td> <td>Stasiun</td> <td>N/A</td> <td>33</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>BIG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritas-kan</td> <td>Nomor Lembar Peta (NLP)</td> <td>1.375</td> <td>780</td> <td>414</td> <td>3.817</td> <td>BIG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Luasan data geospasial termutakhir</td> <td>Km²</td> <td>5.464</td> <td>2.516</td> <td>14.644</td> <td>5.635</td> <td>BIG</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	K/L Pelaksana	1.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas								Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun	Stasiun	N/A	33	20	20	BIG		Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritas-kan	Nomor Lembar Peta (NLP)	1.375	780	414	3.817	BIG		Luasan data geospasial termutakhir	Km ²	5.464	2.516	14.644	5.635	BIG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(*)</th> <th>2019^(**)</th> <th>2020^(**)</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun</td> <td>Stasiun</td> <td>N/A</td> <td>33</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>BIG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritas-kan</td> <td>Nomor Lembar Peta (NLP)</td> <td>1.375</td> <td>780</td> <td>414</td> <td>4.099</td> <td>BIG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Luasan data geospasial termutakhir</td> <td>Km²</td> <td>5.464</td> <td>2.516</td> <td>14.644</td> <td>6.865</td> <td>BIG</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	K/L Pelaksana	1.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas								Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun	Stasiun	N/A	33	20	30	BIG		Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritas-kan	Nomor Lembar Peta (NLP)	1.375	780	414	4.099	BIG		Luasan data geospasial termutakhir	Km ²	5.464	2.516	14.644	6.865	BIG
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	K/L Pelaksana																																																																												
1.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas																																																																																		
	Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun	Stasiun	N/A	33	20	20	BIG																																																																												
	Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritas-kan	Nomor Lembar Peta (NLP)	1.375	780	414	3.817	BIG																																																																												
	Luasan data geospasial termutakhir	Km ²	5.464	2.516	14.644	5.635	BIG																																																																												
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(**)	2020 ^(**)	K/L Pelaksana																																																																												
1.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas																																																																																		
	Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun	Stasiun	N/A	33	20	30	BIG																																																																												
	Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritas-kan	Nomor Lembar Peta (NLP)	1.375	780	414	4.099	BIG																																																																												
	Luasan data geospasial termutakhir	Km ²	5.464	2.516	14.644	6.865	BIG																																																																												
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																																																																										
		Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Keterangan: *) Realisasi; **) Target																																																																										

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																																											
5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang																																																																																																			
5.7.2. Tata Ruang																																																																																																			
188.	Sasaran dan indikator pembangunan bidang tata ruang (perubahan data pada Tabel 5.34. Sasaran dan indikator Pembangunan/ Pengarusutamaan Bidang Tata Ruang, poin 1.a, 1.c, 4.b, 4.e, 5.a, 5.c, 7.b, 8.a, 8.b, dan 8.c, Halaman V.72)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RTR provinsi/ kabupaten/ kota</td> <td>Materi Teknis</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR</td> <td>Materi Teknis</td> <td>N/A</td> <td>165</td> <td>36</td> <td>105</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td colspan="7">Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah rencana detail tata ruang tematik</td> <td>Materi Teknis dan Raperda</td> <td>1</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>14</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	1.	Peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif								Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RTR provinsi/ kabupaten/ kota	Materi Teknis	33	33	33	34	Kemen ATR/BPN		Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR	Materi Teknis	N/A	165	36	105	Kemen ATR/BPN	4.	Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas								Jumlah rencana detail tata ruang tematik	Materi Teknis dan Raperda	1	18	18	14	Kemen ATR/BPN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RTR provinsi/ kabupaten/ kota</td> <td>Materi Teknis dan Raperda</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>3</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR</td> <td>Materi Teknis</td> <td>N/A</td> <td>165</td> <td>36</td> <td>101</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td colspan="7">Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah rencana detail tata ruang tematik</td> <td>Materi Teknis dan Raperda</td> <td>1</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	1.	Peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif								Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RTR provinsi/ kabupaten/ kota	Materi Teknis dan Raperda	N/A	N/A	N/A	3	Kemen ATR/BPN		Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR	Materi Teknis	N/A	165	36	101	Kemen ATR/BPN	4.	Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas								Jumlah rencana detail tata ruang tematik	Materi Teknis dan Raperda	1	18	18	17	Kemen ATR/BPN
No.		Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																																																																																											
1.		Peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif																																																																																																	
		Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RTR provinsi/ kabupaten/ kota	Materi Teknis	33	33	33	34	Kemen ATR/BPN																																																																																											
		Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR	Materi Teknis	N/A	165	36	105	Kemen ATR/BPN																																																																																											
4.		Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas																																																																																																	
		Jumlah rencana detail tata ruang tematik	Materi Teknis dan Raperda	1	18	18	14	Kemen ATR/BPN																																																																																											
No.		Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																																																																																											
1.	Peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif																																																																																																		
	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RTR provinsi/ kabupaten/ kota	Materi Teknis dan Raperda	N/A	N/A	N/A	3	Kemen ATR/BPN																																																																																												
	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR	Materi Teknis	N/A	165	36	101	Kemen ATR/BPN																																																																																												
4.	Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas																																																																																																		
	Jumlah rencana detail tata ruang tematik	Materi Teknis dan Raperda	1	18	18	17	Kemen ATR/BPN																																																																																												

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		<i>Indikator baru</i>							Jumlah Rencana Tata Ruang Nasional yang mendukung persiapan pemindahan Ibukota Negara	Materi Teknis dan Ran Perpres	N/A	N/A	N/A	3	Kemen ATR/BPN
		5. Tersusunnya pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis							5. Tersusunnya pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis						
		Jumlah regulasi turunan amanat UU No. 26 tahun 2007 bidang pengendalian pemanfaatan ruang	Naskah Akademis	N/A	N/A	N/A	2	Kemen ATR/BPN	Jumlah regulasi turunan amanat UU No. 26 tahun 2007 bidang pengendalian pemanfaatan ruang	Naskah Akademis	N/A	N/A	N/A	1	Kemen ATR/BPN
		Jumlah aturan tentang perlindungan hukum bagi PPNS penataan ruang	Permen	N/A	N/A	N/A	1	Kemen ATR/BPN	<i>Dihapus</i>						
		7. Pemanfaatan ruang nasional yang berbasis Rencana Tata Ruang di tingkat nasional							7. Pemanfaatan ruang nasional yang berbasis Rencana Tata Ruang di tingkat nasional						
		Jumlah pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program K/L yang sesuai dengan RTR tingkat Nasional	Provinsi	4 KSN, Pulau/Kepulauan	2 KSN, Pulau/Kepulauan	5 KSN, Pulau/Kepulauan	5 KSN, Pulau/Kepulauan	Kemen ATR/BPN	Jumlah pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program K/L yang sesuai dengan RTR tingkat Nasional	Provinsi	4 KSN, Pulau/Kepulauan	2 KSN, Pulau/Kepulauan	5 KSN, Pulau/Kepulauan	6 KSN, Pulau/Kepulauan	Kemen ATR/BPN

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																										
		<p>8. Peningkatan kualitas perangkat pengendalian dan proses penertiban pemanfaatan ruang</p> <table border="1" data-bbox="556 695 1501 1094"> <tr> <td>Jumlah Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS</td> <td>Orang</td> <td>49</td> <td>54</td> <td>200</td> <td>30</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistematis dan lengkap (P3SRL)</td> <td>Kasus</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><i>Indikator baru</i></td> </tr> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	Jumlah Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS	Orang	49	54	200	30	Kemen ATR/BPN	Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistematis dan lengkap (P3SRL)	Kasus	N/A	N/A	34	34	Kemen ATR/BPN	<i>Indikator baru</i>							<p>8. Peningkatan kualitas perangkat pengendalian dan proses penertiban pemanfaatan ruang</p> <table border="1" data-bbox="1527 662 2446 1094"> <tr> <td>Jumlah Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS</td> <td>Orang</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>140</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistematis dan lengkap (P3SRL)</td> <td>Kasus</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>34</td> <td>33</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pelaksanaan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang (P21)</td> <td>Kasus</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>1</td> <td>Kemen ATR/BPN</td> </tr> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	Jumlah Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS	Orang	N/A	N/A	N/A	140	Kemen ATR/BPN	Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistematis dan lengkap (P3SRL)	Kasus	N/A	N/A	34	33	Kemen ATR/BPN	Jumlah pelaksanaan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang (P21)	Kasus	N/A	N/A	N/A	1	Kemen ATR/BPN
Jumlah Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS	Orang	49	54	200	30	Kemen ATR/BPN																																							
Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistematis dan lengkap (P3SRL)	Kasus	N/A	N/A	34	34	Kemen ATR/BPN																																							
<i>Indikator baru</i>																																													
Jumlah Pegawai Yang Dibentuk Menjadi PPNS	Orang	N/A	N/A	N/A	140	Kemen ATR/BPN																																							
Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistematis dan lengkap (P3SRL)	Kasus	N/A	N/A	34	33	Kemen ATR/BPN																																							
Jumlah pelaksanaan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang (P21)	Kasus	N/A	N/A	N/A	1	Kemen ATR/BPN																																							
189.	Arah Kebijakan (perubahan narasi pada poin 2.a, Halaman V.74)	<p>2. mewujudkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib melalui:</p> <p>a. pengaturan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis melalui penyusunan regulasi turunan amanat UU No. 26 tahun 2007 yaitu: (i) naskah akademis PP Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan (ii) naskah akademis Arahan Pengaturan Zonasi Nasional. Selain itu, juga melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait: (i) mekanisme pengenaan sanksi, dan (ii) pedoman penyusunan teknik pengaturan zonasi;</p>	<p>2. mewujudkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib melalui:</p> <p>a. pengaturan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis melalui penyusunan regulasi turunan amanat UU No. 26 tahun 2007 yaitu naskah akademis Arahan Pengaturan Zonasi Nasional. Selain itu, juga melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait: (i) mekanisme pengenaan sanksi, (ii) pedoman penyusunan teknik pengaturan zonasi, dan (iii) pedoman penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistemik dan lengkap (P3SRL);</p>																																										

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																					
5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang																													
5.7.3. Pertanahan																													
190.	Sasaran dan indikator pembangunan bidang pertanahan (perubahan data pada Tabel 5.35. Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Pertanahan, poin 1.a, 3.c, 3.d, 3.e, dan 3.f, Halaman V.75)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017¹⁾</th> <th>2018¹⁾</th> <th>2019¹⁾</th> <th>2020¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> </table>						No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017¹⁾</th> <th>2018¹⁾</th> <th>2019¹⁾</th> <th>2020¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> </table>						No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana
		No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana																				
		No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	K/L Pelaksana																				
		1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah						1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah																					
		Luas peta dasar pertanahan	Hektar	583.568	3.601.500	3.201.000	4.045.000	Kemen ATR/BPN	Luas peta dasar pertanahan	Hektar	583.568	3.601.500	3.201.000	4.070.500	Kemen ATR/BPN														
		3. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat						3. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat																					
		Inventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (IP4T)	Hektar	106.957	659.419	700.000	700.000	Kemen ATR/BPN	Inventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (IP4T)	Hektar	106.957	659.419	700.000	1.161.000	Kemen ATR/BPN														
		Jumlah sertifikat konsolidasi tanah	Bidang	2.391	4.548	10.000	10.000	Kemen ATR/BPN	Jumlah sertifikat konsolidasi tanah	Bidang	2.391	4.548	10.000	10.120	Kemen ATR/BPN														
		Jumlah tanah terindikasi terlan-tar yang ditertib-kan	Bidang	0	50	109	113	Kemen ATR/BPN	Jumlah tanah terindikasi terlan-tar yang ditertib-kan	Bidang	0	50	109	77	Kemen ATR/BPN														
		Gugus Tugas Reforma Agraria	Provinsi/Satker	0	32	63	72	Kemen ATR/BPN	Gugus Tugas Reforma Agraria	Provinsi/Satker	0	32	63	138	Kemen ATR/BPN														
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019																							
Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Keterangan: *) Realisasi; **) Target																							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang 5.7.5. Perkotaan			
191.	Tingkat urbanisasi di Indonesia (perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.79)	Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah mencapai 54 persen di 2015 dan akan bertambah hingga 72,1 persen di tahun 2045 ¹ .	Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah mencapai 54 persen di 2015 dan akan bertambah hingga 67,1 persen di tahun 2045 ² .
192.	Permasalahan pembangunan perkotaan (perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman V.79)	Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan antara lain adalah: (1) belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan bagi masyarakat miskin seperti perumahan, air bersih dan sanitasi, serta pembuangan air limbah dan persampahan; (2) belum tertatanya lingkungan perkotaan dan tingginya kerentanan terhadap bencana; (3) belum terpadunya layanan transportasi massal perkotaan; dan (4) belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana sosial budaya dan olah raga bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, masih diperlukan langkah sistematis untuk memastikan pembangunan perkotaan agar dapat bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal serta keberlanjutan lingkungan perkotaan.	Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan di Indonesia antara lain adalah: (1) belum terintegrasinya perencanaan multisektor dan perencanaan sektor dengan perencanaan spasial ; (2) belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan bagi masyarakat miskin seperti perumahan, air bersih dan sanitasi, serta pembuangan air limbah dan persampahan; (3) belum tertatanya lingkungan perkotaan dan tingginya kerentanan terhadap bencana; (4) belum terpadunya layanan transportasi publik perkotaan ; (5) belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana sosial budaya dan olah raga bagi masyarakat perkotaan; dan (6) kesenjangan pembangunan perkotaan antarwilayah KBI dan KTI . Oleh karena itu, masih diperlukan langkah sistematis untuk memastikan perkotaan Indonesia dapat

¹ *Indonesia Population Projection Revision 2015-2045 (latest estimates)*

² *Indonesia Population Projection Revision 2015-2045 (latest estimates)*

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																					
								bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal dan dapat menangani kesenjangan. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan adalah dengan membangun perkotaan pusat pertumbuhan baru di KTI.																																																																					
193.	Sasaran dan indikator pembangunan bidang perkotaan (perubahan data pada Tabel 5.37. Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Perkotaan, poin 5, Halaman V.79)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.</td> <td colspan="7">Penyiapan calon Ibu Kota Negara Baru</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN</td> <td>Rancangan</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>7</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen Dalam Negeri • Setneg • Setkab • Kemen PAN/RB • Kemenkeu </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perencanaan dan pembangunan termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan fasilitas penunjangnya</td> <td>Dokumen</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>11</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen PUPR </td> </tr> </tbody> </table>						No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	5.	Penyiapan calon Ibu Kota Negara Baru								Penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN	Rancangan	N/A	N/A	N/A	7	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen Dalam Negeri • Setneg • Setkab • Kemen PAN/RB • Kemenkeu 		Perencanaan dan pembangunan termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan fasilitas penunjangnya	Dokumen	N/A	N/A	N/A	11	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen PUPR 	<p style="text-align: center;"><i>(Update sesuai DIPA TA 2020)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.</td> <td colspan="7">Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN</td> <td>Rancangan</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>9</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen Dalam Negeri • Setneg • Setkab • Kemen PAN/RB • Kemenkeu </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perencanaan dan pembangunan termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan fasilitas penunjangnya</td> <td>Dokumen</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>13</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen PUPR </td> </tr> </tbody> </table>						No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	5.	Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)								Penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN	Rancangan	N/A	N/A	N/A	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen Dalam Negeri • Setneg • Setkab • Kemen PAN/RB • Kemenkeu 		Perencanaan dan pembangunan termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan fasilitas penunjangnya	Dokumen	N/A	N/A	N/A	13	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen PUPR
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																																																																						
5.	Penyiapan calon Ibu Kota Negara Baru																																																																												
	Penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN	Rancangan	N/A	N/A	N/A	7	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen Dalam Negeri • Setneg • Setkab • Kemen PAN/RB • Kemenkeu 																																																																						
	Perencanaan dan pembangunan termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan fasilitas penunjangnya	Dokumen	N/A	N/A	N/A	11	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen PUPR 																																																																						
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																																																																						
5.	Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)																																																																												
	Penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN	Rancangan	N/A	N/A	N/A	9	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen Dalam Negeri • Setneg • Setkab • Kemen PAN/RB • Kemenkeu 																																																																						
	Perencanaan dan pembangunan termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan fasilitas penunjangnya	Dokumen	N/A	N/A	N/A	13	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN/ Bappenas • Kemen ATR/BPN • Kemen PUPR 																																																																						

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
		Peningkatan kualitas lahan terlan-tar bekas pertambangan rakyat serta reklamasi kawasan bekas tambang	Provinsi	N/A	N/A	N/A	1	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Kementerian ESDM 	<i>Dihapus</i>						
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Perencanaan Infrastruktur dan Kawasan IKN	Dokumen	N/A	N/A	N/A	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PUPR
									a. Penyiapan lahan IKN dari Kawasan Hutan						
									Inventarisasi dan Verifikasi Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (ha) Kawasan IKN	Hektar	N/A	N/A	N/A	180.640	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK
									<i>Policy Brief</i> Konsep <i>Forest City</i> dalam Perencanaan IKN	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen PPN /Bappenas • KLHK
									Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	Hektar	N/A	N/A	N/A	175.000	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN						
			Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)	Hektar	N/A	N/A	N/A	1.500	• KLHK
			Luas Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi lokasi IKN) (ha)	Hektar	N/A	N/A	N/A	1.200	• KLHK
			Luas lahan untuk pembangunan Kawasan IKN yang diadakan	Hektar	N/A	N/A	N/A	2.000	• ATR/BPN
			Penyusunan Masterplan IKN	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	• Bappenas
			Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen	N/A	N/A	1	1	• KemenPPN /Bappenas • KLHK
			Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim Skala 1:5000	Kabupaten	N/A	N/A	N/A	2	• Badan Informasi Geospasial

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Lanjutan Kegiatan Inventarisasi Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di dalam Kawasan Hutan di kawasan Perluasan IKN	Hektar	N/A	N/A	180.831	73.169	• ATR/BPN
			<p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p> <p>Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>						

5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang

5.7.6. Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

194.	Sasaran dan indikator pembangunan bidang desa, Kawasan perdesaan, dan transmigrasi (perubahan data pada Tabel 5.38. Sasaran dan Indikator Pembangunan/	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{*)}</th> <th>2018^{*)}</th> <th>2019^{*)}</th> <th>2020^{*)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Terbangunnya Kemandirian Desa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Desa tertinggal menjadi</td> <td>Desa</td> <td>2133</td> <td>6518</td> <td>500</td> <td>1700</td> <td>• Kemendes PDTT</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	K/L Pelaksana	1.	Terbangunnya Kemandirian Desa								Jumlah Desa tertinggal menjadi	Desa	2133	6518	500	1700	• Kemendes PDTT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{*)}</th> <th>2018^{*)}</th> <th>2019^{*)}</th> <th>2020^{*)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Terbangunnya Kemandirian Desa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Desa tertinggal yang meningkat</td> <td>Desa</td> <td>2133</td> <td>6518</td> <td>500</td> <td>- (transisi)</td> <td>• Kemendes PDTT</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	K/L Pelaksana	1.	Terbangunnya Kemandirian Desa								Jumlah Desa tertinggal yang meningkat	Desa	2133	6518	500	- (transisi)	• Kemendes PDTT
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	K/L Pelaksana																																												
1.	Terbangunnya Kemandirian Desa																																																		
	Jumlah Desa tertinggal menjadi	Desa	2133	6518	500	1700	• Kemendes PDTT																																												
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	K/L Pelaksana																																												
1.	Terbangunnya Kemandirian Desa																																																		
	Jumlah Desa tertinggal yang meningkat	Desa	2133	6518	500	- (transisi)	• Kemendes PDTT																																												

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
	Pengarusutamaan Bidang Desa, Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi, poin 1.a, 1.b, dan 2.b, Halaman V.83)	Desa berkembang						<ul style="list-style-type: none"> • Kemen Dagri • dan lain-lain 	menjadi Desa berkembang					penajaman indikator, menjadi 1.c.)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen Dagri • dan lain-lain
		Jumlah Desa berkembang yang meningkat menjadi Desa mandiri	Desa	825	2665	200	300		Jumlah Desa berkembang yang meningkat menjadi Desa mandiri	Desa	825	2665	200	- (transisi penajaman indikator, menjadi 1.c.)	
									Peningkatan rata-rata Indeks Desa***	Nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD)	N/A	3,65	0,4	0,61	
		2. Berkembangnya Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi						2. Berkembangnya Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi							
									Jumlah kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten yang dikembangkan	Kabupaten	24	38	60	- (transisi penajaman indikator menjadi 2.b)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendes PDTT • dan lain-lain

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																											
5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang 5.7.7. Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan																																																																																			
195.	Sasaran dan indikator pembangunan bidang daerah tertinggal dan Kawasan perbatasan (perubahan data pada Tabel 5.39. Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan, poin 1.a, 1.b, dan 1.e, Halaman V.85)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{*)}</th> <th>2018^{*)}</th> <th>2019^{*)}</th> <th>2020^{*)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Terbangunnya pusat -pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara</td> <td>Kecamatan</td> <td>150</td> <td>187</td> <td>187</td> <td>187</td> <td>Seluruh K/L</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) termasuk ekonomi Kawasan sekitarnya</td> <td>Lokasi</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>Seluruh K/L</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal</td> <td>Nilai</td> <td>57,34</td> <td>58,26**</td> <td>58,81**</td> <td>59,38**</td> <td>Seluruh K/L</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	K/L Pelaksana	1.	Terbangunnya pusat -pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa								Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara	Kecamatan	150	187	187	187	Seluruh K/L		Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) termasuk ekonomi Kawasan sekitarnya	Lokasi	10	10	10	7	Seluruh K/L		Rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal	Nilai	57,34	58,26**	58,81**	59,38**	Seluruh K/L	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017^{*)}</th> <th>2018^{*)}</th> <th>2019^{*)}</th> <th>2020^{*)}</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="7">Terbangunnya pusat -pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara</td> <td>Kecamatan</td> <td>150</td> <td>187</td> <td>187</td> <td>157</td> <td>Seluruh K/L</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)</td> <td>Lokasi</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>Seluruh K/L</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal</td> <td>Nilai</td> <td>57,34</td> <td>58,11</td> <td>58,82**</td> <td>59,54**</td> <td>Seluruh K/L</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	K/L Pelaksana	1.	Terbangunnya pusat -pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa								Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara	Kecamatan	150	187	187	157	Seluruh K/L		Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Lokasi	10	10	10	14	Seluruh K/L		Rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal	Nilai	57,34	58,11	58,82**	59,54**	Seluruh K/L
		No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	K/L Pelaksana																																																																										
		1.	Terbangunnya pusat -pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa																																																																																
			Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara	Kecamatan	150	187	187	187	Seluruh K/L																																																																										
			Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) termasuk ekonomi Kawasan sekitarnya	Lokasi	10	10	10	7	Seluruh K/L																																																																										
	Rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal	Nilai	57,34	58,26**	58,81**	59,38**	Seluruh K/L																																																																												
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{*)}	2020 ^{*)}	K/L Pelaksana																																																																												
1.	Terbangunnya pusat -pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa																																																																																		
	Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara	Kecamatan	150	187	187	157	Seluruh K/L																																																																												
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Lokasi	10	10	10	14	Seluruh K/L																																																																												
	Rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal	Nilai	57,34	58,11	58,82**	59,54**	Seluruh K/L																																																																												
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target																																																																																	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																
5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana																																																																			
196.	Perubahan pada paragraf 1, Halaman V.89	pembangunan infrastruktur dalam rancangan RPJMN 2020-2024 yaitu: Kesetaraan Gender; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Pembangunan Berkelanjutan; Modal dan Sosial Budaya; Transformasi Digital; dan Ketahanan Bencana. Hal ini juga didukung oleh mendorong strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan kreatif seperti KPBU dan PINA.	Pengarusahaan pembangunan infrastruktur dalam rancangan RPJMN 2020-2024 yaitu: Kesetaraan Gender; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Pembangunan Berkelanjutan; Modal dan Sosial Budaya; Transformasi Digital; dan Ketahanan Bencana. Hal ini juga didukung dengan mendorong strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan kreatif seperti KPBU dan pembayaran kreatif.																																																																
197.	Perubahan pada paragraf 2, Halaman V.89	(1) keterbatasan cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman, yang hanya terdapat 19,53 persen rumah tangga (tahun 2019) menggunakan akses air minum perpipaan dan hanya 7,42 persen rumah tangga (tahun 2018) dengan akses sanitasi aman;	(1) keterbatasan cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman, yang hanya terdapat 20,45 persen rumah tangga (tahun 2019) menggunakan akses air minum perpipaan dan 7,42 persen rumah tangga (tahun 2018) dengan akses sanitasi aman;																																																																
198.	Perubahan pada paragraf 3, Halaman V.89	(3) belum optimalnya kapasitas dan dukungan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran (penyediaan SPAM dan penyertaan modal daerah ke PDAM) dan penyusunan peraturan perundangan yg mendukung penyediaan akses air minum (penetapan tarif); (6) kerentanan terhadap bencana masih cukup tinggi di wilayah Indonesia, terutama terhadap bencana banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapi, dimana Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional masih sebesar 137,5 dari target awal sebesar 132,8 pada tahun 2018, dan kerugian finansial Indonesia akibat bencana alam pada 5 tahun terakhir ini cukup tinggi, yaitu sebesar mencapai 12,58 miliar USD per tahun;	(3) belum optimalnya kapasitas dan dukungan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran (penyediaan SPAM dan penyertaan modal daerah ke PDAM) serta dukungan penetapan tarif air minum; (6) kerentanan terhadap bencana masih cukup tinggi di wilayah Indonesia, terutama terhadap bencana banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapi, dimana Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional masih sebesar 137,5 dari target awal sebesar 132,8 pada tahun 2018, dan kerugian finansial Indonesia akibat bencana alam pada kurun waktu 2002-2015 adalah 1,26 miliar USD per tahun (<i>International Disaster Database, 2018</i>);																																																																
199.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana (Perubahan data pada Tabel 5.41 Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana, Halaman V.91)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Perumahan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Terfasilitasinya penyediaan hunian baru layak bagi masyarakat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah hunian baru</td> <td>Unit</td> <td>20.288</td> <td>22.209</td> <td>17.003</td> <td>46.314</td> <td>Kemen PUPR</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	Perumahan								1	Terfasilitasinya penyediaan hunian baru layak bagi masyarakat								Jumlah hunian baru	Unit	20.288	22.209	17.003	46.314	Kemen PUPR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> <th>K/L Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Perumahan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Terfasilitasinya penyediaan hunian baru layak bagi masyarakat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah hunian baru layak yang terbangun</td> <td>Unit</td> <td>20.298</td> <td>22.194</td> <td>17.003</td> <td>39.390</td> <td>Kemen PUPR</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana	Perumahan								1	Terfasilitasinya penyediaan hunian baru layak bagi masyarakat								Jumlah hunian baru layak yang terbangun	Unit	20.298	22.194	17.003	39.390	Kemen PUPR
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																																																												
Perumahan																																																																			
1	Terfasilitasinya penyediaan hunian baru layak bagi masyarakat																																																																		
	Jumlah hunian baru	Unit	20.288	22.209	17.003	46.314	Kemen PUPR																																																												
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	K/L Pelaksana																																																												
Perumahan																																																																			
1	Terfasilitasinya penyediaan hunian baru layak bagi masyarakat																																																																		
	Jumlah hunian baru layak yang terbangun	Unit	20.298	22.194	17.003	39.390	Kemen PUPR																																																												

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
	Perumahan	layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah							melalui fasilitasi pemerintah								
		2	Terfasilitasinya pembiayaan perumahan bagi masyarakat							2	Terfasilitasinya pembiayaan perumahan bagi masyarakat						
		Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/ subsidi perumahan	Rumah Tangga	212.489	260.731	169.170	110.000	Kemen PUPR	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/ subsidi perumahan	Rumah Tangga	255.087	260.729	174.078	110.300	Kemen PUPR		
		3	Terfasilitasinya peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat							3	Terfasilitasinya peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat						
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas	Rumah Tangga	164.508	250.806	254.000	220.000	• Kemen PUPR • Kemensos	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas	Rumah Tangga	164.508	250.806	254.000	225.800	• Kemen PUPR • Kemensos		
		4	Tersedianya infrastruktur dasar permukiman							4	Tersedianya infrastruktur dasar permukiman						
		Jumlah kawasan perumahan dan permukiman baru yang mendapatkan peningkatan layanan	Kawasan	N/A	N/A	N/A	2	Kemen PUPR	Luas kawasan perumahan dan permukiman eksisting yang mendapatkan peningkatan layanan infrastruktur dasar	Hektar	N/A	N/A	N/A	2.733,02	Kemen PUPR		

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
	Air Minum dan Sanitasi	yang terbangun							yang terbangun						
		Kapasitas SPAM terbangun yang dikembangkan	lpd	N/A	177.892	192.692	208.931	Kemen PUPR	Kapasitas SPAM yang dikembangkan	lpd	5.123	4.311	3.654	2.105	Kemen PUPR
		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM baru	SR	N/A	N/A	1.754.694	3.509.388	Kemen PUPR	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM baru	SR	1.155.000	1.221.000	1.148.000	1.000.000	Kemen PUPR
2		Terbinanya pemda provinsi, pemda kab/kota dan penyelenggara SPAM dalam penyelenggaraan SPAM serta terlaksananya pengembangan layanan sanitasi permukiman yang berkelanjutan							2 Terbinanya pemda provinsi, pemda kab/kota dan penyelenggara SPAM dalam penyelenggaraan SPAM serta terlaksananya pengembangan layanan sanitasi permukiman yang berkelanjutan						
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki RISPAM 100% Aman	Kabupaten/ Kota	410	415	507	514	Kemen PUPR	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki RISPAM 100%	Kab/ Kota	410	415	507	514	Kemen PUPR
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan lumpur air limbah	Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	63 Kab/ Kota terfasilitasi pengelolaan lumpur tinja (Akumulasi RPJMN 2015-2019)	66	• Kemen dagri • Kemen PUPR	Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)	Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	63 Kab/ Kota terfasilitasi pengelolaan lumpur tinja (Akumulasi RPJMN 2015-2019)	66	• Kemen dagri • Kemen PUPR

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		Jumlah desa/ kelurahan yang mendapatkan program perubahan perilaku	Desa/ Kelurahan	N/A	N/A	20.000 (Akumulasi RPJMN 2015-2019)	31.158	Kemenkes	Jumlah desa/ kelurahan yang mendapatkan program perubahan perilaku	Desa/ Kelurahan	N/A	N/A	20.000 (Akumulasi RPJMN 2015-2019)	33.158	Kemenkes		
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								
201.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana (Perubahan data pada Tabel 5.41 Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana, Halaman V.95) Sumber Daya Air	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{**)}	2020^{**)}	K/L Pelaksana	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017^{*)}	2018^{*)}	2019^{**)}	2020^{**)}	K/L Pelaksana
		Sumber Daya Air									Sumber Daya Air						
		1	Tersedianya sarana dan prasarana sumber daya air untuk pertanian dan perikanan							1	Tersedianya sarana dan prasarana sumber daya air untuk pertanian dan perikanan						
			Luas jaringan irigasi yang dibangun	Juta Ha	0,22	0,22	0,14	0,08	Kemen PUPR		Luas jaringan irigasi yang dibangun	Juta Ha	0,22	0,22	0,14	0,02	Kemen PUPR
			Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi	Juta Ha	0,55	0,28	0,37	0,29	Kemen PUPR		Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi	Juta Ha	0,55	0,28	0,37	0,08	Kemen PUPR
		2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air							2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air						
			Panjang pengendali banjir yang dibangun	Km	162	190	131	220	Kemen PUPR		Panjang pengendali banjir yang dibangun	Km	162	190	131	136	Kemen PUPR
			Panjang pengaman	Km	20	22	24	30	Kemen PUPR		Panjang pengaman	Km	20	22	24	21,5	Kemen PUPR

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020									
			pantai yang dibangun															
		3	Meningkatnya ketersediaan air untuk sosial dan ekonomi produktif							3	Meningkatnya ketersediaan air untuk sosial dan ekonomi produktif							
			Jumlah bendungan yang dibangun (kumulatif, unit)	Unit	43	57	65	70	Kemen PUPR		Jumlah bendungan yang dibangun	Unit	38	47	47	45	Kemen PUPR	
			- Jumlah bendungan yang selesai dibangun (kumulatif, unit)	Unit	9	19	29	34			- Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Unit	2	5	2	11		
			- Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan (kumulatif, unit)	Unit	34	38	36	36			- Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan	Unit	34	42	45	34		
			Jumlah embung/ bangunan penampung air yang dibangun	Unit	117	103	139	100	Kemen PUPR		Jumlah embung/ bangunan penampung air yang dibangun	Unit	117	99	120	70	Kemen PUPR	
		4	Meningkatnya penyediaan air baku/air minum							4	Meningkatnya penyediaan air baku/air minum							
			Nilai peningkatan kapasitas air baku nasional	m ³ /detik	4,34	4,59	5,00	5,50	Kemen PUPR		Peningkatan kapasitas air baku nasional	m ³ /detik	4,34	7,46	5,00	4,27	Kemen PUPR	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">5 Meningkatkan kinerja tata kelola PSDA terpadu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai kewenangan pusat yang disusun/ <i>di-review</i></td> <td>Dokumen</td> <td>44</td> <td>49</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>Kemen PUPR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya</td> <td>Unit</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>Kemen PUPR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah rencana nasional pengembangan dan pengelolaan rawa terpadu</td> <td>Dokumen</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>1</td> <td>Kemen PUPR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah peraturan perundangan Sumber Daya Air yang diselesaikan</td> <td>Dokumen</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>1</td> <td>Kemen PUPR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	5 Meningkatkan kinerja tata kelola PSDA terpadu								Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai kewenangan pusat yang disusun/ <i>di-review</i>	Dokumen	44	49	62	62	Kemen PUPR		Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	N/A	N/A	68	68	Kemen PUPR		Jumlah rencana nasional pengembangan dan pengelolaan rawa terpadu	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	Kemen PUPR		Jumlah peraturan perundangan Sumber Daya Air yang diselesaikan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	Kemen PUPR		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">5 Meningkatkan kinerja tata kelola PSDA terpadu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai kewenangan pusat yang disusun/ <i>di-review</i></td> <td>Dokumen</td> <td>44</td> <td>49</td> <td>62</td> <td>35</td> <td>Kemen PUPR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya</td> <td>Unit</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>68</td> <td>34</td> <td>Kemen PUPR</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Dihapus</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Dihapus</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	5 Meningkatkan kinerja tata kelola PSDA terpadu								Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai kewenangan pusat yang disusun/ <i>di-review</i>	Dokumen	44	49	62	35	Kemen PUPR		Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	N/A	N/A	68	34	Kemen PUPR		<i>Dihapus</i>								<i>Dihapus</i>							
5 Meningkatkan kinerja tata kelola PSDA terpadu																																																																																			
Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai kewenangan pusat yang disusun/ <i>di-review</i>	Dokumen	44	49	62	62	Kemen PUPR																																																																													
Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	N/A	N/A	68	68	Kemen PUPR																																																																													
Jumlah rencana nasional pengembangan dan pengelolaan rawa terpadu	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	Kemen PUPR																																																																													
Jumlah peraturan perundangan Sumber Daya Air yang diselesaikan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	Kemen PUPR																																																																													
5 Meningkatkan kinerja tata kelola PSDA terpadu																																																																																			
Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai kewenangan pusat yang disusun/ <i>di-review</i>	Dokumen	44	49	62	35	Kemen PUPR																																																																													
Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	N/A	N/A	68	34	Kemen PUPR																																																																													
<i>Dihapus</i>																																																																																			
<i>Dihapus</i>																																																																																			
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target																																																																											

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ^{*)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	K/L Pelaksana
202.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana (Perubahan data pada Tabel 5.41 Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana, Halaman V.97) Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							Komunikasi dan Informatika								
		1	Meningkatnya peran layanan TIK dan penyiaran dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat							1	Meningkatnya peran layanan TIK dan penyiaran dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat						
			Jumlah penataan spektrum frekuensi radio dalam mendukung terlaksananya transformasi digital	Kebijakan	1	1	1	4	Kemen kominfo		Jumlah penataan spektrum frekuensi radio dalam mendukung terlaksananya transformasi digital	Kebijakan	1	1	1	3	Kemen kominfo
			Jumlah kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) yang beroperasi (kumulatif, unit)	Unit	2.340	2.475	2.350	2.350	Kemen kominfo		Jumlah kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) yang beroperasi (kumulatif, unit)	Unit	2.340	2.475	2.350	2.475	Kemen kominfo
	Jumlah kebijakan bidang telekomunikasi dalam mendukung ekonomi digital	Dokumen	N/A	N/A	12	13	Kemen kominfo		Jumlah kebijakan bidang telekomunikasi dalam mendukung ekonomi digital	Dokumen	N/A	N/A	12	14	Kemen kominfo		
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target							Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target								

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
				Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi kereta api	Orang	947	4,901	10,070	9,343	Kemenhub	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi kereta api	Orang	947	4,901	9,542
		Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi laut	Orang	356,564	323,970	390,658	341,406	Kemenhub	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi laut	Orang	356,564	323,970	378,030	333,250	Kemenhub
		Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi udara	Orang	10,390	33,412	31,161	36,572	Kemenhub	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi udara	Orang	10,390	33,412	24,849	21,582	Kemenhub
		3	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian						Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian						
			Panjang jaringan KA yang dioperasikan dan dipelihara (kumulatif, km)	Km	3,848	2,734	2,750	5,430	Kemenhub	Panjang jaringan KA yang dioperasikan dan dipelihara (kumulatif, km)	Km	5,565	6,164	6,382	Kemenhub

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif, km)	Km	369 (369)	386 (755)	445 (1200)	275 (1475)	Kemenhub	Panjang jaringan KA yang terbangun (km)	Km	225 -	351 -	248 -	218 -	Kemenhub
		Jumlah rute kereta api yang mendapat Subsidi	Rute	6	8	7	8	Kemenhub	Jumlah rute kereta api yang mendapat Subsidi	Rute	6	8	6	7	Kemenhub
		4 Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut						4 Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut							
		Jumlah penyediaan sarana prasarana kenavigasian pelayaran	Paket	41	181	86	60	Kemenhub	Jumlah penyediaan sarana prasarana kenavigasian pelayaran	Paket	40	191	79	102	Kemenhub
		Jumlah pelabuhan laut yang dibangun atau dikembangkan	Lokasi	175	75	52	60	Kemenhub	Jumlah pelabuhan laut yang dibangun atau dikembangkan	Lokasi	99	22	56	42	Kemenhub
		Jumlah rute angkutan laut yang mendapat subsidi	Rute	117	134	113	157	Kemenhub	Jumlah rute angkutan laut yang mendapat subsidi	Rute	110	137	140	140	Kemenhub
		5 Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara						5 Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						
			Jumlah bandar udara yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	Lokasi	180	180	151	150	Kemenhub	Jumlah bandar udara yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	Lokasi	22	30	58
	Jumlah bandar udara baru yang dibangun	Lokasi	3	4	4	7	Kemenhub	Jumlah bandar udara baru yang dibangun	Lokasi	7	8	4	7	Kemenhub
	Jumlah rute angkutan udara perintis yang mendapat subsidi	Rute	201	239	232	201	Kemenhub	Jumlah rute angkutan udara perintis yang mendapat subsidi	Rute	180	209	192	188	Kemenhub
7	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan						7	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan						
	Persentase mantap jalan nasional	Persen	91	93	94	95	Kemen PUPR	Persentase mantap jalan nasional	Persen	91	93	94	92.05	Kemen PUPR
	Panjang jalan nasional yang dipreservasi	Km	42,154	46,813	46,564	47,017	Kemen PUPR	Panjang jalan nasional yang dipreservasi	Km	42.154	46.813	46.564	47.017	Kemen PUPR
	Panjang jalan nasional yang terbangun	Km	776	766	739	935	Kemen PUPR	Panjang jalan nasional yang terbangun	Km	776	766	739	500,65	Kemen PUPR
	Jumlah jembatan	Lokasi	12	20	20	20	Kemen PUPR	Jumlah jembatan yang terbangun	Lokasi	12	20	20	126	Kemen PUPR

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020							
		yang terbangun							Jumlah jembatan, flyover, under-pass, atau terowongan yang terbangun	Lokasi	-	6	6	6	Kemen PUPR
		Jumlah jembatan, flyover, under-pass, atau terowongan yang terbangun	Lokasi	-	6	6	12	Kemen PUPR							
		8 Meningkatkan pengelolaan Pencarian dan Pertolongan													
		Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Paket					Basarnas	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Paket					Basarnas
		a. Rescue boat		a. 5	a. 3	a. 2	a. 10		a. Rescue boat		a. 5	a. 3	a. 2	a. 6	
		b. Helicopter		b. -	b. 2	b. 2	b. 2		b. Helicopter		b. -	b. 2	b. 2	b. 2	
		c. Rescue car		c. 23	c. 10	c. 13	c. 13		c. Rescue car		c. 23	c. 10	c. 13	c. 38	
		9 Meningkatkan pengembangan wilayah Suramadu													
		Luas kawasan yang dikembangkan	Ha	11	4	6	6	BPWS	Luas kawasan yang dikembangkan	Ha	11	4	7	50	BPWS
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target													
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target													

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
205.	Arah Kebijakan (Perubahan pada narasi pada poin 2, 3, 4, dan 15, Halaman V.102 dan V.104)	<p>2. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman melalui strategi: (a) peningkatan tatakelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman; (b) peningkatan kapasitas teknis penyelenggara air minum; (c) penyediaan dan pemanfaatan kapasitas idle infrastruktur SPAM; (d) perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman; (e) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; (f) peningkatan komitmen daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan; (g) pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; (h) peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi; dan (i) pengembangan kerja sama dan pola pendanaan;</p> <p>3. Meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap Modernisasi Irigasi; (b) pengembangan sinergi antara badan usaha air baku dengan SPAM; (c) pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur tampungan air sebagai tampungan air multiguna (air, pangan, penahan banjir, dan PLTA); (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase, serta penyediaan <i>room for the river</i>; dan (e) pengendalian bencana melalui infrastruktur tahan bencana, infrastruktur hijau, dan pembangunan tanggul laut di utara Jawa secara terintegrasi;</p>	<p>2. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman melalui strategi: (a) peningkatan tatakelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman; (b) peningkatan kapasitas teknis penyelenggara air minum; (c) peningkatan pengelolaan aset sistem penyediaan air minum; (d) pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun; (e) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; (f) peningkatan komitmen daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan; (g) pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; (h) peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi; dan (i) pengembangan kerja sama dan pola pendanaan;</p> <p>3. Meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap Modernisasi Irigasi; (b) penyediaan air baku di kawasan prioritas, rawan air, dan pulau kecil terluar, serta pengembangan sinergi antara badan usaha air baku dengan SPAM; (c) pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur tampungan air sebagai tampungan air multiguna (air, pangan, penahan banjir, dan PLTA); (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase, penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir serta penyediaan <i>room for the river</i>; dan (e) pengendalian bencana melalui pengembangan infrastruktur tahan bencana, konservasi daerah aliran sungai, dan pengelolaan terpadu kawasan pesisir utara Jawa;</p>
		<p>4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan serta pendanaannya dengan strategi antara lain: (a) transformasi industri ketenagalistrikan yang efisien dan transparan; (b) kebijakan tarif dan harga energi dan ketenagalistrikan yang optimal; (c) penyediaan pembiayaan alternatif dan insentif untuk mendorong perluasan akses layanan dan pemanfaatan EBT serta efisiensi energi; dan (d) penyediaan dukungan pembiayaan untuk akses energi bagi masyarakat yang tidak mampu (bantuan pasang baru listrik);</p>	<p>4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan serta pendanaannya dengan strategi antara lain: (a) transformasi industri ketenagalistrikan yang efisien dan transparan; (b) kebijakan tarif dan harga energi dan ketenagalistrikan yang optimal; (c) penyediaan pembayaran kreatif dan insentif untuk mendorong perluasan akses layanan dan pemanfaatan EBT serta efisiensi energi; dan (d) penyediaan dukungan pembiayaan untuk akses energi bagi masyarakat yang tidak mampu (bantuan pasang baru listrik);</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		15. Meningkatkan kapasitas pendanaan dalam investasi sektor infrastruktur dengan cara: (a) menguatkan strategi koordinasi antar-K/L/Pemda dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan (debottlenecking) dengan mengoptimisasi Kantor Bersama KPBU; (b) mengefektifkan daftar proyek (Project Development and Pipelines) melalui penyiapan daftar proyek KPBU dan PINA; (c) mereformasi kebijakan tarif; (d) meningkatkan kapasitas fiskal melalui reformasi pajak oleh pemerintah pusat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); dan (e) merealokasi Anggaran Belanja Pemerintah.	15. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan skema KPBU dengan cara: (a) menguatkan strategi koordinasi antar-K/L/Pemda dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan (debottlenecking) dengan mengoptimisasi Kantor Bersama KPBU; (b) mengoptimisasi penggunaan daftar proyek (Project Development and Pipelines) melalui penyiapan daftar proyek KPBU dan pembiayaan kreatif.

5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

206.	<p>Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah Hasil Hortikultura</p> <p>(Perubahan Tabel 5.42 Target indikator sasaran, halaman V.105)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Hasil Hortikultura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kentang</td> <td>Ribu ton</td> <td>1.165</td> <td>1.285</td> <td>1.431</td> <td>1.508</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Hasil Peternakan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Produksi Telur</td> <td>Ribu ton</td> <td>2.106,9^(a)</td> <td>3.655,4</td> <td>3.770,0</td> <td>3.800,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Produksi Susu</td> <td>Ribu ton</td> <td>920,1^(a)</td> <td>980,9</td> <td>1.063,6</td> <td>1.100,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Produk Perikanan Olahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume produk olahan</td> <td>Juta ton</td> <td>6,2</td> <td>6,5</td> <td>6,8</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peningkatan produksi mineral (ton)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Logam Tembaga</td> <td>Ton</td> <td>245.368^(b)</td> <td>310.000</td> <td>291.000</td> <td>253.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	1	Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan							Jumlah Hasil Hortikultura							- Kentang	Ribu ton	1.165	1.285	1.431	1.508		Jumlah Hasil Peternakan							- Produksi Telur	Ribu ton	2.106,9 ^(a)	3.655,4	3.770,0	3.800,0		- Produksi Susu	Ribu ton	920,1 ^(a)	980,9	1.063,6	1.100,0		Jumlah Produk Perikanan Olahan							Volume produk olahan	Juta ton	6,2	6,5	6,8	7,0	2	Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan							Peningkatan produksi mineral (ton)							- Logam Tembaga	Ton	245.368 ^(b)	310.000	291.000	253.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>2017⁽¹⁾</th> <th>2018⁽¹⁾</th> <th>2019⁽¹⁾</th> <th>2020⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Hasil Hortikultura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Durian</td> <td>Ribu ton</td> <td>795,2</td> <td>1.142</td> <td>1.176</td> <td>1.152</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Hasil Peternakan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Produksi Telur</td> <td>Ribu ton</td> <td>2.089,9</td> <td>2.311</td> <td>2.371,4</td> <td>3.800,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Produksi Susu</td> <td>Ribu ton</td> <td>928,1</td> <td>951</td> <td>996,4</td> <td>1.100,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Produk Perikanan Olahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volume produk olahan</td> <td>Juta ton</td> <td>6,2</td> <td>6,5</td> <td>6,8</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peningkatan produksi mineral (ton)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Logam Tembaga</td> <td>Ton</td> <td>245.368^(b)</td> <td>310.000</td> <td>291.000</td> <td>291.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	1	Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan							Jumlah Hasil Hortikultura							Durian	Ribu ton	795,2	1.142	1.176	1.152		Jumlah Hasil Peternakan							- Produksi Telur	Ribu ton	2.089,9	2.311	2.371,4	3.800,0		- Produksi Susu	Ribu ton	928,1	951	996,4	1.100,0		Jumlah Produk Perikanan Olahan							Volume produk olahan	Juta ton	6,2	6,5	6,8	6,9	2	Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan							Peningkatan produksi mineral (ton)							- Logam Tembaga	Ton	245.368 ^(b)	310.000	291.000	291.000
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾																																																																																																																																																																					
1	Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan																																																																																																																																																																										
	Jumlah Hasil Hortikultura																																																																																																																																																																										
	- Kentang	Ribu ton	1.165	1.285	1.431	1.508																																																																																																																																																																					
	Jumlah Hasil Peternakan																																																																																																																																																																										
	- Produksi Telur	Ribu ton	2.106,9 ^(a)	3.655,4	3.770,0	3.800,0																																																																																																																																																																					
	- Produksi Susu	Ribu ton	920,1 ^(a)	980,9	1.063,6	1.100,0																																																																																																																																																																					
	Jumlah Produk Perikanan Olahan																																																																																																																																																																										
	Volume produk olahan	Juta ton	6,2	6,5	6,8	7,0																																																																																																																																																																					
2	Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan																																																																																																																																																																										
	Peningkatan produksi mineral (ton)																																																																																																																																																																										
	- Logam Tembaga	Ton	245.368 ^(b)	310.000	291.000	253.000																																																																																																																																																																					
No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾																																																																																																																																																																					
1	Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan																																																																																																																																																																										
	Jumlah Hasil Hortikultura																																																																																																																																																																										
	Durian	Ribu ton	795,2	1.142	1.176	1.152																																																																																																																																																																					
	Jumlah Hasil Peternakan																																																																																																																																																																										
	- Produksi Telur	Ribu ton	2.089,9	2.311	2.371,4	3.800,0																																																																																																																																																																					
	- Produksi Susu	Ribu ton	928,1	951	996,4	1.100,0																																																																																																																																																																					
	Jumlah Produk Perikanan Olahan																																																																																																																																																																										
	Volume produk olahan	Juta ton	6,2	6,5	6,8	6,9																																																																																																																																																																					
2	Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan																																																																																																																																																																										
	Peningkatan produksi mineral (ton)																																																																																																																																																																										
	- Logam Tembaga	Ton	245.368 ^(b)	310.000	291.000	291.000																																																																																																																																																																					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020					
		- Logam Emas	Ton	82 ^{b)}	75	120	75	- Logam Emas	Ton	82 ^{b)}	75	120	69
		- Logam Perak	Ton	259 ^{b)}	231	290	250	- Logam Perak	Ton	259 ^{b)}	231	290	267
		- Logam Timah	Ton	68.702 ^{b)}	50.000	70.000	85.000	- Logam Timah	Ton	68.702 ^{b)}	50.000	70.000	70.000
		- Feronikel	Ton	598.125 ^{b)}	860.000	860.000	1.014.000	- Feronikel	Ton	598.125 ^{b)}	860.000	860.000	1.838.000
		Peningkatan nilai tambah/hilirisasi						Peningkatan nilai tambah/hilirisasi					
		Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri/ Smelter (unit)*	Unit	5 ^{b)}	2	1	1	Jumlah pengawa-san fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)	Unit	5 ^{b)}	2	1	30
		3 Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat dan kerjasama antarwilayah						3 Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat dan kerjasama antarwilayah					
		Jumlah kemitraan konservasi perairan	Kemitra-an	10 ^{a)}	15	20	20	Jumlah kemitraan konservasi perairan	Kemitra-an	10 ^{a)}	15	20	25
		4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika						4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika					
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup						Peningkatan kualitas lingkungan hidup					
		Jumlah penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkat-kan	Naskah Jurnal Akre-ditasi	N/A	N/A	N/A	8	Jumlah Produk Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Imple-mentatif	Produk	N/A	N/A	N/A	52

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020						PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020								
		daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat														
		Jumlah ton B3 yang terkelola untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan	Ton	600.000	587.615,49	600.000	1.200.000	Jumlah ton B3 yang terkelola	Ton	600.000	587.615,49	600.000	6.000.000			
		Peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika						Peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika								
		Tingkat Akurasi Kualitas Layanan Informasi di Bidang MKG	Persen	N/A***	N/A***	N/A***	75,7	Persen-tase layanan pengelola-an pera-latan opera-sional utama MKGU berbasis teknologi informasi dan komuni-kasi yang terinteg-rasi	Persen	N/A***	N/A***	N/A***	88			
		Persentase layanan pengelolaan peralatan operasional utama MKGU berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Persen	N/A***	N/A***	N/A***	87									
		Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019						Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019								
		Keterangan: *) Realisasi; **) Target						Keterangan: *) Realisasi; **) Target								

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020																
BAB 6 KAJIDAH PELAKSANAAN																			
6.1 Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi																			
207.	Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi (perubahan data pada paragraf 4 halaman VI.2)	Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2020 sebesar 6,9 – 7,3 persen, dikembangkan arah kebijakan pelayanan umum dan investasi serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1.	Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2020 sebesar 6,0 persen, dikembangkan arah kebijakan pelayanan umum dan investasi serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1.																
208.	Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi (perubahan narasi pada Tabel 6.1 halaman VI.2)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi</th> <th>Dukungan Kegiatan Prioritas</th> <th>PN.PP.KP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Peningkatan pelayanan umum dalam bidang kependudukan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan</td> <td>Sistem Jaminan Sosial Nasional</td> <td>1.1.1</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</td> <td>1.3.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas	PN.PP.KP	Peningkatan pelayanan umum dalam bidang kependudukan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan	Sistem Jaminan Sosial Nasional	1.1.1	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.3.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi</th> <th>Dukungan Kegiatan Prioritas</th> <th>PN.PP.KP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Peningkatan pelayanan umum dalam bidang kependudukan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan</td> <td>Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri</td> <td>1.1.1</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran</td> <td>1.3.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas	PN.PP.KP	Peningkatan pelayanan umum dalam bidang kependudukan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan	Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri	1.1.1	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran	1.3.1
Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas	PN.PP.KP																	
Peningkatan pelayanan umum dalam bidang kependudukan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan	Sistem Jaminan Sosial Nasional	1.1.1																	
	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.3.1																	
Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas	PN.PP.KP																	
Peningkatan pelayanan umum dalam bidang kependudukan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan	Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peningkatan Kepesertaan Mandiri	1.1.1																	
	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran	1.3.1																	
6.3 Kerangka Regulasi																			
6.3.1 Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP 2020																			
209.	Bagan Peraturan Pemerintah (poin A) (Halaman VI.10)	<p>a. Undang-Undang</p> <p>1) Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>2) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>	<p>a. Undang-Undang</p> <p>1) Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>2) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>3) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.</p>																
210.	Bagan Peraturan Pemerintah (poin B no. 1) (Halaman VI.10)	1) Revisi Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.	<i>Dihapus</i>																
211.	Bagan Peraturan Pemerintah (poin B no.5) (Halaman VI.10)	5) Penyederhanaan regulasi (revisi dan gabung) untuk tiga Peraturan Pemerintah sebagai berikut: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang	5) Penyederhanaan regulasi (revisi dan gabung) untuk tiga Peraturan Pemerintah sebagai berikut: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun; dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015																

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
		Penyelenggaraan Jaminan Pensiun; c) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.	tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
6.4 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian			
6.4.2 Pengendalian			
212.	Mekanisme Pengendalian (Perubahan narasi pada Paragraf 2 dan 3 Halaman VI.14)	Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP strategis mencakup dua hal, yaitu tindakan konstruktif dan tindakan preventif. Tindakan konstruktif adalah tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan PP/KP, yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan: (a) kebijakan <i>refocusing</i> (pemfokusan kembali), (b) kebijakan reorientasi (peninjauan ulang), dan (c) kebijakan restrukturisasi (penataan kembali). Tindakan preventif adalah tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan pelaksanaan PP/KP strategis yang tidak sesuai target, yang dimungkinkan pula sampai pada keputusan untuk menghentikan pelaksanaan PP/KP strategis yang sifatnya penghentian sementara ataupun penghentian tetap apabila diperlukan (<i>suspend/pinalty</i>) dengan terlebih dahulu memintakan persetujuan Presiden.	Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP strategis dilakukan dalam bentuk tindakan konstruktif. Tindakan konstruktif adalah tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan PP/KP, yang dilaksanakan melalui kebijakan <i>refocusing</i> (pemfokusan kembali).

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
213.	<p>Mekanisme Pengendalian (Perubahan gambar pada Gambar 6.12. Mekanisme Pengendalian Pembangunan, Halaman VI.15)</p>	<p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>	<p>Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019</p>

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



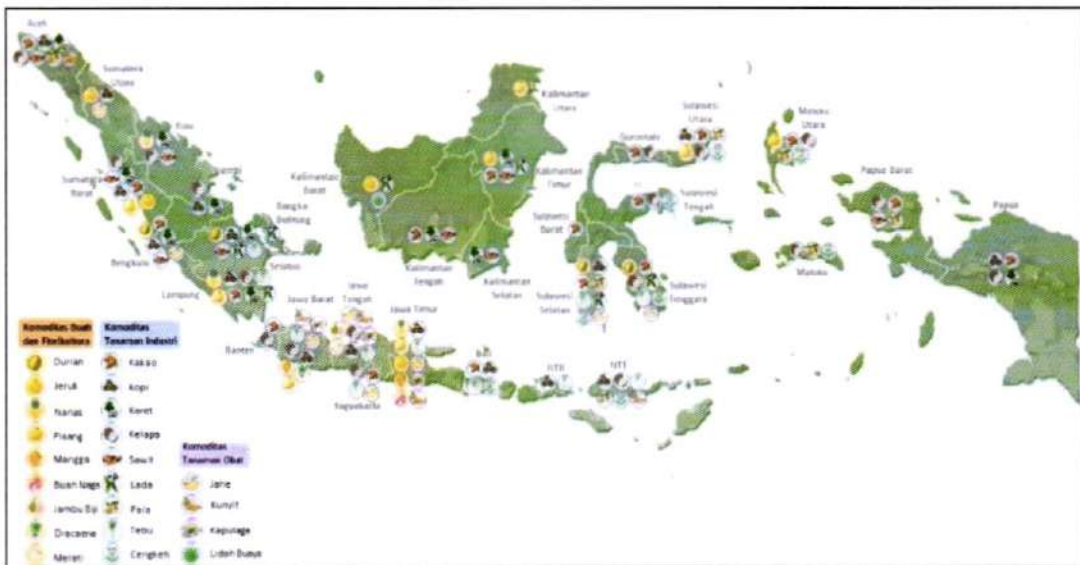
RR. Rita Erawati

SALINAN
 LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN
 2020

PEMUTAKHIRAN PETA ASPEK KEWILAYAHAN RKP 2020

Gambar 4.30

Peta Potensi Hilirisasi Pertanian



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Gambar 4.33

Peta Pengembangan Pariwisata Super Prioritas



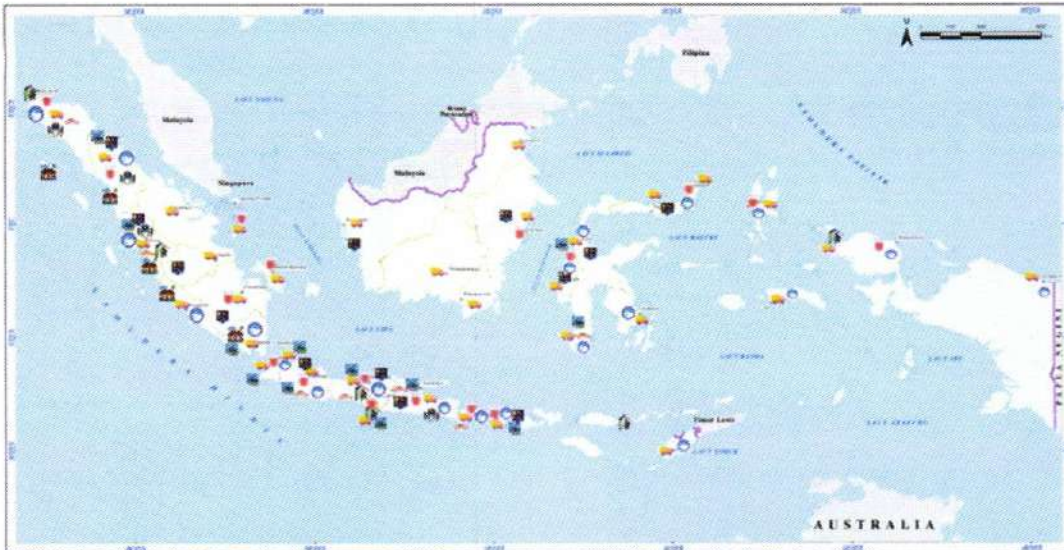
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Keterangan:

- : Destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang











Gambar 4.54

Peta Rencana Penguatan Ketahanan Bencana



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangan:

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | : Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana |  | : Layanan Budaya Sadar Bencana |
|  | : Sistem Peringatan Dini Bencana |  | : Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan |
|  | : Layanan Pengadaan dan Distribusi Logistik Kebencanaan |  | : Desa Tangguh Bencana |
|  | : Layanan Pemulihan Dan Peningkatan Ekonomi Di Daerah Pascabencana |  | : Informasi Gempabumi Dan Tsunami Dengan Pemasangan Seismograf |
|  | : Layanan Peningkatan Sarana | | |
|  | : Pusat Pengendali Operasi Kebencanaan: Pusdalops | | |




Gambar 4.64

Aspek Kewilayahan PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangan:

-  : Command Center
-  : Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
-  : Rumah Susun Polri

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN
2020

**INTEGRASI PENDANAAN ALOKASI PADA PRIORITAS NASIONAL
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020**

PN	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI (RP. MILIAR)
01	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	143,126.9
02	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	39,551.4
03	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	24,210.1
04	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	40,300.0
05	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	39,895.6
JUMLAH		287,084.0

Keterangan:

Alokasi Pada Prioritas Nasional dirinci sampai dengan proyek di Kementerian/Lembaga

PROGRAM PRIORITAS/KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALOKASI (RP. MILIAR)
Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	1,089.9
Kementerian Dalam Negeri	6.4
Kementerian Agama	4.0
Kementerian Sosial	236.6
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	58.6
Kepolisian Negara Republik Indonesia	752.7
Badan Narkotika Nasional (BNN)	19.8
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.1
Kementerian Pemuda dan Olahraga	5.0
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	5.8
JUMLAH	39,895.6

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati